



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Jln. Palmas No.1
Pelabuhan Tanjung Priok
Jakarta 14310

Telp : 021-43910256
021-43910259
Fax : 021-4305256

<http://oppriok.dephub.go.id>
optanjungpriok@dephub.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK
NOMOR : HK.206/2/11/OP.TPK-2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.936/DJPL/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

/6. Peraturan



"Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani"



6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan 2005-2025;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K / L) Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1710);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1390);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1420);
15. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.936/DJPL/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK TAHUN 2020-2024.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib digunakan oleh setiap bidang/bagian di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

/KETIGA

- KETIGA : Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **30 Juni 2021**

KEPALA KANTOR OTORITAS
PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK



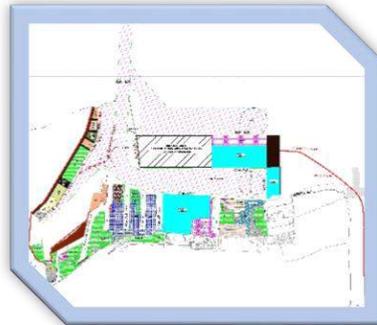
WISNU HANDOKO, DR., CAPT., M.SC
NIP. 19731031 199903 1 002

SALINAN Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Kepala Bidang/Bagian di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.



**Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok**



**Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok**

KATA PENGANTAR

Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 Nomor HK.206/2/11/OP.TPK-2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024, disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.936/DJPL/2020 tentang Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

Renstra Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 memuat Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024.

Dengan adanya Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, rencana kinerja pencapaian *outcome* dan *output* untuk Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan memenuhi aspek akuntabilitas kinerja pemerintahan. Selanjutnya dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran di Tahun 2020-2024 di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan ini kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan sektor transportasi laut guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, 30 Juni 2021

KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN
UTAMA TANJUNG PRIOK



Dr. Cept. WISNU HANDOKO, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731031 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.....	1
1.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2015 s.d 2019	4
1.1.3.1 Capaian Kinerja Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2015-2019	4
1.1.3.2 Rencana, Alokasi dan Realisasi Kinerja Keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019	12
1.1.3.3 Permasalahan Pelaksanaan Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019	12
1.2. IDENTIFIKASI PERKEMBANGAN POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	16
1.2.1 Perubahan Lingkungan Strategis Transportasi Laut.....	16
1.2.2 Isu Strategis Transportasi Laut.....	18
1.2.3 Perubahan Lingkungan dan Isu Strategis Bidang Kepelabuhanan	20
1.2.3.1 Perubahan Lingkungan Strategis Bidang Kepelabuhanan	21
1.2.3.2 Isu Strategis Bidang Kepelabuhanan	22
BAB II VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS	24
2.1 VISI, MISI, serta Sasaran Pembangunan Nasional 2020-2024.....	24
2.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2020–2024.....	24
2.1.2 Agenda Pembangunan Nasional 2020–2024.....	25
2.2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	31
2.2.1 Visi Kementerian Perhubungan	31
2.2.2 Misi Kementerian Perhubungan	32
2.2.3 Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan 2020-2024	33
2.3 VISI, MISI, TUJUAN, dan SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	40
2.3.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.....	40
2.3.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024	40

2.3.3	Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020–2024.....	41
2.4	Visi, Misi tujuan dan SASARAN program KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	49
2.4.2	Visi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024	49
2.4.3	Misi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024.....	49
2.4.4	Tujuan dan Sasaran Program Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024.....	49
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....		74
3.1.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS NASIONAL	74
3.1.1.	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2020-2024	74
3.1.2.	Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 Di Bidang Transportasi Laut	76
3.2.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	78
3.2.1	Arah Kebijakan Dan Strategi Umum.....	78
3.2.2	Arah Kebijakan Dan Strategi Pencapaian Sasaran	78
3.3.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Tahun 2020-2024.....	83
3.3.1	Arah Kebijakan Umum Perhubungan Laut Tahun 2020–2024.....	83
3.3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kinerja Bidang Perhubungan Laut 2020-2024	86
3.4.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK 2020-2024	95
3.4.1	Arah Kebijakan Umum Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024.....	95
3.4.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024.....	95
3.5.	KERANGKA REGULASI.....	98
3.5.1	Kerangka Regulasi Umum di Bidang Transportasi Laut.....	98
3.5.2	Kerangka Regulasi di Bidang Kepelabuhanan.....	100
3.6.	KERANGKA KELEMBAGAAN.....	101
3.6.1	Kerangka Kelembagaan di Bidang Transportasi Laut.....	101
3.6.2	Kerangka Kelembagaan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok..	102
3.6.3	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	103
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....		107
4.1	TARGET KINERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK 2020-2024.....	107
4.2	KERANGKA PENDANAAN.....	115

BAB V PENUTUP	118
5.1. KESIMPULAN	118
5.2. MEKANISME EVALUASI	119
LAMPIRAN 1.....	120
LAMPIRAN 2.....	128
LAMPIRAN 3.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2015-2019	7
Tabel 1.2 Perkembangan Alokasi Anggaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2015-2019	14
Tabel 1.3 Penyerapan Anggaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Rp. 000)	15
Tabel 1.4 Perubahan Lingkungan Strategis Penyelenggaraan Transportasi Laut	16
Tabel 1.5 Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut	19
Tabel 1.6 Perubahan Lingkungan Strategis Bidang Kepelabuhanan.....	21
Tabel 1.7 Isu Strategis Bidang Kepelabuhanan.....	22
Tabel 2.1 Arahan Utama Presiden untuk Periode Pembangunan 2020-2024.....	25
Tabel 2.2 Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Transportasi dalam Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024.....	29
Tabel 2.3 Langkah Konkrit Pencapaian Visi Presiden dalam Sektor Perhubungan, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	37
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024	47
Tabel 2.5 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024	54
Tabel 3.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024	74
Tabel 3.2 Arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 di Bidang Transportasi Laut...	77
Tabel 3.3 Arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024	80
Tabel 3.4 Strategi Implementasi Penyelenggaraan Transportasi Laut 2020-2024.....	88
Tabel 3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	96
Tabel 3.6 Kerangka Regulasi Transportasi Laut.....	99
Tabel 3.7 Kebutuhan formasi jabatan administrasi dan teknis	104
Tabel 4.1 Target Kinerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024	108
Tabel 4.2 Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Pembangunan Infrastruktur Nasional 2020-2024.....	28
Gambar 2.2 Peta Strategi Kementerian Perhubungan 2020-2024	39
Gambar 2.3 Peta Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	46
Gambar 2.4 Peta Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	53
Gambar 3.1 Kerangka Umum Kelembagaan Penyelenggaraan Bidang Transportasi Laut 2020-2024.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 disusun sebagai pelaksanaan dari mandat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rencana Strategis (Renstra) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan kegiatan dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk periode 5 (lima) tahun 2020–2024.

Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan di bidang Kepelabuhanan yang menjadi tugas dan fungsi dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (sesuai PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan) sebagai pelaksanaan dari visi dan misi serta arahan dan prioritas pembangunan dari Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024.

Secara teknis dan prosedural penyusunan dokumen Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 berpedoman pada Permen PPN/Bappenas No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024. Dalam hal ini, Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020), Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 (PM 80 Tahun 2020), dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP.936/DJPL/2020 Tahun 2020).

Sejalan dengan perkembangan kebijakan di tingkat nasional maupun internal, dan dalam rangka mengantisipasi perubahan isu strategis dan lingkungan strategis yang terjadi, maka kebutuhan untuk dilakukannya penyusunan Rencana Strategis Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 menjadi sangat penting guna menentukan arah dan sasaran pembangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Sesuai Permen PPN/Bappenas No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, maka Renstra K/L (serta Unit Kerja di bawahnya) merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020), termasuk di dalamnya visi, misi, arahan dan prioritas Presiden, sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing K/L dan Unit Kerja

di bawahnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka visi, misi dan sasaran program Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Laut termasuk Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok perlu menyesuaikan terhadap visi, misi, arahan dan prioritas Presiden.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi serta jaringan jalan dan sarana bantu navigasi pelayaran, sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan;
- 2) Penyusunan rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
- 3) Penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut serta penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan;
- 5) Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- 6) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- 7) Pelaksanaan peran sebagai wakil Pemerintah dalam pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan.

STRUKTUR KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA ESELON II.b



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

- Secara detail penjabaran tugas dan fungsi setiap Bagian/Bidang serta Subbag/Seksi di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 23 tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.HL.103/2/8/DJPL.15 tentang Penetapan Wilayah Kerja Penyelenggara Pelabuhan yang dikoordinasikan oleh Otoritas Pelabuhan Utama. Bahwa Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok membawahi beberapa wilayah kerja/provinsi meliputi:
 1. Bengkulu
 2. Sumatera Selatan
 3. Bangka Belitung
 4. Lampung
 5. DKI Jakarta
 6. Jawa Barat
 7. Banten
 8. Kalimantan Barat

Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 merangkum berbagai upaya dari seluruh Bagian/Bidang di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (sebagaimana tertera pada **Gambar 1.1** di

atas) untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan serta manfaat dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam mewujudkan visi dan misi Presiden 2020-2024.

1.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2015 s.d 2019

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024 harus memperhatikan berbagai capaian dan juga permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya (Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2015-2019). Evaluasi pelaksanaan Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2015-2019 sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) 2019, serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

1.1.3.1 Capaian Kinerja Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2015-2019

Evaluasi atas capaian kinerja berupa realisasi dari target pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019 yang diukur melalui pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan disampaikan pada Tabel 1.1.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah IKK serta sasaran yang telah ditetapkan:

- a. Pada sasaran **“Meningkatnya kinerja kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan kegiatan lainnya dalam rangka keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja pelabuhan”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 1. Jumlah Pengawasan di Wilayah DLK_r dan DLK_p;
 2. Jumlah Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Keluar Masuk Pelabuhan;
 3. Jumlah Pengawasan terhadap Lalu Lintas Barang dari dan ke Pelabuhan;
 4. Pengawasan terhadap embarkasi/debarkasi kapal Penumpang;
 5. Pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan kegiatan lainnya di luar operasional dan pelayanan.
- b. Pada sasaran **“Meningkatnya Keamanan diwilayah DLKR dan DLKp Pelabuhan”** yang diukur dari indikator kinerja jumlah SOP yang ditetapkan;
- c. Pada sasaran **“Menurunnya jumlah gangguan keamanan diwilayah kerja pelabuhan”** yang diukur dari indikator kinerja jumlah gangguan keamanan pelabuhan;
- d. Pada sasaran **“Meningkatnya Kinerja Operasional Pelabuhan dalam rangka pemenuhan Standar yang ditetapkan”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Waiting Time (WT)
 - Dermaga Konvensional;
 - Dermaga Petikemas.
 - 2) Pencapaian Effektive Time (ET/BT)
 - Dermaga Konvensional.
 - 3) Pencapaian Tingkat Penggunaan Dermaga (BOR)
 - Dermaga Konvensional;
 - Dermaga Petikemas.
 - 4) Tingkat Produktivitas Kerja
 - Dermaga Konvensional (T/G/J)
 - (a) B/M Barang Non Petikemas (General Cargo)
 - (b) B/M Barang Non Petikemas (Bulk Cargo)
 - (c) B/M Barang Non Petikemas (Un Caries)
 - (d) B/M Barang Non Petikemas (Curah Cair)
 - (e) B/M Barang Non Petikemas (Curah Kering)
 - Dermaga Petikemas (B/C/H)
 - 5) Peningkatan Tingkat Penggunaan Gudang (SOR);
 - 6) Peningkatan Efektivitas penggunaan Lapangan (YOR)
 - (a) Dermaga Konvensional;
 - (b) Dermaga Petikemas;
- e. Pada sasaran **“Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Transportasi Laut”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: jumlah Pegawai yang Mmemiliki Sertifikat Keahlian (Bidang Teknis dan Bidang Non- Teknis).
- f. Pada sasaran **“Meningkatnya Kinerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dalam Mewujudkan Good Governance”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- 1) Jumlah Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan teknis serta akuntabilitas kinerja;
 - 2) Prosentasi Penyerapan anggaran;
 - 3) Nilai Barang Miik Negara (BMN);
 - 4) Realisasi Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP);
 - 5) Jumlah Study/Kajian/Desain/ Dokumen Master Plan, DLKr dan DLKp Pelabuhan.
- g. Pada sasaran **“Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta perkantoran lainnya”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- 1) Jumlah Gedung Kantor / Halaman yang fungsinya terpulihkan ;
 - 2) Jumlah waktu terpulihnya fungsi peralatan / perlengkapan Kantor;
 - 3) Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan / perlengkapan kantor;
 - 4) Jumlah waktu terpulihnya fungsi Kendaraan Bermotor untuk mendukung Pelayanan Administrasi dan Operasional;
 - 5) Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan Administrasi dan Inventaris Perkantoran.

- h. Pada sasaran **“Meningkatnya Konsesi/ Perjanjian Kerjasama lainnya terkait fasilitas dan pelayanan di Pelabuhan”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: jumlah Konsesi / Perjanjian Kerjasama lainnya terkait fasilitas dan pelayanan di Pelabuhan;
- i. Pada sasaran **“Meningkatnya Produktivitas Arus Penumpukan dan Barang”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Muatan Angkutan laut Penumpang
 - Perintis
 - (a) R-37
 - (b) R-38
 - Non Perintis
 - 2) Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang
 - Perintis
 - (a) R-37
 - (b) R-38
 - Non Perintis
 - 3) Jumlah voyage Angkutan Laut Perinti
 - Perintis
 - (a) R-37
 - (b) R-38
- j. Pada sasaran **“Meningkatnya Layanan Transportasi Laut di Perbatasan Negara, Pulau Terluar dan Wilayah Non Komersial Lainnya”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: Jumlah Pelabuhan Singgah yang dilayani Angkutan Laut Perintis R-37 dan R-38;

Hasil capaian kinerja dalam Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 1.1**,

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2014	2015			2016			2017			2018			2019			
			TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	
1).	Jumlah pengawasan di wilayah DLKr dan DLKp	Kegiatan	100	100	100	100	220	220	100	220	220	100	220	220	100	-	-	-
2)	Jumlah pengawasan dan penertiban kendaraan keluar masuk pelabuhan	Kegiatan	250	250	250	100	220	220	100	220	220	100	220	220	100	-	-	-
3)	Jumlah pengawasan terhadap lalu lintas barang dari dan ke pelabuhan	Kegiatan	250	250	250	100	220	220	100	220	220	100	220	220	100	-	-	-
4)	Pengawasan terhadap embarkasi/debarkasi kapal penumpang	Kegiatan	1200	1200	1200	100	1200	1200	100	1200	1200	100	1200	1200	100	-	-	-
5)	Pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan kegiatan lainnya di luar operasional dan pelayanan	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6)	Jumlah SOP yang ditetapkan	SOP	2	2	2	100	0	-	-	1	1	100	1	1	100	-	-	-
7)	Jumlah Gangguan keamanan dipelabuhan	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*) IKU 1 s.d 7 merupakan target kinerja dari tahun 2015 s.d 2017																		
8)	Prosentase pencapaian On Time Performance (OTP) Transortasi Laut																	
A	Pencapaian Waiting Time (WT) dan Approach Time (AT)																	
	- Waiting Time (WT)																	
	- JICT (TPK)	Jam	1	1	0,54	54	1	0,44	44	1	0,71	140,8	1	0,43	232,6	1	0,53	190,5
	- KOJA (TPK)	Jam	1	1	1,54	154	1	1,99	19,9	1	2,19	45,66	1	2,18	35,71	1	0,60	167,4
	- MAL (TPK)	Jam	-	-	-	-	1	1,33	13,3	1	2,16	45,66	1	1,41	70,92	1	0,47	215,1
	- Terminal Operator I PT Pelindo II (Persero) Cabang Tg. Priok	Jam	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Terminal Operator II PT Pelindo II (Persero) Cabang Tg. Priok	Jam	1	1	-	-	1	1	100	1	1,615	61,91	-	-	-	-	-	-
	- Terminal Operator III PT Pelindo II (Persero) Cabang Tg. Priok	Jam	1	1	0,94	94	1	0,94	94	1	0,71	140,8	1	1,16	86,21	-	-	-
	- NPCT1 (Terminal Kalibaru)												1	2,97	33,67	1	0,51	196,1
	- Approach Time (AT)																	
- JICT (TPK)	Jam	2,00	2,00	1,92	104,16	2,00	1,93	96,5	2,00	2,015	99,25	2	1,93	103,63	2	1,20	167,4	
- KOJA (TPK)	Jam	2,00	2,00	1,50	133,33	2,00	1,52	76	2,00	1,995	100,25	2	1,50	133,33	1,8	1,22	148,1	
- MTI (TPK)	Jam	1,50	-	-	-	1,50	1,03	68,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2014	2015			2016			2017			2018			2019			
			TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%										
- MAL	Jam												2	1	150,00	1.7	1,19	142,6
- Terminal Operator I PT Pelindo II (Persero) Cabang Tg. Priok	Jam	2,00	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Terminal Operator II PT Pelindo II (Persero) Cabang Tg. Priok	Jam	2,00	-	-	-	2,00	1	50	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Terminal Operator III PT Pelindo II (Persero) Cabang Tg. Priok	Jam	1,50	-	-	-	1,50	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencapaian Effektive Time (ET/BT)	%																	
- JICT (TPK)	%	85	85	84.92	99.91	85	87.58	103.04	85	88.60	104.24	88	87.42	100.66	85	88.46	104	
- KOJA (TPK)	%	85	85	84.48	99.39	85	85.27	100.32	85	89.83	105.68	85	88.75	95.77	85	90.67	107	
- IKT (Car Terminal)	%	70	70	-	-	70	-	-	70	68.17	97	70	80.12	87.37	70	83.68	120	
- Terminal MAL	%	75	75	-	-	75	72.73	96.97	75	70.62	94.16	75	76	98.86	75	79.57	106	
- Terminal TO1	%	70	70	66.72	78.49	70	62.93	89.9	70	65.19	93.13	70	67.85	103.16	-	-	-	
- Terminal TO2	%	70	70	75.02	88.26	70	61.97	88.53	70	61	87.14	70	71.82	97.47	-	-	-	
- Terminal TO3	%	75	75	67.03	78.88	75	70.89	101.27	75	72.88	104.11	75	69.08	108.57	-	-	-	
- NPCT1 (Terminal Kalibaru)	%	-	-	-	-	85	-	-	85	78.17	92	85	82,83	102,62	85	79,88	94	
Pencapaian tingkat penggunaan dermaga (BOR)																		
- JICT (TPK)	%	70	70	54.04	77.2	70	56.86	74.09	70	43.46	62.09	70	50.76	137.90	70	48.30	141	
- KOJA (TPK)	%	70	70	65.45	93.5	70	49.36	70.51	70	56.75	81.08	70	57.27	122.23	70	55.28	117	
- IKT (Car Terminal)	%	70	70	-	-	70	-	-	70	32.30	46.15	70	31.79	220.20	70	40.67	152	
- Terminal MAL	%	70	70	-	-	70	37.64	53.77	70	29.86	42.66	70	32.27	216.92	70	38.88	180	
- Terminal TO1	%	70	70	61.31	87.59	70	21.97	31.39	70	54.35	77.65	70	60.74	115.25	-	-	-	
- Terminal TO2	%	70	70	41.50	59.29	70	36.92	52.74	70	39.28	56.11	70	53.05	131.95	-	-	-	
- Terminal TO3	%	70	70	27.39	39.12	70	43.69	62.41	70	33.66	48.09	70	40.97	170.89	-	-	-	
- NPCT1 (Terminal Kalibaru)	%	70	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	41,42	169,00	70	39,92	162	
Tingkat produktivitas kerja bongkar muat																		
-Dermaga Konvensional																		
a) B/M barang non petikemas Bag Cargo (BC)																		
- Terminal TO1	(T/G/J)	40	40	66.25	165.62	40	54.33	135.83	40	63.26	158.16	40	72.81	182.03	-	-	-	
- Terminal TO2	(T/G/J)	40	40	-	-	40	10.92	27.3	40	43.22	108.06	40	55.38	138.45	-	-	-	
- Terminal TO3	(T/G/J)	40	40	-	-	40	63.27	158.18	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) B/M barang non petikemas General cargo																		
- Terminal TO1	(T/G/J)	35	35	69.83	199.51	135	78.18	223.37	135	81.65	60.49	135	71.09	52.66	-	-	-	
- Terminal TO2	(T/G/J)	35	35	199.04	568.69	135	156.71	447.74	135	148.01	109.64	135	112.15	83.07	-	-	-	
- Terminal TO3	(T/G/J)	35	35	88.31	252.31	135	146.39	418.26	135	44.21	32.75	-	-	-	-	-	-	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	BASELINE 2014	2015			2016			2017			2018			2019		
				TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%									
c)	B/M barang non petikemas (Unitized)																	
	- IKT (Car Terminal)	(T/G/J)	-	-	-	-	200	-	-	200	145,86	72,93	200	130,20	65,10	125	139,40	112
	- Terminal TO1	(T/G/J)	40	40	-	-	50	15,51	31,02	50	31,48	62,96	50	45,33	90,66	-	-	-
	- Terminal TO2	(T/G/J)	40	40	-	-	50	-	-	50	138,69	277,38	50	82,62	165,24	-	-	-
	- Terminal TO3	(T/G/J)	40	40	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	B/M barang non petikemas (Curah Cair)																	
	- Terminal TO1	(T/J)	150 (T/J)	150	55,32	36,88	150	57,03	38,02	150	69,52	46,34	150	65,96	43,97	-	-	-
	- Terminal TO2	(T/J)	150 (T/J)	150	125,35	83,57	150	91,15	60,77	150	116,48	77,65	150	97,26	64,84	-	-	-
	- Terminal TO3	(T/J)	-	150	-	-	150	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	B/M barang non petikemas (Cura h Kering)																	
	- Terminal TO1	(T/J)	100	100	141,54	141,54	100	160,87	160,87	100	122,55	122,55	100	131,56	131,56	-	-	-
	- Terminal TO2	(T/J)	100	100	148,16	148,16	100	140,67	140,67	100	173,28	173,28	100	233,74	233,74	-	-	-
	- Terminal TO3	(T/J)	100	100	129,69	129,69	100	--	--	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dermaga Petikemas (B/C/H)																	
	- JICT (TPK)	(B/C/H)	26	26	27,24	104,77	27	26,39	101,5	27	25,06	92,81	27	26,28	97,33	26	26,43	102
	- KOJA (TPK)	(B/C/H)	25	25	24,59	98,36	25	25,26	101,04	25	22,58	90,32	25	27,99	111,96	24	27,13	113
	- Terminal MAL	(B/C/H)	-	-	-	-	23	19,63	81,79	23	20,22	87,91	23	19,71	85,70	23	34,56	150
	- Terminal TO1	(B/C/H)	15	25	18,07	72,28	18	15,38	102,03	18	17,84	99,11	18	17,93	99,61	-	-	-
	- Terminal TO2	(B/C/H)	15	25	-	-	18	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Terminal TO3	(B/C/H)	15	25	22,53	90,12	23	20,65	137,67	23	21,33	92,74	23	21,5	93,48	-	-	-
	- NPCT 1	(B/C/H)	-	-	-	-	24	-	-	24	29,72	123,83	24	29,81	124,21	26	31,9975	123
	- Receiving																	
	- JICT (TPK)	Menit	40	40	43,08	107,70	40	65,98	164,95	40	78,5	196,25	40	87,67	45,63	87	80,08	109
	- KOJA (TPK)	Menit	90	60	54,68	91,13	60	39,48	65,80	60	49,89	83,15	60	40,90	146,70	60	39,78	151
	- Terminal MAL	Menit	-	30	-	-	30	26,50	88,33	30	19,41	64,70	30	20,33	147,57	30	20,63	145
	- NPCT 1	Menit	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	32,09	124,65	60	26,79	224
	- Delivery																	
	- JICT (TPK)	Menit	90	90	84,16	93,51	90	93,15	103,50	90	111,41	123,79	90	123,47	72,89	120	111,31	108
	- KOJA (TPK)	Menit	120	120	127,39	106,16	120	93,72	78,10	120	113,54	94,62	120	92,34	129,95	120	98,88	121
	- Terminal MAL	Menit	-	45	-	-	45	56,17	124,82	45	47,81	106,24	45	50,67	88,81	60	55,34	108
	- NPCT 1	Menit	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	47,39	84,41	75	31,25	240
e)	Peningkatan tingkat penggunaan gudang (SOR)																	
	- Terminal TO1	%	70	70	22,50	32,15	70	5,27	7,23	70	16,53	23,61	70	6,54	1070,3			
	- Terminal TO2	%	70	70	20,02	28,6	70	27,69	39,56	70	28,33	40,05	70	21,88	319,93			
	- Terminal TO3	%	70	70	-	-	70	-	-	70	-	-						
f)	Peningkatan efektivitas penggunaan lapangan (YOR)																	
	- JICT (TPK)	%	65	65	51,05	18,54	65	45,31	69,71	65	43,01	66,17	65	48,21	134,83	65	41,97	155
	- KOJA (TPK)	%	65	65	54,99	84,6	65	41,67	64,11	65	47,21	72,63	65	48,21	134,83	65	39,86	163
	- IKT (Car Terminal)	%	65	65	-	-	65	-	-	65	76,76	118,09	65	50,15	129,61	65	54,01	120
	- Terminal MAL	%	65	65	-	-	65	52,31	80,48	65	52,63	80,97	65	60,39	107,63	65	58,50	111
	- Terminal TO1	%	65	65	28,73	44,2	65	20,23	31,23	65	30,57	47,03	65	24,28	267,71	-	-	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2014	2015			2016			2017			2018			2019		
			TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
- Terminal TO2	%	65	65	32.66	50.25	65	30.21	46.48	65	37.45	57.62	65	37.33	174.12	-	-	-
- Terminal TO3	%	65	65	38.46	59.16	65	--	--	65	51.20	78.77	65	50.26	129.33	-	-	-
- NPCT1 (Terminal Kalibaru)	%	65	65	-	-	65	-	-	65	-	-	65	49,42	131,51	65	40,50	160
Kesiapan Operasi Peralatan																	
- JICT (TPK)	%	80	80	-	-	80	-	-	80	95.345	119.18	80	99	123,75	80	98,04	122,55
- KOJA (TPK)	%	80	80	-	-	80	-	-	80	87.17	108,96	80	94,51	118,14	80	92,98	116,23
- IKT (Car Terminal)	%	80	80	-	-	80	-	-	80	85	106.25	80	88	110,00	85	98,00	115,29
- Terminal MAL	%	80	80	-	-	80	-	-	80	82.65	103.32	80	85.30	106.63	80	89.48	111.85
- Terminal TO1	%	80	80	-	-	80	-	-	80	--	--				-	-	-
- Terminal TO2	%	80	80	-	-	80	-	-	80	31.66	39.58				-	-	-
- Terminal TO3	%	80	80	-	-	80	-	-	80	84.86	106.08	80	87,02	108,78	-	-	-
- NPCT1 (Terminal Kalibaru)	%	-	-	-	-	80	-	-	80	99	123.75	80	99	123,75	80	99,00	123,75
9) Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keahlian																	
- Bidang teknis	Orang	30	30	-	-	36	-	-	30	50	166.67	30	30	100	30	27	90
- Bidang non-teknis	Orang	20	20	-	-	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
10) Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan teknis serta akuntabilitas kinerja	Dokumen	6	5	5	100	5	5	100	5	5	100	5	5	100	4	4	100
11) Prosentase penyerapan anggaran	%	100	100	70,75	70,75	100	81,10	81,10	100	70,16	70,16	90	77,74	86,38	90	94,13	104,58
12) Nilai Barang Milik Negara (BMN)	Rp.	70,100,637,000	70,100,637,000	417.793.716.153	595,99	29,394,036,000	373.474.977.646	1270,58	22,294,319,000	334.395.727.357	1499,91	-	-	-	14.778.480.162	15.836.291.587	107,16
13) Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp.	-	5,575,522,666	49,719,115.797	891,74	414,857,000,000	350.156.575.688	84,40	513,699,095.382	330,068.526.133	64,25	-	-	-	390,000,112.000	379,198.396.136	97,23
14) Jumlah Study/Kajian/desain/Dokumen Master Plan, DLKr dan DLKp Pelabuhan	Dokumen	14	14	19	135.71	11	22	200	4	9	225	7	7	100	1	1	100
15) Jumlah gedung kantor / halaman yang fungsinya terpulihkan (pagar dan gedung)	Meter ²	1769	1769	1769	100	1769	1769	100	1769	1769	100	1769	1769	100	-	-	-
	Meter ²	1296	1296	1296	100	1296	1296	100	1296	1296	100	1296	1296	100	-	-	-
16) Jumlah waktu terpulihkannya fungsi peralatan/perengkapan	Bulan	12	12	12	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100	-	-	-
17) Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/perengkapan kantor	Bulan	12	12	12	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100	-	-	-
18) Jumlah waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional	Bulan	12	12	12	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100	-	-	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2014	2015			2016			2017			2018			2019			
			TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	
19)	Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12	100	12	12	100	12	12	100	-	-	-
20)	Jumlah Konsesi/perjanjian kerjasama lainnya terkait fasilitas dan pelayanan di Pelabuhan	Konsesi/	2	2	2	100	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
		Perjanjian	5	5	5	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
21)	Jumlah muatan Angkutan Laut Penumpang Perintis - Non Perintis (naik dan turun)	Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penumpang	286,437	286,437	-	-	257,793	-	-	232,014	-	-	-	-	-	-	-	-
22)	Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang - Perintis - Non Perintis (ekspor/impur)	Unit	23012	23012	-	-	25,313	-	-	27,845	-	-	-	-	-	-	-	-
		GT	220,806,271	220,806,271	-	-	242,886,899	-	-	267,175,588	-	-	-	-	-	-	-	-
24)	Jumlah pelabuhan singgah yang dilayani angkutan laut perintis a) R- b) R-	Pelabuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pelabuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: LAKIP Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung PriokTh. 2018 dan Th. 2019

1.1.3.2 Rencana, Alokasi dan Realisasi Kinerja Keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019

Pada **Tabel 1.2** disampaikan perbandingan antara rencana kebutuhan anggaran, yang termuat di dalam Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019, dengan alokasi anggaran yang diperoleh berdasarkan data DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada setiap tahunnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran tiap tahun di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok hanya dapat **memenuhi 86,94%** dari kebutuhan anggaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok tahun 2015-2019. Perbedaan alokasi anggaran ini dapat menyebabkan beberapa target kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis tidak dapat tercapai sepenuhnya.

Pada **Tabel 1.3** disampaikan perbandingan antara alokasi anggaran (DIPA) dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa daya serap anggaran di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok hanya **sekitar 78,796 %** dari yang dialokasikan.

1.1.3.3 Permasalahan Pelaksanaan Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019

Atas dasar evaluasi terhadap capaian kinerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019 (yang disampaikan pada **Sub Bab 1.1.3.1.**) dan evaluasi atas realisasi anggaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019 (yang disampaikan pada **Sub Bab 1.1.3.2.**), terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan tidak tercapainya rencana kinerja dan anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019, diantaranya:

a. Keterbatasan Anggaran

Usulan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang diajukan sesuai dengan Renstra belum sepenuhnya disetujui mengingat ketersediaan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan anggaran diprioritaskan untuk proyek strategis nasional;

b. Terdapat kinerja Terminal yang belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan

Beberapa terminal baik peti kemas maupun curah di Pelabuhan Tanjung Priok masih ada yang belum dapat memenuhi target kinerja bongkar/muat dikarenakan peralatan yang dimiliki usianya sudah tua dan perlu peremajaan sehingga mempengaruhi produktivitas kinerja bongkar/muat sedangkan pihak terminal belum sanggup untuk melakukan pengadaan peralatan baru. Penyebab lainnya adalah pola operasi bongkar muat melalui *truck lossing* yang terkendala pengaturan jam operasional truk di DKI Jakarta sehingga kapal menunggu muatan.

c. Keterbatasan SDM Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok baik secara kualitas dan kuantitas;

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok masih memerlukan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas. Peningkatan kemampuan dan keterampilan perlu untuk selalu dilakukan melalui pengikutsertaan dalam bimtek, pelatihan maupun pendidikan.

d. Pelaksanaan perlindungan maritim perlu untuk ditingkatkan

Bahwa selama kurun waktu 2014-2019 terdapat kondisi belum optimalnya pemanfaatan *reception facilities* di Pelabuhan Tanjung Priok, dikarenakan tidak semua kapal melaporkan pembuangan limbahnya saat menyinggahi Pelabuhan Tanjung Priok.

e. Penyerapan anggaran yang belum optimal

Terdapat kinerja penyerapan anggaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kurangnya kontrol terhadap monitoring penyerapan anggaran.

f. Belum terselesaikannya penetapan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok sesuai PM 38 Tahun 2012 perlu untuk dilakukan reviu mengingat terjadinya perubahan lingkungan strategis dan menjawab kebutuhan penyesuaian rencana pengembangan baik di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Marunda sebagai pelabuhan yang berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan masih dalam satu kawasan DLKrDLKp. Reviu Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok telah disusun sejak tahun 2015 dan terus dilakukan updating data operasional dan kebutuhan rencana pengembangan pelabuhan. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok telah diterbitkan dari Gubernur Jawa Barat dan Bupati Kabupaten Bekasi pada tahun 2019 dan masih kurangnya rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta yang sampai saat ini belum diterbitkan sehingga belum dapat diproses penetapan kepada Menteri Perhubungan. Dengan belum ditetapkannya reviu Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok, maka terdapat rencana-rencana pengembangan pelabuhan yang belum dapat diimplementasikan.

Beberapa permasalahan tersebut di atas untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dan kebijakan serta daftar kegiatan dan anggaran yang dimuat di dalam Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024.

Sejumlah kegiatan yang tidak terlaksana pada periode Renstra 2015-2019, akan dipertimbangkan menjadi *Rolling Plan* yang direncanakan akan dilaksanakan pada periode Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024.

Tabel 1.2 Perkembangan Alokasi Anggaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2015-2019

(Dalam Ribu Rupiah)

No.	Program/ Kegiatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Renstra	Alokasi Anggaran	%	Renstra	Alokasi Anggaran	%	Renstra	Alokasi Anggaran	%	Renstra	Alokasi Anggaran	%	Renstra	Alokasi Anggaran	%
1.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	70,011,421	70,011,421	100	46,412,986	46,412,986	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	41,439,960	41,439,960	100	44,768,529	44,768,529	100	50,094,898	50,094,898	100	58,327,283	-	-	46,246,944	-	-
3.	Sistem Akuntansi Instansi (SAI) / Pengelola Keuangan	259,707	259,707	100	301,450	301,450	100	1,725,990	1,725,990	100	-	-	-	-	-	-
4.	Sosialisasi/Diseminasi / Seminar/Publikasi	583,142	583,142	100	497,001	497,001	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Studi/ Kajian/ Survey/ Master Plan/DLKr/DLKp	9,999,383	9,999,383	100	17,818,133	17,818,133	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											15.675.910			19.345.942	
7.	Layanan Internal											686.064			3.902.285	
8.	Layanan Perkantoran											19.589.535			1.975.700	
9.	Layanan Kepelabuhanan											5.081.944			4.533.998	

Sumber: LAKIP 2015-2019, RKT 2019

Tabel 1.3 Penyerapan Anggaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Rp. 000)

(Dalam Ribu Rupiah)

No	Program/ Kegiatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	6.791.965.000	7.068.313.839	104,1	14.109.891.000	13.053.000.022	92,51	14.220.678.000	11.796.450.881	82,95	13.623.200.000	12.844.000.214	94,28	13.561.913.000	13.531.280.548	99,77
2.	Belanja Barang	91.563.926.000	63.659.633.918	69,52	63.973.162.000	55.378.526.463	86,57	24.137.183.000	17.851.412.641	73,96	21.642.245.000	13.822.037.516	63,87	16.983.507.000	15.114.248.664	88,99
3.	Belanja Modal	13.451.381.000	8.123.044.500	60,39	6.919.365.000	435.711.000	6,37	12.206.569.000	5.833.130.872	47,79	5.768.008.000	5.232.173.340	90,71	2.191.453.000	2.170.628.950	99,05
	TOTAL	111.451.381.000	78.850.992.257	70,75	84.919.365.000	68.867.237.485	81,10	50.564.430.000	35.480.994.394	70,17	41.033.453.000	31.898.211.070	77,74	32.736.873.000	30.816.158.162	94,13

Sumber: LAKIP OP Priok 2015-2019

1.2. IDENTIFIKASI PERKEMBANGAN POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pada bagian ini disampaikan hasil identifikasi terhadap perkembangan faktor eksternal yang menjadi lingkungan strategis serta permasalahan internal yang menjadi isu strategis di bidang transportasi laut yang perlu diperhatikan dalam penyusunan muatan Renstra 2020-2024. Substansi yang disampaikan pada bagian ini merupakan rangkuman dari pembahasan tentang perkembangan lingkungan strategis dan isu strategis yang termuat di dalam Renstra Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024.

1.2.1 Perubahan Lingkungan Strategis Transportasi Laut

Dalam beberapa tahun ke depan akan terdapat berbagai perkembangan lingkungan strategis global, nasional, maupun lokal yang menjadi peluang dan tantangan bagi penyelenggaraan transportasi laut nasional. Beberapa perkembangan lingkungan strategis tersebut diidentifikasi dengan pendekatan *STEEPLE* (*social, technological, economic, environmental, political, legal, and ethical*), hasilnya diuraikan pada **Tabel 1.4**

Tabel 1.4 Perubahan Lingkungan Strategis Penyelenggaraan Transportasi Laut

No.	Aspek	Perubahan Lingkungan Strategis
1.	<i>Social</i>	<ul style="list-style-type: none">• Bonus Demografi Indonesia dimana menurut UNFPA-Bappenas (2014) proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2035 akan mencapai 306 juta jiwa. Pembangunan SDM merupakan kebijakan strategis pemerintah 2020-2024• Penyebaran penduduk Indonesia belum merata, lebih dari 50% tinggal di pulau Jawa dan wilayah Perkotaan. Pulau Jawa Bagian Utara akan dikembangkan short sea shipping untuk mengurangi beban jalan. Kebijakan angkutan laut perintis, tol laut, pengembangan jaringan angkutan laut (termasuk pelayaran rakyat), dan pusat logistik “konsep rumah” kita diharapkan dapat mengikis disparitas yang ada;• Terjadinya perubahan perilaku di masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan system informasi. Berkembangnya <i>e-commerce</i>, dan pemanfaatan teknologi internet yang massif, telah merubah pola kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;• Peran masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayaran nasional, termasuk dalam mensukseskan agenda nasional dalam mewujudkan Indonesia menjadi poros maritime dunia.
2.	<i>Technological</i>	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomi dunia yang sudah sedemikian maju telah mengalami transformasi dari ekonomi yang berbasis industri kepada ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (<i>knowledge based economy</i>). Hal ini dapat terlihat dalam perkembangan ekonomi digital dan revolusi industri 4.0. Pemanfaatan teknologi informasi yang ekstensif di bidang perkapalan, system angkutan, layanan pelabuhan, serta kenavigasian akan mampu menghasilkan layanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga murah, aman, dan selamat.

No.	Aspek	Perubahan Lingkungan Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> • Trend kontainerisasi dunia (<i>world containerization trend</i>) telah mendorong berkembangnya ukuran kapal hingga generasi <i>post new panamax</i> dengan kapasitas mencapai lebih dari 15.000 TEUs. Indonesia harus mengantisipasi dengan penyediaan pelabuhan yang didesain untuk mampu melayani jenis kapal peti kemas yang lebih besar; • Perkembangan aplikasi teknologi di bidang pelayaran secara internasional, dimana system navigasi dan komunikasi pelayaran perlahan-lahan beralih menggunakan teknologi digital; • Pengembangan teknologi kapal yang menggunakan bahan bakar sumber energi baru dan terbarukan. Dalam aplikasi sudah digunakan sumber energy bio-solar dan LNG (<i>dual fuel</i>), serta penggunaan bahan bakar kapal rendah sulfur. Dalam tataran riset sedang dikembangkan kapal (komersial) bertenaga nuklir, surya dan angin; • Dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, Indonesia harus mampu bertransformasi menjadi <i>technology and market leader</i> dalam industri pelayaran dunia. Sehingga dibutuhkan penguasaan teknologi dan pengembangan industry pendukung di bidang pelayaran nasional.
3.	<i>Economic</i> (Kondisi Perekonomian)	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi ekonomi global yang mengalami <i>global shift</i> ke Negara-negara Asia. Hal ini memberikan 2 hal bagi bangsa Indonesia, yaitu menjadikan persaingan yang sangat ketat diantara bangsa-bangsa di Asia untuk memperebutkan sumberdaya ekonomi, dan di sisi lain membuka peluang yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk berada di barisan depan dari negara-negara maju dan modern Asia; • Untuk skala regional kerjasama diantara negara-negara ASEAN sudah mengarah kepada terbentuknya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dimana akan segera diterapkan liberalisasi perdagangan diantara negara anggotanya; • Kesenjangan ekonomi antar wilayah masih terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Transportasi laut sebagai media konektivitas antar pulau diharapkan untuk mengentaskan kesenjangan tersebut meskipun tantangannya adalah masih terjadinya <i>traffic imbalance</i> yang menyebabkan mahalnya biaya transportasi laut; • Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur perlu percepatan proyek-proyek strategis seperti KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), KEK (Kawasan ekonomi Khusus), PSN (Proyek Strategis Nasional), KI (Kawasan Industri), dan KIPI (Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia);
4.	<i>Environmental</i> (Isu lingkungan hidup)	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, perubahan iklim, bencana alam, serta makin langkanya sumber daya energy dunia, telah mengharuskan adanya perubahan dalam cara manusia berkegiatan ekonomi, termasuk dalam menyediakan pelayanan transportasi; • Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) telah dilaksanakan di Indonesia sesuai amanat

No.	Aspek	Perubahan Lingkungan Strategis
		<p>Perpres 61 tahun 2011 dan Kepmenhub No. KP. 201 Tahun 2013. Cakupan RAN GRK sub sektor transportasi laut: (a) pemakaian bahan bakar di kapal yang ramah lingkungan; (b) modernisasi kapal; (c) pengembangan eco seaport (green port); (d) efisiensi manajemen operasional pelabuhan; (e) peningkatan pengawasan lingkungan laut; (f) prediksi cuaca yang akurat; (g) penataan alur pelayaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program pengelolaan sampah yang dihasilkan dari kegiatan transportasi laut; • Pengembangan setiap jenis infrastruktur transportasi laut yang harus melalui tahapan studi lingkungan
5.	<i>Political</i> (Perkembangan politik)	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan masyarakat di daerah untuk tersedianya transportasi laut yang lebih merata, efektif dan efisien di seluruh NKRI dilaksanakan melalui program pengembangan pelabuhan, alur pelayaran, maupun jaringan pelayaran baik komersial, perintis, maupun penugasan. • Perwujudan cita-cita Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.
6.	<i>Legal</i> (Transformasi Pengaturan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban untuk melakukan ratifikasi sejumlah regulasi pelayaran internasional • Arahan presiden untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan birokrasi
7.	<i>Ethical</i> (Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan)	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan transportasi laut; • Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayaran publik dan pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan; • Responsif terhadap isu gender dan kaum difabel/penyandang disabilitas. • Perlindungan konsumen di bidang pelayaran

Sumber: disarikan dari Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024

1.2.2 Isu Strategis Transportasi Laut

Terdapat sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada penyelenggaraan transportasi laut yang menjadi isu strategis yang perlu diselesaikan dalam kerangka waktu pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024. Berbagai permasalahan/isu strategis tersebut sangat berkaitan dengan sarana dan fungsi manajemen penyelenggaraan sebagaimana diidentifikasi pada **Tabel 1.5**.

Tabel 1.5 Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan SDM aparatur di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut baik secara kuantitas maupun kualitas; • Kebutuhan SDM pelaut, operator pelabuhan dan unit usaha terkait pelayaran lainnya (termasuk tenaga pandu dan TKBM) sesuai dengan persyaratan kompetensi di Indonesia dan dunia internasional;
2.	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan APBN dengan terus ditingkatkan efisiensi dan efektifitasnya; • Pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan alternatif melalui berbagai skema <i>innovative financing</i>; • Penguatan perencanaan, regulasi dan kelembagaan, serta penjaminan pemerintah atas proyek infrastruktur menjadi kunci pemerintah dalam menarik sumber-sumber pembiayaan baru.
3.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Konektivitas dan pemerataan: Penyediaan layanan perintis dan tol laut masih perlu ditingkatkan dari sisi cakupan wilayah pelayanan; pengembangan pelabuhan di titik-titik terpencil, tertinggal dan terluar; • Kondisi dan keandalan: peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan, khususnya di pelabuhan utama sebagai pintu gerbang perdagangan dunia; pengembangan penyediaan armada kapal nasional termasuk kapal pelayaran rakyat; tingkat kecukupan SBNP; Penyediaan fasilitas kerja bagi UPT Ditjen Perhubungan Laut perlu dilengkapi dan diperbaharui sesuai perkembangan teknologi terkini; • Kapasitas dan produktivitas: kapasitas sebagian besar pelabuhan utama di Indonesia belum mampu melayani kapal berukuran besar (<i>post/new panamax</i> hingga <i>Ultra Large Container Vessel</i>) sehingga belum mampu berperan optimal sebagai <i>International Hub Port</i>; produktivitas pelayaran perlu ditingkatkan agar modal share angkutan laut menjadi meningkat melalui jaringan pelayaran komersil, perintis, tol laut, kapal ternak maupun pengembangan SSS (<i>Short-Sea Shipping</i>).

No.	Aspek	Isu Strategis
4.	Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Update aplikasi teknologi di bidang pelayaran • Pemanfaatan TIK di lingkungan Ditjen Hubla perlu ditingkatkan efektivitasnya dalam menyongsong era industri 4.0; penerapan Inaportnet, layanan digital di pelabuhan (<i>Gate-in</i> dan <i>Gate-out</i>), dan lain-lain harus menjadi arus utama dalam pembangunan di bidnag transportasi laut. • Pemanfaatan TIK yang kompatibel terhadap industri pelayaran internasional.
5.	Regulasi dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat struktur regulasi yang lengkap, terstruktur, namun tetap sederhana dan efektif; • Ratifikasi regulasi internasional di bidang pelayaran • Transformasi regulasi bidang pelayaran nasional
6.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan Ditjen Hubla (tata kelola dan organisasi) • Sinergi antar K/L terkait • Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; • Peningkatan kerjasama internasional/regional; • Peningkatan koordinasi internal
7.	Manajemen Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dan kualitas penyediaan SOP/ Juklak/Juknis; • Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur
8.	Kinerja dan Dampak Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya logistik yang masih tinggi; • Tingginya persaingan antarmoda; • Pencapaian target <i>dwelling time</i>; • Kinerja keselamatan dan keamanan • Optimalisasi kinerja pelayaran perintis, tol laut dan pelayaran rakyat; • Optimalisasi program beyond cabotage;

Sumber: disarikan dari Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024

1.2.3 Perubahan Lingkungan dan Isu Strategis Bidang Kepelabuhanan

Pada bagian ini disampaikan hasil identifikasi terhadap perkembangan faktor eksternal yang menjadi lingkungan strategis serta permasalahan internal yang menjadi isu strategis yang lebih spesifik di bidang Kepelabuhanan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan muatan Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024.

1.2.3.1 Perubahan Lingkungan Strategis Bidang Kepelabuhanan

Perkembangan lingkungan strategis global, nasional, maupun lokal yang menjadi peluang dan tantangan bagi bidang kesehatan pelayaran yang diidentifikasi dengan pendekatan STEEPLE (*social, technological, economic, environmental, political, legal, and ethical*), diuraikan pada **Tabel 1.6**.

Tabel 1.6 Perubahan Lingkungan Strategis Bidang Kepelabuhanan

No.	Aspek	Perubahan Lingkungan Strategis
1.	<i>Social</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan masyarakat dalam hal ketepatan dan kecepatan dalam pelayanan • Perubahan perilaku masyarakat dalam bertransportasi • Dukungan masyarakat yang kurang terhadap operasional
2.	<i>Technological</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 • Perkembangan aplikasi teknologi di bidang pelayaran secara internasional • Penguasaan teknologi dan industri pelayaran dalam negeri untuk mendukung poros maritim dunia • Penggunaan teknologi pemanfaatan energi terbarukan di Pelabuhan; • Penerapan <i>Smart Port</i> di Pelabuhan.
3.	<i>Economic</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Wilayah; • Kebutuhan Dukungan Terhadap Proyek Strategis Nasional; • Rencana Pengembangan <i>New Belt Shipping</i> yang Melintasi/ Mendekati/ Berdekatan/ Menyinggahi Pelabuhan di Wilayah Koordinasi Pelabuhan Tanjung Priok; • Mewujudkan Biaya Logistik di Pelabuhan yang berdaya saing.
4.	<i>Environmental</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan pelabuhan yang ramah lingkungan (<i>Eco Port</i>); • Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan lingkungan di kawasan pelabuhan; • Pemenuhan administrasi perijinan lingkungan; • Pemantauan pengelolaan lingkungan di pelabuhan; • Penegakan terhadap peraturan di bidang lingkungan.
5.	<i>Political</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan agenda <i>ASEAN Connectivity 2025</i>; • Adanya Trade War US-China (OBOR vs Indo-Pacific); • Kebijakan nasional untuk memberikan dukungan terhadap kawasan prioritas (KEK, KI, KSPN/DPN, SKPT); • Perwujudan cita-cita Indonesia Poros Maritim Dunia.
6.	<i>Legal</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan presiden untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan birokrasi;

No.	Aspek	Perubahan Lingkungan Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan SOP yang terintegrasi di wilayah Pelabuhan.
7.	<i>Ethical</i> (etika dalam penyelenggaraan pemerintah)	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan transportasi laut; • Penyediaan layanan bagi kaum berkebutuhan khusus dan <i>responsive gender</i> misalnya fasilitas ibu menyusui, dan penyadangan orang cacat; • Hadir dalam kegiatan sosial masyarakat di lingkungan pelabuhan dan sekitarnya; • Perlindungan konsumen/pengguna jasa di bidang kepelabuhanan.

1.2.3.2 Isu Strategis Bidang Kepelabuhanan

Sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada bidang Kepelabuhanan yang menjadi isu strategis dan perlu diselesaikan dalam kerangka waktu pelaksanaan renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024 diuraikan pada **Tabel 1.7**.

Tabel 1.7 Isu Strategis Bidang Kepelabuhanan

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai baik Jumlah dan Kualitasnya; • Penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi; • Analisis Beban Kerja.
2.	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya alokasi dana untuk kegiatan operasional (Pengadaan Lahan dan Pembangunan Kantor) yang memadai untuk melaksanakan tugas sesuai standar; • Masih kurangnya alokasi dana untuk mendukung peningkatan fungsi penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; • Optimalisasi pengelolaan PNBPN; • Optimalisasi pengelolaan BMN; • Penambahan anggaran dari perolehan pendapatan PNBPN.
3.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Lahan, Pembangunan Kantor dan Pembangunan Rumah Dinas pegawai • Belum tersedianya fasilitas kerja yang memadai • Perlunya fasilitas sarana pengawasan dan pemantauan kegiatan di seluruh area Pelabuhan Tanjung Priok
4.	Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Inaportnet yang terintegrasi dengan sistem <i>Port Waste Management System (PWMS)</i>; • Sistem Pendataan Aset Masih Secara Manual • Data yang masih belum terintegrasi dan online

No.	Aspek	Isu Strategis
5.	Regulasi dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian SOP sesuai dengan kebutuhan.
6.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (tata kelola dan organisasi) • Sinergi antar stakeholder di lingkungan pelabuhan
7.	Manajemen Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dalam pelaksanaan kegiatan (kearsipan dokumen, persiapan dokumen, perencanaan dan kesiapan SDM); • Koordinasi antar K/L lain dalam pengadaan lahan (Dinas PU dan BPN) • Koordinasi antar K/L lain dan BUP dalam penyelesaian HPL atas penyediaan lahan daratan pelabuhan (BPN dan BUP) • Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan
8.	Kinerja dan Dampak Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan terhadap agenda pembangunan Nasional dan daerah • Biaya logistik nasional • Kinerja pelayanan pelabuhan • Keselamatan dan keamanan • Pelayanan jasa bongkar muat yang berdaya saing

BAB II

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI, MISI, SERTA SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020).

2.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2020 – 2024

Visi presiden dan wakil presiden terpilih 2020-2024 Jokowi-Ma'ruf Amin sebagaimana tercantum di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Adapun penjelasan dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Indonesia yang Maju adalah bangsa yang memiliki kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, dan tingkat perekonomian yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap;
- Indonesia yang Mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
- Berkepribadian dan gotong royong terus menjadi kekuatan kerja bersama kita dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan. Selama empat tahun ini kita sudah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kerja bersama, apa pun bisa dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka, dalam lima tahun ke depan, kita yakin nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya, Presiden juga memberikan 5 arahan utama untuk periode 2020-2024 dalam rangka melaksanakan cita-cita jangka panjang nasional, yakni misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, yakni:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
2. Pembangunan Infrastruktur,
3. Penyederhanaan Regulasi,
4. Penyederhanaan Birokrasi, Dan
5. Transformasi Ekonomi.

Adapun deskripsi lebih detail terkait dengan arahan Presiden tersebut disampaikan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Arahan Utama Presiden untuk Periode Pembangunan 2020-2024

NO	ARAHAN UTAMA	DESKRIPSI
1	Pembangunan SDM	Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global
2	Pembangunan infrastruktur	Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3	Penyederhanaan regulasi	Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan <i>omnibus law</i> , terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja; Kedua, UU Pemberdayaan UMKM
4	Penyederhanaan birokrasi	Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5	Transformasi ekonomi	Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020)

2.1.2 Agenda Pembangunan Nasional 2020 – 2024

Pelaksanaan visi, misi, dan arahan Presiden tersebut dalam aktivitas pembangunan nasional dilakukan melalui 7 agenda Pembangunan Nasional (PN) RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020), yakni:

- PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- PN2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

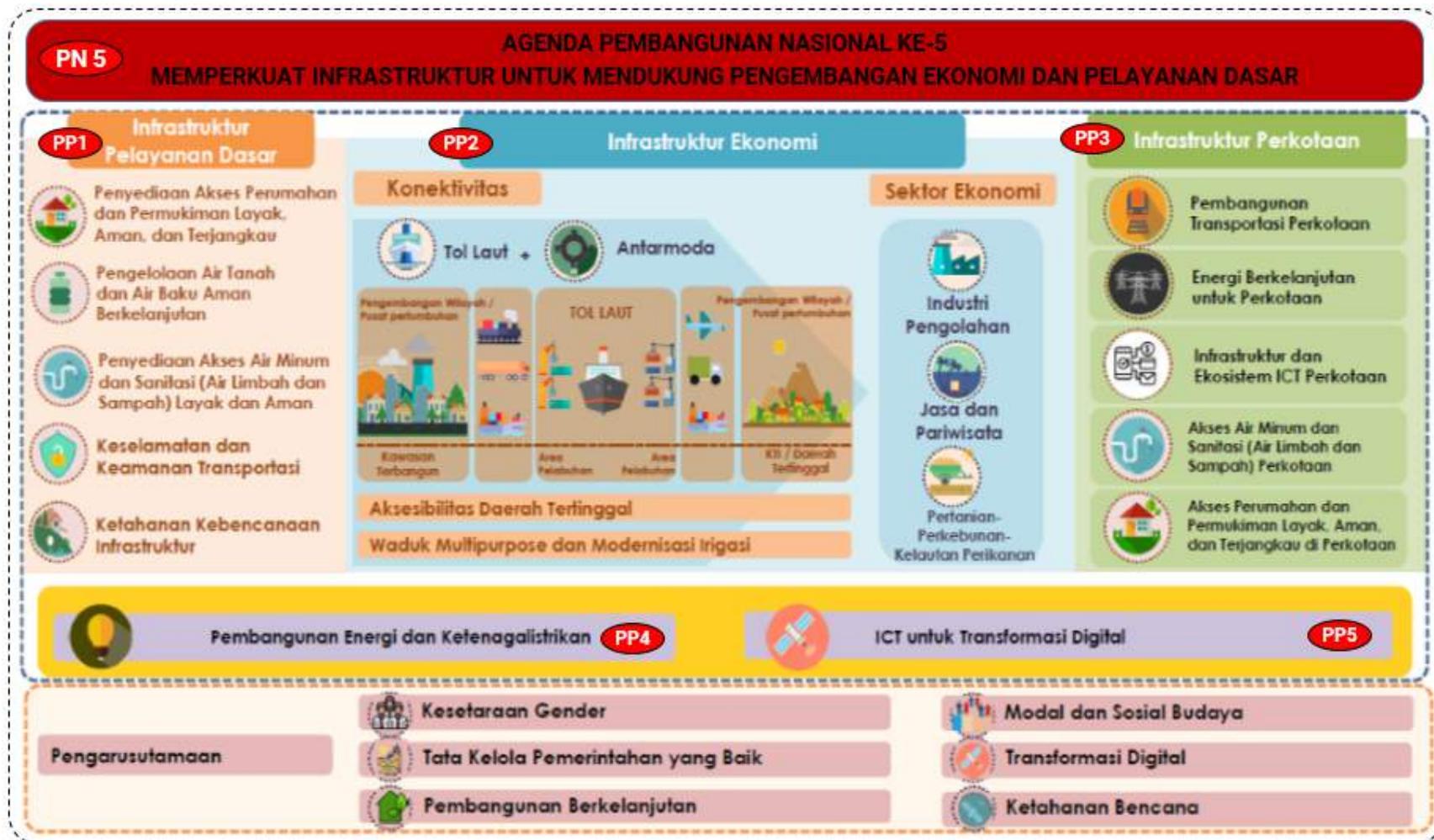
Secara spesifik, dalam RPJMN 2020-2024 sektor transportasi masuk ke dalam agenda pembangunan nasional yang ke-5, yakni “PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”. Dalam hal ini, kerangka nasional pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2020-2024 disampaikan pada **Gambar 2.1**, di mana PN5 tersebut memiliki 5 Program Prioritas, yakni:

- PP1 Infrastruktur Pelayanan Dasar (dilengkapi penjabarannya)
 - a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
 - b. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 - c. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
 - d. Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - e. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur;
 - f. Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi.
- PP2 Infrastruktur Ekonomi
 - a. Konektivitas jalan;
 - b. Konektivitas kereta api;
 - c. Konektivitas laut;
 - d. Konektivitas udara;
 - e. Konektivitas darat.
- PP3 Infrastruktur Perkotaan
 - a. Transportasi perkotaan;
 - b. Energi dan ketenagalistrikan perkotaan;
 - c. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan;

- d. Penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan;
 - e. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan.
- PP4 Energi dan Ketenagalistrikan
- a. Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - b. Akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan.
- PP5 Transformasi Digital
- a. Penuntasan infrastruktur TIK;
 - b. Pemanfaatan infrastruktur TIK;
 - c. Fasilitas pendukung transformasi digital.

Pelaksanaan dari setiap Program Prioritas (PP) melalui sejumlah Kegiatan Prioritas (KP). Sektor transportasi masuk ke dalam PP1, PP2, dan PP3, dengan KP serta sasaran, target, dan indikator sebagaimana disampaikan pada **Tabel 2.2.**¹

¹ Dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020), agenda pembangunan nasional ke-5 atau “PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” memiliki 5 Program Prioritas (PP) dengan 23 Kegiatan Prioritas (KP). Dalam hal ini, sektor transportasi masuk ke dalam (1) PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar pada KP.4 Keselamatan dan Keamanan Transportasi, (2) PP2. Infrastruktur Ekonomi pada KP.1 Konektivitas Transportasi Jalan, KP2. Konektivitas Transportasi Kereta Api, KP3. Konektivitas Transportasi Laut, KP 4. Konektivitas Transportasi Udara, KP 5. Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda, serta (3) PP3. Infrastruktur Untuk Mendukung Perkotaan pada KP1. Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan dan KP2. Infrastruktur Jalan Perkotaan.



Gambar 2.1 Kerangka Pembangunan Infrastruktur Nasional 2020-2024
 Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020)

Tabel 2.2 Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Transportasi dalam Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024

KERANGKA PEMBANGUNAN			SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET 2024			
PN	PP	KP							
PN5	PP1		Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
				Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	65			
		Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)		28	25				
		Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (rasio)			1,19				
		Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan (rasio)			50				
		Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA (rasio)			0,23				
	KP4	Keselamatan dan Keamanan Transportasi		Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)		28			
				Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,3	1,9			
				Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (Km)	1.461	2.500			
				Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	3.387	3.000			
				Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota (%)	92/68/57	97/75/65			
				Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km's)	6.164	7.451			
	PP2	Infrastruktur Ekonomi		Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,5	94,0			
				Rute pelayaran yang paling terhubung (<i>loop</i>) (%)	23	27			
				Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1	7			
				Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	14	25			
				Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	24	36			
				Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	15	21			
				Jumlah rute jembatan udara (rute)	35	43			
				KP1	Konektivitas Jalan		Panjang jalan baru yang dibangun (km)		3000
							Persentase kondisi mantap jalan nasional (%)		97
							Persentase kondisi mantap jalan provinsi (%)		75
							Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)		65
				KP2	Konektivitas Kereta Api		Panjang jalur KA yang dibangun (termasuk reaktivasi dan jalur ganda) (km)		
	Persentase kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> kategori 1 dan 2 (persen)		94						
	Panjang jalur KA yang beroperasi (km)								
	Jumlah simpul transportasi yang terakses Kereta Api (bandara dan pelabuhan) (lokasi)								
	KP3	Konektivitas Laut		Jumlah pelabuhan pelabuhan utama yang mencapai standar pelayanan (lokasi)		28			
				Jumlah trayek subsidi tol laut (trayek)		25			
	KP4	Konektivitas Udara		Jumlah rute jembatan udara (Rute)		34			
				Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)		21			

KERANGKA PEMBANGUNAN				SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET 2024
PN	PP	KP					
					Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya (lokasi)		10
					Jumlah bandara perairan (<i>waterbased airport</i>) yang dibangun (lokasi)		5
		KP5	Konektivitas Darat		Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)		36
	PP3		Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6
					Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota)	3	6
		KP6	Transportasi Perkotaan		Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun (kota)		7
					Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/ dikembangkan (kota)		
					Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan (BRT dan Sistem Transit) yang dibangun (kota)		

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020)

2.2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Muatan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan yang dicantumkan di dalam dokumen ini terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024.

2.2.1 Visi Kementerian Perhubungan

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020–2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020–2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.

Berdaya saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.

Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Relevansi perwujudan Visi Presiden dalam Sektor Perhubungan ini apabila dilihat dalam konteks 7 Agenda Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

Pertama, konektivitas nasional memberikan andil yang strategis dan menentukan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, terutama terkait ketimpangan akses dan pemerataan pembangunan antar kawasan Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, maupun antar kesenjangan pembangunan secara sektoral.

Kedua, konektivitas nasional mampu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terutama dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan konsep Tol Laut, mengurangi disparitas ekonomi, peningkatan daya saing perekonomian antar wilayah, serta pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar.

Ketiga, konektivitas nasional mampu menjembatani pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, sehingga cita-cita nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan dapat tercapai.

Keempat, melalui konektivitas nasional, strategi pembangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dapat dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta sentra-sentra kegiatan ekonomi produktif di suatu wilayah.

Pengurangan kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan merupakan salah satu fokus kebijakan pembangunan Indonesia 2005–2025. Pemerintah menempuh strategi pembangunan yang menekankan upaya terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

2.2.2 Misi Kementerian Perhubungan

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut :

Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;

4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut diatas, sudah selaras dan sejalan dengan Arahan Presiden untuk melaksanakan pembangunan di Sektor Perhubungan dengan mengacu pada amanat yang tertuang dalam 9 (sembilan) Misi Presiden.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan 2020-2024

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Presiden yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,69 pada tahun 2024;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
 - a. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
 - b. Capaian *on time Performance* (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.

3. Meningkatnya level keselamatan dan keamanan yang diukur dengan menurunnya rasio fatalitas kejadian kecelakaan transportasi menjadi 0,826 pada tahun 2024.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020-2025) diarahkan pada *Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif*. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 juga mencantumkan target *Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan*. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi; dan
4. Transportasi Perkotaan.

Empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015-2019 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan.

Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

SS 1. Terwujudnya Konektivitas Transportasi Nasional

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

Untuk mewujudkan tujuan:

1. Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian on time performance dan penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum, dan meningkatnya tata kelola organisasi;
3. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2020–2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator output, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran penunjang menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card (BSC)* yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Stakeholders Perspective*

Mencakup SS-1 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 1 Rasio Konektivitas Nasional

Dan mencakup SS-3 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 juta Keberangkatan

2. *Customer Perspective*

Mencakup SS-2 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

- IKSS 2.2 *On Time Performance* Layanan Transportasi

3. *Internal Process Perspective*

a. Mencakup SSp-4 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- IKSp 4 Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Hukum

b. Mencakup SSp-5 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- IKSp 5 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten

c. Mencakup SSp-6 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- Nilai indeks RB

d. Mencakup SSp-7 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- Opini BPK

e. Mencakup SSp-8 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

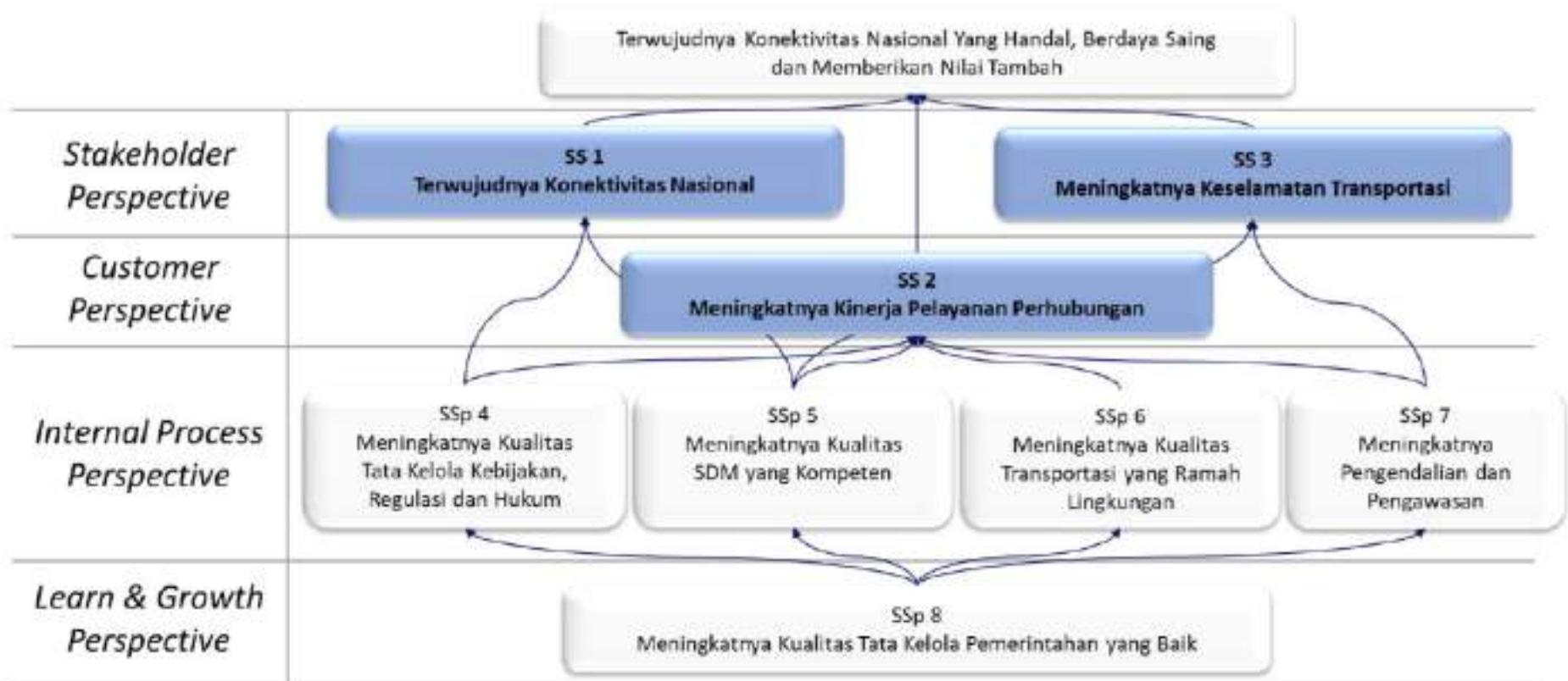
- Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi

Perwujudan Visi Presiden dalam sektor Perhubungan dan langkah konkret untuk mencapainya yang dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, tersaji pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.2 berikut.

Tabel 2.3 Langkah Konkrit Pencapaian Visi Presiden dalam Sektor Perhubungan, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

NO	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rasio aksesibilitas masyarakat terhadap jasa transportasi	Terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas nasional	Rasio konektivitas dan aksesibilitas nasional
2	Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Indeks kinerja layanan transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Indeks kinerja pelayanan perhubungan
3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Presentase tingkat kecelakaan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya keselamatan perhubungan	Level keselamatan transportasi
4	Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PANRB	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran	Tingkat Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran
				Meningkatnya kualitas rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta regulasi	Tingkat pemanfaatan rekomendasi kebijakan
					Persentase regulasi yang terimplementasi

NO	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
				Terwujudnya pengawasan dan pengendalian intern yang memberikan nilai tambah	Rata-rata indeks opini BPK atas Laporan Kementerian Perhubungan Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Persentasi Rekomendasi hasil audit kinerja ITJEN yang ditindaklanjuti
				Meningkatnya ASN Kementerian Perhubungan yang kompeten dan berintegritas	Tingkat pemenuhan ASN Perhubungan yang kompeten dan berintegritas
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perhubungan yang baik	Nilai RB Kementerian Perhubungan Reputasi Kementerian Perhubungan
5	Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim	Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi	Tingkat penggunaan Teknologi Transportasi yang ramah lingkungan	Meningkatnya pemanfaatan inovasi terapan Bidang Perhubungan	Tingkat Pemanfaatan Inovasi Terapan di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti Penerapan teknologi transportasi berbasis ramah lingkungan



Gambar 2.2 Peta Strategi Kementerian Perhubungan 2020-2024
 Sumber: Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 (PM No. 80 Tahun 2020)

2.3 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dituangkan dalam dokumen ini merupakan saduran dari Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 (Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.936/DJPL/2020 tentang Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024).

2.3.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024

Dengan mengacu kepada visi Presiden 2020-2024 serta visi dari Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka ditetapkan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020–2024 adalah:

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”

Adapun masing-masing kata kunci dalam visi Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024 tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- a) **Andal:** diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi laut yang baik dan dapat memberi kepercayaan masyarakat sehingga memberi kepuasan public.
- b) **Professional:** diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi laut yang memiliki karakter sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dengan kesungguhan, sesuai kompetensi yang dimiliki dan tanggung jawab yang diberikan.
- c) **Inovatif:** diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi laut yang didukung oleh SDM yang selalu berusaha melakukan perbaikan atas proses kerja yang tidak sesuai dengan sistem operasional prosedur kerja, Mempelajari, memahami dan mengikuti proses bisnis kerja yang telah ditetapkan.
- d) **Integritas:** diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi laut yang jujur, dapat dipercaya, berkarakter dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional di segala bidang, baik sosial dan budaya, ekonomi dan lingkungan, ideologi dan politik, serta pertahanan dan keamanan, secara berkesinambungan, berkelanjutan.

2.3.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024, sebagai perwujudan upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Misi 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Misi 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan dan misi 9 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan uraian adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 2) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas transportasi laut;
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan transportasi laut; dan
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2.3.3 Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024

a. Hirarki Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran (berikut dengan indikator kinerja) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 berbasis pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) (seperti yang digunakan pada level Kementerian Perhubungan), yang terdiri dari 4 perspektif, yakni:

- *Stakeholders Perspective* (SP), yang merepresentasikan pencapaian sasaran dampak/manfaat (*impact/benefit*) yang diinginkan oleh pemangku kepentingan (utamanya adalah publik yang dimandatkan kepada Pemerintah) dari program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dalam konteks transportasi sebagai kebutuhan turunan (*derived demand*), maka dampak/manfaat yang diharapkan adalah dukungannya (dalam bentuk konektivitas transportasi yang efektif dan efisien) terhadap semua sektor pembangunan nasional (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan);
- *Customer Perspective* (CP), yang menggambarkan pencapaian sasaran hasil (*outcome*) berupa layanan transportasi laut pada tingkat yang dibutuhkan pengguna (*user*) dalam hal ketersediaan (*existence/accessibility and capacity*), pelayanan (*time, cost, quality, punctuality, etc*), serta keselamatan dan keamanan (*safety and security*), termasuk pelaksanaan madat dari UU 17/2008 tentang Pelayaran dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan maritim (*maritime environment protection*). Kualitas layanan transportasi laut yang baik akan menjadi penentu efisiensi dan efektivitas dari capaian manfaat/dampak yang diinginkan pada level *Stakeholders Perspective* (SP);
- *Internal Business Perspective* (IBP), yang mewakili mengenai bagaimana proses kerja (*business process*) yang dilakukan oleh unit kerja/jajaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dalam rangka memberikan layanan transportasi laut yang sesuai harapan/kebutuhan pengguna (*customer perspective/CP*) dan berdampak baik dalam mendukung sektor-sektor pembangunan nasional lainnya (*stakeholders perspective/SP*). Proses kerja ini tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Ditjen Perhubungan Laut sesuai pasal 262 dan pasal 263

PM 122 Tahun 2018, dimana cakupannya setidaknya terdiri dari (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) penyusunan NSPK (regulasi), (3) bimtek dan supervisi, (4) evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi laut (angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut).

Secara teoretik, dalam teori manajemen kinerja, IBP menggambarkan tentang bagaimana fungsi manajemen (*POAC = planning, organizing, actuating, and controlling*) dilakukan oleh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dalam mengelola dan menyelenggarakan bidang transportasi laut.

- *Learning and Growth Perspective (LGP)*, yang menerangkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Laut untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan modal dasar (*basic capital*) organisasi agar dapat menjalankan bisnis proses (tugas dan fungsi) secara paripurna. Mengacu pada teori manajemen kinerja, modal dasar suatu organisasi untuk melaksanakan bisnis (tugas dan fungsinya) disebut sebagai sarana manajemen 5M1I (*Man, Money, Machine, Method, Material, and Information*).

Dengan memperhatikan konsep *Balanced Scorecard (BSC)* dan prinsip manajemen kinerja tersebut di atas, maka struktur peta strategi Ditjen Perhubungan Laut disampaikan pada **Gambar 2.3**. Dalam hal ini sesuai dengan nomenklatur tujuan, sasaran, dan indikator kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diatur dalam PM No 45 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka dalam **Gambar 2.3** tersebut digunakan beberapa istilah berikut:

- Tujuan Strategis (TS) yakni tujuan sebagai penjabaran Visi K/L yang dilengkapi dengan rencana sasaran nasional/Sasaran Strategis (SS) yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional). Dalam hal ini, TS (Tujuan Strategis) merupakan tujuan untuk *Stakeholders Perspectives/SP* yang menjadi *concern* dari Presiden dan yang ditugaskan kepada Menteri untuk melaksanakannya.
- Tujuan Program (TP), yakni tujuan sebagai penjabaran dari Visi Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) yang dilengkapi dengan Sasaran Program (SP) yang hendak dicapai dalam rangka menyediakan pelayanan publik (*outcome*), dalam hal ini pelayanan transportasi laut. TP (Tujuan Program) merupakan tujuan pada level *Customer Perspectives/CP* yang menjadi *concern* dari Menteri dan ditugaskan kepada Direktur Jenderal untuk melaksanakannya.
- Tujuan Kegiatan (TK), yakni tujuan sebagai penjabaran dari Visi Unit Eselon II/UPT yang dilengkapi dengan Sasaran Kegiatan (SK) berupa keluaran kegiatan (*output*) ataupun pemanfaatannya (*outcome*) yang hendak dicapai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. TK (Tujuan Kegiatan) merupakan tujuan untuk *Internal Business Perspectives/IBP* (yang sifatnya teknis) dan *Learning and Growth Perspectives/LGP* (yang sifatnya administratif) yang menjadi *concern* dari Direktur Jenderal dan ditugaskan

kepada para Direktur/Kepala UPT/Sekretaris Direktorat Jenderal untuk melaksanakannya.

b. Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024

Dalam hal ini, sesuai dengan hirarki dari tujuan dan sasaran pada butir a diatas, maka ditetapkan tujuan penyelenggaraan transportasi laut, sebagai representasi dari visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan (2020-2024), yakni sebagai berikut:

TS Meningkatkan dukungan transportasi laut terhadap pencapaian sasaran pembangunan transportasi nasional

TP Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional

TK.1 Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Teknis di Bidang Transportasi Laut

TK.2 Meningkatkan dukungan sumber daya, regulasi dan sistem birokrasi dalam penyelenggaraan transportasi laut

Secara terstruktur, TS dan TP adalah gambaran tentang tujuan yang akan dicapai dari M.1 (misi pertama, eksternal, lihat **Bagian 2.3.2**) berupa tujuan kinerja dan dampak dari penyelenggaraan transportasi laut yang diharapkan (pada level *Stakeholders Perspectives/SP* (TS) dan *Customers Perspectives/CP* (TP)). Selanjutnya, TK.1 dan TK.2 merupakan tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan misi M.2 (misi internal) berupa tujuan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (yakni TK.1 pada level *Internal Business Perspectives/IBP*) dan penguatan modal dasar organisasi (yakni TK.2 pada level *Learning and Growth Perspectives/LGP*).

c. Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024

Sasaran merupakan representasi terukur dari tujuan yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan (2020-2024). Adapun sasaran yang ditetapkan untuk program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut berikut dengan kegiatan-kegiatan di dalamnya yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selama periode 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis (SS)

SS.1 Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional

SS.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

SS.3 Meningkatnya Keselamatan Perhubungan

Sasaran Program (SP)

SP.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut

SP.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut

SP.3 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut

SP.4 Meningkatnya Kinerja Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut

Sasaran Kegiatan (SK)

SK.1 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Kepelabuhanan

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Kepelabuhanan

SK.3 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Perkapalan dan Kepelautan

SK.4 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Kenavigasian

SK.5 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai

SK.6 Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

Sasaran Strategis (SS) yang terdiri dari SS1, SS2 dan SS3 (sama persis dengan SS pada level Kementerian di **Bagian 2.2.3**) merupakan sasaran untuk Tujuan Strategis (TS), yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari Unit Kerja Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya, Sasaran Program (SP) yang terdiri dari SP1, SP2, SP3 dan SP4 merupakan sasaran untuk Tujuan Program (TP), dalam hal ini adalah Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari Unit Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun SK (Sasaran Kegiatan) merupakan sasaran untuk Tujuan Kegiatan (TK) yang terdiri dari SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, dan SK6 yang masing-masing mewakili sasaran untuk setiap kegiatan yang tercakup dalam program pembangunan dan penyelenggaraan transportasi laut, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari Unit Kerja Eselon II Pusat dan UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.

d. Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2025

Indikator Kinerja (IK) adalah ukuran capaian kinerja dari sasaran. Adapun nomenklatur indikator kinerja yang digunakan sasaran tersebut diatas sesuai dengan PM No 45 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, terdiri dari:

- Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) atau sering juga disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representasi terukur dari Sasaran Strategis (SS). Secara hirarki target capaian IKSS merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan karena terkait dengan capaian sasaran prioritas Presiden.
- Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP) sebagai representasi terukur dari Sasaran Program (SP). Secara hirarki target capaian IKP merupakan

tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diberikan kewenangan untuk menjalankan Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.

- Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) sebagai representasi terukur dari Sasaran Kegiatan (SK). Secara hirarki target capaian IKK merupakan tanggung jawab dari Unit Eselon II/UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di mana masing-masing merupakan pelaksana kegiatan yang tercakup di dalam Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.

Adapun susunan dan rumusan tentang indikator kinerja program (IKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut disampaikan pada **Tabel 2.4**.



Gambar 2.3 Peta Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 Sumber: SK Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.936/DJPL/2020

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	BASELINE 2018
TP Meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi laut	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1 Indeks konektivitas transportasi laut nasional	Jumlah <i>ship call</i> dari rute pelayaran tetap dan teratur dalam negeri (penumpang/barang komersil/perintis) dibandingkan jumlah pelabuhan yang telah terbangun sesuai RIPN, termasuk yang menghubungkan kawasan prioritas (KEK, KSPN, KI) dan DTPK/3TP	764 ship call/ pelabuhan (average)
		IKP2 Peningkatan <i>shipping connectivity</i> (internasional)	Diukur oleh UNCTAD	47,76
		IKP3 Rute pelayaran yang saling terhubung (loop)	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop dibandingkan dengan jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner)	%
	SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP4 Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	Persentase pelabuhan utama dan pengumpul yang telah mencapai target kinerja yang ditetapkan (WT, AT, ET/BT)	80%
	SP3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP5 Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	Jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut per tahun dibandingkan jumlah SPB yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut	1,27 per 10.000 pelayaran
		IKP6 Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	Persentase penurunan kejadian gangguan keamanan transportasi laut (di atas kapal dan di pelabuhan, terhadap wilayah pelabuhan, kapal, penumpang, barang) per tahun dibandingkan baseline 2019	5 kejadian/ tahun
		IKP7 Tingkat kehandalan Kenavigasian	Tingkat kehandalan SBNP ditambah dengan tingkat kehandalan Telkompel dibagi dua	%
	SP4 Meningkatnya kinerja pencegahan	IKP8 Rasio kapal penumpang dan barang yang memiliki	Jumlah kapal penumpang dan barang yang memiliki sertifikat MARPOL, AFS, BWM,	0,495

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	BASELINE 2018
	dan penanggulangan pencemaran laut	sertifikat MARPOL, AFS, BWM, CLC	CLC dibandingkan dengan total jumlah kapal terdaftar	
		IKP9 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Jumlah sertifikat IAPP yang diterbitkan setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kapal yang kapasitasnya lebih dari 400 GT	
		IKP10 Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di Pelabuhan	Persentase kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal yang berhasil ditanggulangi	100 %

2.4 VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK

2.4.2 Visi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024

Dengan mengacu kepada visi Presiden 2024-2024, visi Kementerian Perhubungan 2024-2024, serta visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka visi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah melaksanakan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam menunjang pelayanan Kementerian Perhubungan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”

2.4.3 Misi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024, sebagai perwujudan upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan **Misi 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Misi 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan dan Misi 9 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, dengan uraian adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 2) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas transportasi laut;
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan transportasi laut; dan
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasaranan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2.4.4 Tujuan dan Sasaran Program Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024

a. Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024

Secara struktural, sebagaimana dijelaskan pada **Bagian 2.3.3**, maka perumusan tujuan dan sasaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok merupakan bagian dari tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dengan demikian, maka Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok tidak memiliki tujuan tersendiri, karena merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara keseluruhan. Namun Tujuan Program Kantor Otoritas

Pelabuhan Utama Tanjung Priok dapat dijabarkan lebih spesifik untuk menunjang Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya di Bidang Kepelabuhanan dan Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut sebagai berikut:

TS Meningkatkan dukungan Penyelenggaraan Kepelabuhanan dan Lalu Lintas Angkutan Laut sebagai bagian dari dukungan transportasi laut terhadap pencapaian sasaran pembangunan transportasi nasional

TP Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Kepelabuhanan, Lalu Lintas Angkutan Laut, Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional.

TK.1 Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Teknis di Bidang Transportasi Laut khususnya Kegiatan Teknis Bidang Kepelabuhanan

TK.2 Meningkatkan dukungan Sumber Daya, Regulasi dan Sistem Birokrasi dalam Penyelenggaraan Kepelabuhanan dan Transportasi Laut

Secara terstruktur, TS dan TP adalah gambaran tentang tujuan yang akan dicapai dari M.1 (misi pertama, eksternal, lihat **Bagian 2.3.2**) berupa tujuan kinerja dan dampak dari penyelenggaraan transportasi laut yang diharapkan (pada level *Stakeholders Perspectives/SP* (TS) dan *Customers Perspectives/CP* (TP)). Selanjutnya, TK.1 dan TK.2 merupakan tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan misi M.2 (misi internal) berupa tujuan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (yakni TK.1 pada level *Internal Business Perspectives/IBP*) dan penguatan modal dasar organisasi (yakni TK.2 pada level *Learning and Growth Perspectives/LGP*).

b. Sasaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024

Sasaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok secara umum berada pada level Sasaran Kegiatan (SK) sesuai dengan jenis/nomenklatur kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok berlandaskan pada tugas dan fungsi yang diembankan, yakni:

- a. Kegiatan program infrastruktur konektivitas transportasi laut bidang kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut;
- b. Kegiatan program dukungan manajemen.

Sasaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ditetapkan berdasarkan hasil penurunan (*cascading*) serta hasil analisis tugas pokok dan fungsinya **Gambar 2.4**. Dalam hal ini, sesuai dengan susunan sasaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada **Bagian 2.3.3 butir c**, sasaran yang berkaitan dengan kegiatan serta tugas dan fungsi dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok adalah:

Sasaran Strategis (SS)

SS.1 Terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi nasional

SS.2 Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan

SS.3 Meningkatnya keselamatan perhubungan

Sasaran Program (SP)

SP.1 Meningkatnya konektivitas transportasi laut

SP.2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut

SP.3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut

SP.4 Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran di laut

Sasaran Kegiatan (SK)

SK.1 Terwujudnya SDM OP Utama yang Kompeten dan Profesional

SK.2 Terwujudnya *good governance* dan *clean government* di OP Utama

SK.3 Terkelolanya anggaran Kemenhub secara optimal di OP Utama

SK.4 Terwujudnya system digitalisasi informasi yang terintegrasi dengan ekosistem logistik nasional

SK.5 Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan

SK.6 Meningkatnya penyediaan fasilitas pelabuhan serta sarana pelayanan lainnya sesuai yang ditetapkan dalam masterplan pelabuhan, baik yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan maupun badan usaha pelabuhan

SK.7 Meningkatnya penjaminan keselamatan kerja di pelabuhan

SK.8 Meningkatnya penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan dalam rangka mewujudkan pelabuhan tanjung priok menjadi pelabuhan greenport/ecoport

SK.9 Meningkatnya kinerja operasional pelabuhan dalam rangka pemenuhan standar kinerja yang ditetapkan

SK.10 Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Pelabuhan

SK.11 Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan laut oleh Kantor Otoritas Pelabuhan

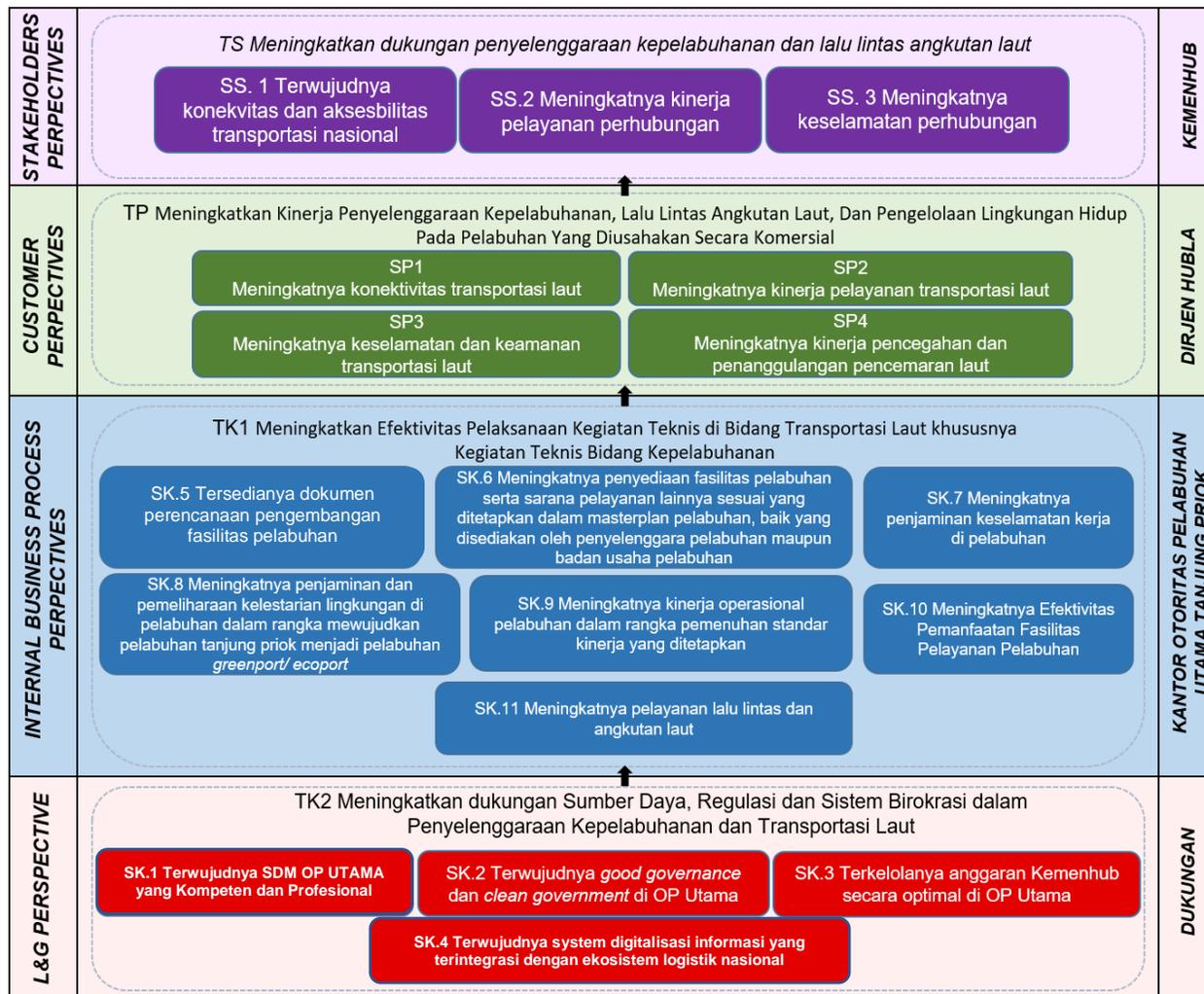
SS dan SP merupakan sasaran strategis dan sasaran program di level/tingkat Kementerian dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dalam Sasaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, SS dan SP tetap dimasukkan sebagai gambaran mengenai dukungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terhadap pencapaian sasaran pada level yang lebih tinggi. Adapun sasaran di tingkat

eselon II/UPT yang menjadi tanggung jawab Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sesuai dengan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan adalah SK.1, SK.2 dan SK.6. Adapun susunan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok disampaikan pada **Tabel 2.5**.

c. Indikator Kinerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024

Indikator Kinerja (IK) adalah ukuran capaian kinerja dari sasaran. Adapun nomenklatur indikator kinerja yang digunakan sasaran tersebut diatas sesuai dengan PM No. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dijelaskan dalam Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2025 pada Subbab 2.3.3 diatas.

Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dijabarkan dalam **Tabel 2.5** dibawah ini.



Gambar 2.4 Peta Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Tabel 2.5 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RUMUSAN
	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan transportasi laut	Terwujudnya Kinerja Dukungan Manajemen dan Teknis di Lingkungan Otoritas Pelabuhan Utama	Persentase Pegawai yang kompeten dan profesional	SK.1 Terwujudnya SDM OP Utama yang Kompeten dan Profesional	IKK. 1	Prosentase SDM yang memenuhi persyaratan jabatan (pangkat dan golongan, diklat umum dan teknis untuk setiap jabatan fungsional)	%	Indikatornya adalah persentase jumlah pegawai yang telah melakukan diklat dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai. Rumus: - Jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi kurang dari 50 orang = 50% - Jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi 50 sampai dengan 80 = 75% - Jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi di atas 80 orang = 100%
Nilai persepsi publik terkait <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di OP Utama				SK.2 Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di OP Utama	IKK. 2	Nilai Persepsi Publik terhadap pelayanan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok			
						- Indeks persepsi korupsi - Unit pengendali gratifikasi	nilai %	nilai skala 4, didapatkan dari hasil survey terhadap pengguna jasa Indikatornya adalah tidak adanya laporan gratifikasi berdasarkan laporan Unit Pengendali Gratifikasi Kantor OP Utama Tanjung Priok yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rumus: - Tidak ada laporan gratifikasi = 100% - 1 - 5 = 75% - Lebih dari 5 = 50%	

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RUMUSAN
				Persentase optimalisasi pengelolaan anggaran di OP Utama	SK.3 Terkelolanya anggaran Kemenhub secara optimal di OP Utama	IKK. 3	Prosentase penyerapan anggaran OP Utama	%	Indikator Prosentase penyerapan anggaran OP Utama adalah persentase perbandingan nilai penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan dengan total nilai anggaran yang diperoleh Otoritas Pelabuhan. Rumus: $\% = (\text{nilai penyerapan anggaran (Rp)} / \text{total nilai anggaran yang diperoleh (Rp)}) \times 100\%$
			IKK. 4			Persentase Pengelolaan BMN	%	Indikatornya adalah persentase pengelolaan BMN yang meliputi Proses pengadaan, proses pencatatan dan utilisasi atas semua BMN. Rumus: - Pemenuhan proses pengadaan = 30% - Pemenuhan proses pencatatan = 30% - Pemenuhan utilisasi = 40%	
			IKK. 5			Persentase pencapaian target PNBP	%	Indikator Pencapaian Target PNBP adalah persentase perbandingan nilai realisasi PNBP dengan target PNBP yang telah ditetapkan. Rumus: $\% = (\text{Nilai realisasi PNBP (Rp)} / \text{target PNBP (Rp)}) \times 100\%$	
				Persentase Kehandalan system informasi di Pelabuhan	SK.4 Terwujudnya system digitalisasi informasi yang	IKK. 6	Tingkat kehandalan system informasi di pelabuhan	%	disebutkan jumlah system informasi digital dan dilakukan penilaian kehandalan untuk masing-masing system digital tiap terminal. Rumusan:

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RUMUSAN
					terintegrasi dengan ekosistem logistik nasional				Rata-rata nilai persentase kehandalan dari seluruh system digital
				Nilai Persepsi Publik terkait pelayanan informasi di OP Utama		IKK. 7	Nilai Persepsi publik terkait pelayanan informasi di OP Utama	Nilai	Indikator Persepsi publik terkait pelayanan informasi di OP Utama adalah penilaian kepuasan masyarakat/pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan OP. Rumus: Survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Permen Pan No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
			Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Otoritas Pelabuhan Utama	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pengembangan pelabuhan	SK.5 Terwujudnya dokumen perencanaan pengembangan fasilitas pelabuhan	IKK. 8	Terwujudnya dokumen dan penetapan rencana induk pelabuhan dan DLKr DLkp		
							- Terwujudnya dokumen dan penetapan Rencana Induk Pelabuhan	%	Indikator Kinerja adalah terselesainya penyusunan dokumen sesuai dengan petunjuk teknis, diterbitkannya rekomendasi dari pemerintah daerah, sampai dengan penetapan oleh menteri perhubungan Persentase pencapaian: - Tersusunnya dokumen= 30% - Diterbitkan rekomendasi dari seluruh pemda terkait secara lengkap=70% - Ditetapkan oleh menteri =100%
							- Terwujudnya dokumen dan penetapan DLKr dan DLkp.	%	Indikator Kinerja adalah terselesainya penyusunan dokumen sesuai dengan petunjuk teknis, diterbitkannya rekomendasi

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RUMUSAN
									dari pemerintah daerah, sampai dengan penetapan oleh menteri perhubungan Persentase pencapaian: - Tersusunnya dokumen= 30% - Diterbitkan rekomendasi dari seluruh pemda terkait secara lengkap=70% - Ditetapkan oleh menteri =100%
						IKK. 9	Terwujudnya dokumen rencana, program, serta desain, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengoperasian fasilitas pelabuhan	%	Indikatornya adalah persentase penyelesaian dokumen rencana, program, serta desain terkait pembangunan dan pemeliharaan, serta pengoperasian fasilitas pelabuhan sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Ditjen Perhubungan Laut dan Kerangka Acuan Kerja Rumus: Ditetapkan jumlah dokumen perencanaan = (contoh 4 dokumen perencanaan) Persentase capaian: - Dokumen 1 terselesaikan dengan baik = 25% - Dokumen 2 terselesaikan dengan baik = 25% - Dokumen 3 terselesaikan dengan baik = 25% - Dokumen 4 terselesaikan dengan baik = 25%
				Persentase penyediaan	SK.6 Meningkatnya	IKK. 10	Persentase fasilitas daratan (terminal,	%	Indikator Kinerja fasilitas daratan yang disediakan sesuai dengan Masterplan

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN	
				fasilitas pelabuhan dan sarana pelayanan sesuai dengan perencanaan	penyediaan fasilitas pelabuhan serta sarana pelayanan lainnya sesuai yang ditetapkan dalam masterplan pelabuhan, baik yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan maupun badan usaha pelabuhan	gudang, bunker, perkantoran, jaringan jalan, dan prasarana pendukung lainnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan		<p>Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan adalah persentase perbandingan antara jumlah fasilitas daratan yang telah tersedia oleh Penyelenggara Pelabuhan/BUP dengan jumlah fasilitas daratan sesuai dengan Masterplan/RIP dalam satu priode</p> <p>Rumus: $\% = \frac{\text{Jumlah fasilitas daratan yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas daratan sesuai RIP}} \times 100\%$</p>	
						IKK. 11	Persentase fasilitas perairan (penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, SBNP, dermaga, dan prasarana pendukung lainnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan	%	<p>Indikator Kinerja fasilitas perairan yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan adalah persentase perbandingan antara jumlah fasilitas perairan yang telah tersedia oleh Penyelenggara Pelabuhan/BUP dengan jumlah fasilitas perairan sesuai dengan Masterplan/RIP dalam satu priode</p> <p>Rumus: $\% = \frac{\text{Jumlah fasilitas perairan yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas perairan sesuai RIP}} \times 100\%$</p>
						IKK. 12	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM, sarana bantu dan prasarana pemanduan		<p>Indikator Kinerja adalah persentase pemenuhan kebutuhan SDM, sarana bantu dan prasarana pemanduan</p> <p>Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal</p>
						- SDM pemanduan	%	Rumus:	

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN	
								$\% = \frac{A}{B} \times 100 \%$ A = Jumlah SDM pandu yang tersedia B = Jumlah kebutuhan SDM pandu	
						- Sarana bantu pemanduan	%	Rumus: $\% = \frac{A}{B} \times 100 \%$ A = Jumlah Sarana Bantu pemanduan yang tersedia B = Jumlah kebutuhan Sarana Bantu pemanduan	
						- Prasarana pemanduan	%	Rumus: $\% = \frac{A}{B} \times 100 \%$ A = Jumlah Prasarana pemanduan yang tersedia B = Jumlah kebutuhan Prasarana pemanduan	
						IKK. 13	Tingkat kesiapan peralatan pelabuhan		Indikator Kinerja Tingkat kesiapan peralatan pelabuhan adalah perbandingan jumlah waktu siap operasi (<i>Available Time</i>) dengan waktu tersedia (<i>Possible Time</i>) yang dinyatakan dalam persentase (%) Rumus: $\text{Availability} = \frac{\text{Waktu Siap Operasi (Available Time)}}{\text{Waktu Tersedia (Possible Time)}}$
							- JICT (TPK)	%	
							- KOJA (TPK)	%	
							- IKT (Car Terminal)	%	
							- Terminal MAL	%	
							- IPC TPK Area I	%	
							- IPC TPK Area II	%	
							- PTP Wilayah I	%	
							- PTP Wilayah II	%	
							- NPCT1	%	
				Meningkatkan penjaminan	SK.7 Meningkatnya penjaminan	IKK. 14	Tingkat pemenuhan standarisasi peralatan di pelabuhan		Indikator Kinerja adalah persentase jumlah peralatan yang memenuhi persyaratan standarisasi peralatan

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN
				keselamatan kerja di pelabuhan	keselamatan kerja di pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> - JICT (TPK) - KOJA (TPK) - IKT (Car Terminal) - Terminal MAL - IPC TPK - PTP - NPCT1 	%	<p>dibuktikan dengan sertifikat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (sertifikat laik pakai dan sertifikat operator), dalam satuan persentase (%)</p> <p>Rumus: $\% = (\text{Jumlah peralatan yang telah mendapatkan sertifikat dari Ditjen Perhubungan Laut} / \text{jumlah peralatan yang tersedia}) \times 100\%$</p> <p>Sumber: Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan NO. PP.72/3/9-99 dan KEP.507/BW/1999 tentang Pemeriksaan dan Pengujian terhadap pesawat angkat dan angkut, pesawat uap dan bejana tekan yang berada di kapal dan di pelabuhan</p>
				Meningkatkan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di Pelabuhan	SK.8 Meningkatnya penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan dalam rangka mewujudkan pelabuhan tanjung priok menjadi pelabuhan	IKK. 15	Tercapainya kualitas lingkungan sesuai baku mutu yang ditetapkan.	<p>Indikatornya adalah persentase pemenuhan parameter baku mutu dari semua titik pemantauan di bandingkan dengan jumlah titik pemantauan dan jumlah parameter baku mutu</p> <p>Rumusan: $\frac{A}{(B \times C)} \times 100\%$ Ket: A= Jumlah pemenuhan parameter baku mutu dari semua titik pemantauan B= jumlah titik pemantauan C=jumlah parameter baku mutu</p>
						- Indeks Baku mutu Udara	%	

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN
					<i>greenport/ecoport</i>	- Indeks Baku mutu Air	%	Rumusan: $\frac{A}{(B \times C)} \times 100\%$ Ket: A= Jumlah pemenuhan parameter baku mutu dari semua titik pemantauan B= jumlah titik pemantauan C=jumlah parameter baku mutu
						- Indeks Baku mutu kebisingan	%	Rumusan: $\frac{A}{(B \times C)} \times 100\%$ Ket: A= Jumlah pemenuhan parameter baku mutu dari semua titik pemantauan B= jumlah titik pemantauan C=jumlah parameter baku mutu
						IKK. 16 Tingkat pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities	%	Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities adalah persentase pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities sesuai dengan peraturan lingkungan hidup Rumus: % = (kondisi lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities / persyaratan lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities sesuai dengan peraturan lingkungan hidup) x 100%

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN	
						IKK. 17	Tingkat penggunaan reception facilities di pelabuhan	%	Indikator Kinerja penggunaan reception facilities di pelabuhan adalah persentase pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities sesuai dengan peraturan lingkungan hidup Rumus: $\% = \frac{A}{(B)} \times 100\%$ A= Jumlah kapal yang tercatat membuang limbah ke RF Pelabuhan Tanjung Priok B= jumlah kunjungan kapal (data inaportnet)
			Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Otoritas Pelabuhan Utama	Kinerja Operasional Pelabuhan sesuai Standar Kinerja yang ditetapkan	SK.9 Meningkatnya kinerja operasional pelabuhan dalam rangka pemenuhan standar kinerja yang ditetapkan	IKK.18	Waiting Time - JICT (TPK) - KOJA (TPK) - IKT (Car Terminal) - Terminal MAL - IPC TPK - PTP - NPCT1 (Terminal Kalibaru)	Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam	Indikator <i>waiting time</i> adalah waktu pelayanan pandu yang didapatkan dari perhitungan selisih waktu antara waktu penetapan kapal masuk dengan pandu naik ke atas kapal (<i>pilot on board/POB</i>) pada pelayanan kapal masuk. Rumus: Waiting Time (WT) = Waktu Pelayanan (<i>pilot on board/POB</i>) – Waktu Penetapan Pelayanan Masuk Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan
						IKK.19	Approaching-Time - JICT (TPK) - KOJA (TPK)	Jam Jam	Indikator <i>Approach Time</i> adalah waktu pelayanan kapal dari lokasi labuh sampai menuju tambatan. Untuk kapal

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN
						- IKT (Car Terminal) - Terminal MAL - IPC TPK - PTP - NPCT1	Jam Jam Jam Jam Jam	<p>masuk dihitung saat kapal mulai bergerak dari lokasi lego jangkar sampai ikat tali di tambatan (<i>first line</i>) dan untuk kapal keluar dihitung mulai lepas tali (<i>last line</i>) sampai dengan kapal mencapai ambang luar.</p> <p>Rumus: $Approach\ Time\ (AT) = (\text{kapal mulai bergerak s.d ikat tali}) + (\text{lepas tali s.d pandu turun})$</p> <p>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan</p>
						IKK.20 Efektif Time : Berthing Time - JICT (TPK) - KOJA (TPK) - IKT (Car Terminal) - Terminal MAL - IPC TPK Area I TPK 009 - IPC TPK Area I TPK Konvensional - IPC TPK Area II Konvensional - IPC TPK Area II TPK - PTP Wilayah I - PTP Wilayah II Dalam Negeri - PTP Wilayah II Luar Negeri	% % % % % % % % % %	<p>Indikator <i>Efektif Time : Berthing Time</i> adalah perbandingan waktu bekerja efektif (<i>Effective Time/ET</i>) dengan waktu kapal selama di tambatan (<i>Berthing Time/BT</i>)</p> <p>Rumus:</p> $ET/BT = \frac{Effective\ Time\ (ET)}{Berthing\ Time\ (BT)}$ <p>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan</p>

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN
					SK.10 Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Pelabuhan	- NPCT1	%	Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional General Cargo Adalah jumlah ton barang General Cargo yang di bongkar/muat dalam satu jam kerja oleh tiap Gang buruh (TKBM) atau alat bongkar muat Rumus: $T/G/H = \frac{\text{Jumlah barang yang dibongkar/muat (Ton)}}{\text{Jumlah jam efektif (ET)} \times \text{Jumlah Gang Kerja}}$ Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan
				IKK.21		Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional General Cargo		
						- PTP Wilayah I	(T/G/J)	
						- PTP Wilayah II Dalam Negeri	(T/G/J)	
						- PTP Wilayah II Luar Negeri	(T/G/J)	
				IKK.22		Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Bag Cargo		
						- PTP Wilayah I	(T/G/J)	
						- PTP Wilayah II Dalam Negeri	(T/G/J)	
						- PTP Wilayah II Luar Negeri	(T/G/J)	
				IKK.23	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal		Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada Car Terminal adalah jumlah Kendaraan yang	

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN
						multipurpose / konvensional Un Caries - IKT (Car Terminal) - PTP Wilayah I - PTP Wilayah II Dalam Negeri	(U/S/ H) (T/G/ J) (T/G/ J)	dibongkar/muat perkapal dalam 1 (satu) jam selama kapal bertambat Rumus: $U/S/H = \frac{\text{Jumlah Kendaraan yang dibongkar/muat (Unit)}}{\text{Waktu Tambat}}$ Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Uncarries Adalah jumlah ton barang Uncarries yang di bongkar/muat dalam satu jam kerja oleh tiap Gang buruh (TKBM) atau alat bongkar muat Rumus: $T/G/H = \frac{\text{Jumlah barang yang dibongkar/muat (Ton)}}{\text{Jumlah jam efektif (ET) x Jumlah Gang Kerja}}$ Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan
						IKK.24 Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Cair - PTP Wilayah I - PTP Wilayah II Dalam Negeri - PTP Wilayah II Luar Negeri	(T/G/ J) (T/G/ J) (T/G/ J)	Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Cair Adalah jumlah ton barang Curah Cair yang di bongkar/muat dalam satu jam kerja oleh tiap Gang buruh (TKBM) atau alat bongkar muat Rumus: $T/G/H = \frac{\text{Jumlah barang yang dibongkar/muat (Ton)}}{\text{Jumlah jam efektif (ET) x Jumlah Gang Kerja}}$ Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN	
								HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	
						IKK.25	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Kering		Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Kering Adalah jumlah ton barang dalam satu jam kerja oleh tiap Gang buruh (TKBM) atau alat bongkar muat
						- PTP Wilayah I	(T/J)	Rumus: $T/G/H = \frac{\text{Jumlah barang yang dibongkar/muat (Ton)}}{\text{Jumlah jam efektif (ET) x Jumlah Gang Kerja}}$ Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	
					- PTP Wilayah II Dalam Negeri	(T/J)			
					- PTP Wilayah II Luar Negeri	(T/J)			
						IKK.26	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Livestock		Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Livestock adalah jumlah ton hewan yang di bongkar/muat dalam satu jam kerja oleh tiap Gang buruh (TKBM) atau alat bongkar muat
						- PTP Wilayah II Luar Negeri	(H/G/J)	Rumus : $H/G/J = \frac{\text{Jumlah hewan yang dibongkar/muat (H)}}{\text{Jumlah Efektif (ET) x Jumlah Gang Kerja}}$ Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN	
						IKK.27	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Un Carries Alat Berat		<p>Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Un Carries Alat Berat adalah jumlah Alat Berat yang dibongkar/muat perkapal dalam 1 (satu) jam selama kapal bertambat</p> <p>Rumus:</p> $U/S/H = \frac{\text{Jumlah Alat Berat yang dibongkar/muat (Unit)}}{\text{Waktu Tambat}}$ <p>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan</p>
						- PTP Wilayah I	(U/S/H)		
						- IKT (Car Terminal)	(U/S/H)		
						IKK.28	Kinerja bongkar muat barang Petikemas		<p>Indikator Kinerja bongkar muat barang Petikemas adalah jumlah Petikemas yang dibongkar/muat tiap crane (Container Crane, Ships Crane, Shore Crane)</p> <p>Rumus:</p> $B/C/H = \frac{\text{Jumlah Petikemas yang dibongkar/muat}}{\text{Jumlah jam efektif (ET) x Jumlah Crane}}$ <p>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan</p>
						- JICT (TPK)	(B/C/H)		
						- KOJA (TPK)	(B/C/H)		
						- Terminal MAL	(B/C/H)		
						- IPC TPK Area I TPK 009	(B/C/H)		
						- IPC TPK Area I TPK Konvensional	(B/C/H)		
						- IPC TPK Area II Konvensional	(B/C/H)		
						- IPC TPK Area II TPK	(B/C/H)		
						- PTP Wilayah I	(B/C/H)		

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN
						- PTP Wilayah II	(B/C/H)	
						- NPCT 1	(B/C/H)	
						IKK.29 Rata-rata receiving peti kemas		Indikator Kinerja receiving peti kemas adalah kecepatan pelayanan penerimaan di Terminal petikemas yang dihitung sejak alat angkut masuk hingga keluar yang dicatat di pintu masuk dengan satuan menit Rumus: Waktu penerimaan di Terminal petikemas yang dihitung sejak alat angkut masuk hingga keluar yang dicatat di pintu masuk dengan satuan menit Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.002/38/13/18/DJPL-11 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan
						- JICT (TPK)	Menit	
						- KOJA (TPK)	Menit	
						- Terminal MAL	Menit	
						- IPC TPK Area I	Menit	
						- IPC TPK Area II	Menit	
						- NPCT 1	Menit	
						IKK.30 Rata – rata delivery peti kemas		Indikator Kinerja delivery peti kemas adalah kecepatan pelayanan penyerahan di Terminal petikemas yang dihitung sejak alat angkut masuk hingga keluar yang dicatat di pintu keluar dengan satuan menit Rumus: Waktu penyerahan di Terminal petikemas yang dihitung sejak alat angkut masuk hingga keluar yang dicatat di pintu keluar dengan satuan menit
						- JICT (TPK)	Menit	
						- KOJA (TPK)	Menit	
						- Terminal MAL	Menit	
						- IPC TPK Area I	Menit	
						- IPC TPK Area II	Menit	
						- NPCT 1	Menit	

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN	
								Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.002/38/13/18/DJPL-11 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	
						IKK.31	Tingkat penggunaan dermaga (BOR)		<p>Indikator Kinerja Tingkat penggunaan dermaga (BOR) adalah perbandingan antara jumlah pemakaian waktu tiap dermaga yang tersedia dengan jumlah waktu tersedia dalam satu periode (bulan/tahun) yang dinyatakan dalam presentase (%)</p> <p>Rumus:</p> $\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah Waktu Tersedia} - \text{Waktu yang Berhenti Tidak Tersedia}}{\text{Jumlah Waktu Tersedia}} \times 100\%$ <p>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan</p>
						- JICT (TPK)	%		
						- KOJA (TPK)	%		
						- IKT (Car Terminal)	%		
						- Terminal MAL	%		
						- IPC TPK Area I TPK 009	%		
						- IPC TPK Area I TPK Konvensional	%		
						- IPC TPK Area II Konvensional	%		
						- IPC TPK Area II TPK	%		
						- PTP Wilayah I	%		
						- PTP Wilayah II	%		
						- NPCT1	%		
						IKK.32	Tingkat penggunaan gudang (SOR)		<p>Indikator Kinerja Tingkat penggunaan gudang (SOR) adalah perbandingan antara jumlah pemakaian ruang penumpukan gudang yang dihitung dalam satuan ton hari atau satuan m3 hari dengan kapasitas efektif penumpukan tersedia dalam satu periode</p> <p>Rumus:</p> $\text{SOR} = \frac{\text{Jumlah Pemakaian Ruang Penumpukan}}{\text{Kapasitas Efektif Penumpukan}} \times 100\%$ <p>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:</p>
						- PTP Wilayah I	%		
						- PTP Wilayah II	%		

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN	
								HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	
						IKK.33	Tingkat penggunaan lapangan (YOR)		<p>Indikator Kinerja Tingkat penggunaan lapangan (YOR) adalah perbandingan antara jumlah pemakaian lapangan penumpukan yang dihitung dalam satuan ton/hari atau m3/hari atau TEUs/hari dengan kapasitas efektif lapangan penumpukan tersedia dalam satu priode</p> <p>Rumus:</p> $\text{IKK.33} = \frac{\text{Jumlah pemakaian lapangan penumpukan}}{\text{Kapasitas efektif lapangan penumpukan}} \times 100\%$ <p>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan</p>
							- JICT (TPK)	%	
							- KOJA (TPK)	%	
							- IKT (Car Terminal)	%	
							- Terminal MAL	%	
							- IPC TPK Area I TPK 009	%	
							- IPC TPK Area I TPK Konvensional	%	
							- IPC TPK Area II Konvensional	%	
							- IPC TPK Area II TPK	%	
							- PTP Wilayah I	%	
							- PTP Wilayah II	%	
							-NPCT1	%	
				Meningkatkan pelayanan kapal dan B/M barang yang menggunakan Inaportnet	SK.11 Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan laut	IKK.34	Persentase pelayanan kapal yang menggunakan Sistem Inaportnet	%	<p>Indikator Kinerja Persentase pelayanan kapal yang menggunakan Sistem Inaportnet adalah persentase perbandingan antara jumlah kapal yang menggunakan pelayanan Inaportnet dengan jumlah total kapal yang berkunjung dalam satu priode</p> <p>Rumus:</p> $\% = \frac{\text{Jumlah kapal melalui pelayanan Inaportnet}}{\text{Jumlah total kapal yang berkunjung}} \times 100\%$
						IKK. 35	Persentase Pelayanan kegiatan B/M barang yang menggunakan sistem Inaportnet	%	<p>Indikator Kinerja Persentase pelayanan B/M barang yang menggunakan Sistem Inaportnet adalah persentase perbandingan</p>

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN
								antara jumlah B/M barang yang menggunakan pelayanan Inaportnet dengan jumlah total barang yang B/M di Pelabuhan dalam satu priode. Rumus: % = $\frac{\text{Jumlah B/M brg melalui pelayanan Inaportnet}}{\text{Jumlah total barang yang B/M di Pelabuhan}} \times 100\%$
				Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru yang lancar, aman, nyaman dan selamat		IKK. 36 Tercapainya penyelenggaraan angkutan lebaran yang lancar, aman, nyaman dan selamat	%	Adalah indicator terlaksananya penyelenggara angkutan lebaran yang lancar (ketepatan waktu), aman (tidak ada laporan gangguan keamanan), nyaman, dan keselamatan (zero accident) Rumusan: Penilaian terdiri dari 4 aspek yaitu lancar (ketepatan waktu), aman (tidak ada laporan gangguan keamanan), nyaman, dan keselamatan (zero accident) dimana masing-masing pembobotan sebagai berikut: a) Lancar (ketepatan waktu) maksimal 25% - 25 = jumlah perjalanan tepat waktu 75-100% - 15 = jumlah perjalanan tepat waktu 35-74% - 0 = jumlah perjalanan tepat waktu 0-34% b) Aman (tidak ada gangguan keamanan) maksimal 25% - 25= jumlah laporan gangguann keamanan 0-4 - 15= jumlah laporan gangguann keamanan 5-10

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RUMUSAN
									<ul style="list-style-type: none"> - 0= jumlah laporan gangguann keamanan >10 c) Nyaman (survey kepuasan penumpang) maksimal 25% - 25= 75-100% responden puas atau nyaman - 15= 35-74% responden puas/nyaman - 0= 0-34% responden puas/nyaman d) Keselamatan (zero accident) maksimal 25% - 25= tidak ada kecelakaan - 15= ada kecelakaan, namun tidak ada korban jiwa - 0= ada kecelakaan dengan korban jiwa
						Tercapainya penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru yang lancar, aman, nyaman dan selamat	%	<p>Adalah indicator terlaksananya penyelenggara Angkutan Natal dan Tahun Baru yang lancar (ketepatan waktu), aman (tidak ada laporan ganguan keamanan), nyaman, dan keselamatan (<i>zero accident</i>)</p> <p>Rumusan:</p> <p>Penilaian terdiri dari 4 aspek yaitu lancar (ketepatan waktu), aman (tidak ada laporan ganguan keamanan), nyaman, dan keselamatan (<i>zero accident</i>) dimana masing-masing pembobotan sebagai berikut:</p> <p>a) Lancar (ketepatan waktu) maksimal 25%</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 = jumlah perjalanan tepat waktu 75-100% 	

No	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tujuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RUMUSAN
									<ul style="list-style-type: none"> - 15 = jumlah perjalanan tepat waktu 35-74% - 0 = jumlah perjalanan tepat waktu 0-34% b) Aman (tidak ada gangguan keamanan) maksimal 25% <ul style="list-style-type: none"> - 25= jumlah laporan gangguann keamanan 0-4 - 15= jumlah laporan gangguann keamanan 5-10 - 0= jumlah laporan gangguann keamanan >10 c) Nyaman (survey kepuasan penumpang) maksimal 25% <ul style="list-style-type: none"> - 25= 75-100% responden puas atau nyaman - 15= 35-74% responden puas/nyaman - 0= 0-34% responden puas/nyaman d) Keselamatan (zero accident) maksimal 25% <ul style="list-style-type: none"> - 25= tidak ada kecelakaan - 15= ada kecelakaan, namun tidak ada korban jiwa - 0= ada kecelakaan dengan korban jiwa

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS NASIONAL

Muatan tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional untuk periode 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini disadur dari RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020.

3.1.1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2020-2024

Arahan kebijakan umum pembangunan nasional untuk ke-7 agenda pembangunan nasional, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020) dirangkum pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024

No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
			<ul style="list-style-type: none"> 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	<p>Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Memperkuat moderasi beragama; dan 4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim	<p>Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	<ul style="list-style-type: none"> 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020)

3.1.2. Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 Di Bidang Transportasi Laut

Lebih spesifik, arah kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk pembangunan di bidang transportasi transportasi laut untuk mencapai sasaran dan indikator (sebagaimana telah disampaikan pada **Tabel 2.2** sebelumnya) dirangkum pada **Tabel 3.2**. Arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari Agenda ke-5 (PN) yakni Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Secara lebih spesifik untuk bidang transportasi laut, arah kebijakan dan strategi secara nasional dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan kesyahbandaran.
- 2) Penyediaan infrastruktur keselamatan dan keamanan pelayaran;
- 3) Standarisasi aspek keselamatan kapal;
- 4) Pengembangan sistem informasi penumpang dan barang (manifes) untuk mencegah muatan berlebih;
- 5) Standardisasi kinerja pada 7 pelabuhan utama (kedalaman, panjang dermaga, kinerja bongkar muat);
- 6) Pengembangan rute jaringan saling terhubung (loop) distribusi domestik;
- 7) Pengembangan sistem informasi logistik (e-logistic);
- 8) Pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda ke kawasan hinterland;
- 9) Peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri;
- 10) Penguatan keterpaduan angkutan tol laut dengan moda lain (jembatan udara dan perintis darat).

Tabel 3.2 Arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 di Bidang Transportasi Laut

PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TERKAIT PERHUBUNGAN LAUT
PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
PP1 Infrastruktur Pelayanan Dasar	KP4 Keselamatan dan Keamanan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan keselamatan (secara umum untuk moda selain transportasi jalan) diarahkan pada penguatan peran kelembagaan, peningkatan kelaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM • Keselamatan transportasi laut ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan syahbandar, penyediaan infrastruktur keselamatan, standardisasi aspek keselamatan kapal, pengembangan sistem informasi penumpang (tiket) dan barang (manifes) untuk mencegah muatan berlebih • Proyek prioritas: (i) pemenuhan sarana, prasarana, fasilitas, kelembagaan dan sistem informasi keselamatan dan keamanan transportasi, ii) Pembinaan dan pendidikan SDM transportasi
PP2 Infrastruktur Ekonomi	KP3 Konektivitas Laut	<p>Kebijakan Pembangunan konektivitas transportasi laut diarahkan untuk mendukung kinerja logistik Nasional, dengan strategi diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardisasi kinerja pada 7 pelabuhan utama (kedalaman, panjang dermaga, kinerja bongkar muat) • Pengembangan rute jaringan saling terhubung (<i>loop</i>) distribusi domestik • Pengembangan sistem informasi logistik (<i>e-logistic</i>) • Pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda ke kawasan <i>hinterland</i> • Peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri • Penguatan keterpaduan angkutan tol laut dengan moda lain (jembatan udara dan perintis darat) • Proyek prioritas mendukung konektivitas laut meliputi: <ul style="list-style-type: none"> i) Pengembangan pelabuhan utama, contoh: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (<i>Major Project</i>) ii) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan mendukung tol laut iii) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan mendukung kawasan prioritas, contoh: pelabuhan cruise iv) Penyelenggaraan subsidi tol laut dan perintis angkutan laut, v) Pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut, dan vi) Pengembangan teknologi informasi pelayaran.

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020)

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Muatan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang transportasi untuk periode 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini disadur dari Draft Pertama Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang disusun oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan, Desember 2019.

3.2.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Umum

Untuk mencapai prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata;
4. Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Didasarkan pada prioritas pembangunan di sektor transportasi tersebut, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional harus diarahkan agar dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain:

1. **Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi** untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. **Merajut Konektivitas Antar Wilayah** sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. **Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa** sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata;
4. **Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan** guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

3.2.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pencapaian Sasaran

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2024 merupakan metode pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional maupun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024.

Arah Kebijakan dan Strategi memuat langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Strategis. Program indikatif tersebut harus mendukung sasaran RPJMN 2020-2024 sesuai dengan bidang terkait.

Sebagai bagian dari sektor transportasi, maka sesuai dengan arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional sebagaimana disebut sebelumnya, maka Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2020-2024 sebagaimana tertuang pada **Tabel 3.3** dibawah ini.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan diperoleh dengan mendasarkan pada potensi yang ada, yang diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada di sektor perhubungan.

Tabel 3.3 Arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi simpul transportasi eksisting 2. Pembangunan simpul transportasi baru 3. Pembagian komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia 4. Reaktivasi jalur moda transportasi 5. Sinergitas angkutan umum dengan moda transportasi lokal 6. Penguatan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia 7. Penguatan jaringan layanan moda eksisting terhadap simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil. 8. Peningkatan aksesibilitas melalui perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan jaringan transportasi eksisting 2. Perluasan jaringan layanan transportasi 3. Penguatan transportasi antar moda dan multi moda 4. Pembangunan fasilitas alih moda di simpul transportasi 5. Penerapan <i>Traffic Demand Management</i> pada semua layanan transportasi 6. Optimalisasi rute layanan distribusi angkutan barang di seluruh wilayah Indonesia 7. Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi 8. Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan PSN 9. Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal 10. Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi 11. Penyiapan kompetensi keahlian profesional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia 12. Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi 2. Optimalisasi SDM pelayanan sarana dan prasarana 3. Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi 4. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi 5. Penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi 2. Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi 3. Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan 4. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan 5. Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi <i>real time</i> OTP 6. Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difabel, dan lansia 7. Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana 8. Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan <i>delay</i> yang terjadi pada sistem layanan transportasi
Meningkatnya Keselamatan Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan 2. Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR <i>online</i>, <i>travel data recording</i>. 3. Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum 2. Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan 3. Pembatasan usia sarana prasarana transportasi 4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan 5. Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan 5. Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum 6. Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi 7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian 8. Pengembangan sistem informasi terkait <i>security awareness</i> di setiap lokasi simpul utama transportasi 9. Pemenuhan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi 7. Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan 8. Edukasi keselamatan transportasi 9. Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi 10. Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api 11. Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan penganggaran terintegrasi 2. Peningkatan kemampuan sistem perencanaan melalui pelatihan dan training terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran terintegrasi 2. Pengembangan modul pendidikan anti korupsi utk pegawai Kementerian Perhubungan 3. Pengembangan sistem <i>e-commerce</i> untuk pengadaan barang
Meningkatnya kualitas rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi 2. Peningkatan pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi 2. Jangka waktu proses pengusulan kebijakan hingga menjadi Keputusan atau Peraturan Menteri Perhubungan 3. Pelaksanaan kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan atau Peraturan Menteri Perhubungan
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja Kementerian Perhubungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem <i>e-monev</i> untuk penilaian kinerja Kementerian Perhubungan 2. Melakukan <i>reviu Renstra</i> Kemenhub secara kontinu 3. Pengembangan dan penyempurnaan untuk monitor capaian kinerja seluruh pegawai Kementerian Perhubungan
Meningkatnya ASN Kementerian Perhubungan yang kompeten dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Pemberdayaan SDM yang konseptual, komprehensif, dan sinergis 3. Penerapan sekolah kedinasan yang berbasis kompetensi 4. Penataan regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi 5. Peningkatan kualitas tenaga pendidik diklat transportasi 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana diklat berbasis teknologi tinggi/mutakhir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan <i>Roadmap</i> karir dan kebutuhan jabatan 2. Melaksanakan diklat dan pendidikan SDM Perhubungan 3. Meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan di bidang IT 4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kementerian dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai regulator (teknis maupun administratif) serta peningkatan <i>capacity deliver</i> 5. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan SDM bidang keahlian sub sektor

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		6. Peningkatan peran lembaga/asosiasi profesi untuk berperan serta dalam pelaksanaan sertifikasi SDM sub sektor 7. Melaksanakan sertifikasi lulusan diklat transportasi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perhubungan yang baik	1. Optimalisasi reformasi regulasi dalam pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan 2. Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penegakan hukum secara konsisten 3. Penyempurnaan SOP layanan transportasi 4. Pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan 5. Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan peran Balai atau UPT 6. Deregulasi peraturan dan perijinan serta sinkronisasi regulasi antar lembaga 7. Penilaian atas capaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian	1. Penertiban paket-paket deregulasi perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna dalam penerapan SOP layanan transportasi 3. Penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan transportasi baik komersil maupun non komersil 4. Pelaksanaan edukasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 5. Peningkatan pengelolaan / manajemen transportasi untuk mendukung <i>smart city</i> pada kota besar dan metropolitan 6. Peraturan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan
Meningkatnya pemanfaatan inovasi terapan bidang perhubungan	1. Kemandirian dalam penyediaan produk perhubungan 2. Pembatasan impor 3. Pemberian insentif bagi pengembangan inovasi di berbagai sektor transportasi 4. Keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan transportasi 5. Kemandirian pengelolaan energi 6. Meningkatkan fasilitas penelitian dan layanan teknis melalui modernisasi alat-alat dan laboratorium 7. Meningkatkan Sinergi Penelitian dan Pengembangan Bidang Transportasi 8. Keterlibatan secara aktif dalam rencana aksi transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan	1. Pembatasan kandungan impor komponen sarana dan prasarana perhubungan 2. Penguatan industri strategis pendukung untuk kemandirian produk dalam negeri 3. Efisiensi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan 4. Peningkatan kualitas peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan berbasis IT 5. Pembaruan teknologi terpasang pada sistem transportasi di Indonesia 6. Perluasan pasar industri pendukung dan jasa konstruksi bidang perhubungan di luar negeri 7. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan melalui skema insentif penelitian dan pengembangan inovasi di berbagai sektor transportasi 8. Peningkatan fasilitas penelitian dan layanan teknis melalui modernisasi alat-alat dan laboratorium 9. Peningkatan EST (<i>Environmentally Sustainable Transportation</i>) / transportasi berkelanjutan untuk setiap kota metropolitan dan kota besar 10. Efisiensi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan 11. Penyusunan SOP layanan transportasi ramah lingkungan

Sumber: Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 (PM NO.80 Tahun 2020)

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2020-2024

Muatan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang transportasi laut untuk periode 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini diperoleh dari dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.936/DJPL/2020 tentang Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

3.3.1 Arah Kebijakan Umum Perhubungan Laut Tahun 2020–2024

Arah kebijakan umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 akan diarahkan kepada 3 fokus berikut:

- Perwujudan peran transportasi laut dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, seperti: perwujudan konektivitas laut (dalam rangka efisiensi logistik maupun pemerataan akses khususnya ke daera DTPK), perwujudan jaringan pelabuhan utama terpadu, dukungan terhadap IKN (Ibu Kota Negara), dukungan terhadap agenda prioritas sektor lainnya (KSPN, KI, KEK, SKPT, dll), serta akomodasi terhadap isu strategis lintas sektoral (kebencanaan, perubahan iklim, energi, lingkungan, isu gender, fasilitasi kaum divable, dlsb).
- Meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim (melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, peningkatan *compliance* terhadap standar/regulasi internasional, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut).
- Penguatan dan penyederhanaan regulasi dan kelembagaan di bidang pelayaran, diantaranya melalui: penguatan kelembagaan KPLP, modernisasi pelayanan, penguatan regulasi dan kebijakan pemanduan, serta peningkatan efektivitas organisasi Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.

Pada beberapa butir berikut ini disampaikan detail penjelasan tentang arah kebijakan umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang hendak diwujudkan dalam periode Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024.

1. Perwujudan logistik maritim dalam negeri

Logistik maritim dalam negeri melalui jaringan pelayaran nasional merupakan salah satu penentu efektivitas kinerja sistem logistik nasional. Perwujudan logistik maritim ini akan diupayakan melalui pelaksanaan restrukturisasi jaringan pelayaran komersil yang diarahkan berbentuk *loop*, optimalisasi jaringan pelayaran perintis/subsidi (tol laut, rede, ternak) dan pelayaran rakyat untuk menyediakan konektivitas ke sejumlah kawasan strategis dan sentra produksi, serta efisiensi distribusi barang pokok dan penting ke wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

2. Peningkatan konektivitas terhadap jaringan pelayaran internasional

Konektivitas terhadap jaringan utama pelayaran internasional (*core route*) memberikan keuntungan bagi efektivitas logistik ekspor/import dalam mendukung daya saing produk nasional. Beberapa upaya yang akan dilakukan adalah dengan menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sebagai

pelabuhan singgah dari rute utama (*core route*) pelayaran dunia, serta meningkatkan prosentase muatan luar negeri yang menggunakan kapal berbendera Indonesia melalui kebijakan *beyond cabotage*.

3. Perwujudan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Pengembangan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu atau sering dikenal sebagai *Integrated Port Network* (IPN) yang dicanangkan sebagai salah satu proyek prioritas strategis/*major project* (MP) dalam RPJMN 2020-2024 dilakukan dalam rangka efisiensi distribusi logistik dalam negeri (khususnya yang berbasis peti kemas), peningkatan konektivitas nasional, serta penyeimbangan arus perdagangan antara Indonesia Bagian Barat dan Timur. Sebanyak 7 (tujuh) pelabuhan akan dikembangkan dan dikelola dalam kerangka IPN ini, yakni: Kuala Tanjung, **Tanjung Priok**, Tanjung Perak, Kijing, Makassar, Bitung, dan Sorong. Ketujuh pelabuhan IPN tersebut akan dikembangkan standarisasi/keseragaman dalam persyaratan teknis penyediaan sarana dan prasarana serta standar pelayanan sehingga dapat melayani secara lebih efisien dari sisi biaya maupun waktu.

4. Dukungan Transportasi Laut terhadap Rencana Ibu Kota Negara (IKN)

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020). Ditargetkan awal 2024, IKN sudah pindah ke lokasi baru yakni di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Peran transportasi laut sangat sentral dalam perwujudan IKN, di mana logistik selama proses pembangunan maupun pada saat IKN nanti sudah beroperasi akan bertumpu pada konektivitas laut. Optimalisasi dari pelabuhan eksisting di sekitar lokasi IKN, peningkatan koneksi jaringan pelayaran, serta penambahan kekuatan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran pada wilayah perairan di sekitar IKN akan menjadi beberapa kegiatan strategis perhubungan laut dalam mendukung rencana IKN ini.

5. Dukungan Transportasi Laut terhadap Prioritas Nasional Sektor Lainnya

Efektivitas dukungan transportasi laut terhadap berbagai agenda dan kebijakan pembangunan nasional secara multi-sektoral merupakan indikasi utama dari keberhasilan Ditjen Perhubungan Laut dalam mendukung prioritas serta visi dan misi Presiden 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 41 proyek prioritas (*Major Project/MP*) yang dicanangkan, di mana beberapa MP tersebut membutuhkan dukungan spesifik dari transportasi laut, diantaranya yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata unggulan (KSPN), pengembangan pusat ekonomi (KEK, KI, SKPT), pengembangan kawasan tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP), termasuk IKN (yang sudah dijelaskan tersendiri pada butir 4). Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencanangkan sejumlah program tematis untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan nasional tersebut selama periode 2020-2024.

6. Akomodasi terhadap Isu Strategis Lintas Sektoral (Kebencanaan, Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, Divable, Gender, dan lain-lain)

Setiap bidang pembangunan, termasuk transportasi laut, tidak dapat dipisahkan dari keharusan untuk mengakomodasi berbagai isu strategis lintas sektoral yang telah menjadi isu nasional maupun global. Pembangunan bidang transportasi laut dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk mampu mendukung ketahanan nasional terhadap bencana serta antisipatif terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, konsentrasi terhadap isu energi (IMO-LSFO atau B-20 nasional) dan lingkungan (pemenuhan ketentuan konvensi MARPOL) juga sudah harus menjadi prioritas. Selanjutnya, terkait dengan transportasi berkeadilan, maka penyelenggaraan transportasi laut ke depan juga harus mengakomodasi kebutuhan kaum divable dan responsif gender.

7. Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi

Optimalisasi dukungan konektivitas transportasi laut terhadap berbagai kawasan prioritas/strategis nasional dalam kerangka sistem logistik nasional membutuhkan adanya keterpaduan antarmoda transportasi dengan moda transportasi lainnya (jalan, SDP, kereta api, dan udara). Sebagai ilustrasi, program tol laut 2020-2024 akan diintegrasikan dengan jembatan udara dan subsidi angkutan barang di jalan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok dan penting sampai dengan lokasi yang membutuhkan. Pelabuhan-pelabuhan utama akan diupayakan untuk diakses oleh jalur kereta api dan jaringan jalan nasional yang memadai untuk menjangkau sejumlah kawasan produksi, kawasan wisata, dan kawasan penting lainnya.

8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan serta perlindungan lingkungan maritim

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar publik terkait dengan keselamatan dan keamanan transportasi serta perlindungan lingkungan maritim, akan diupayakan adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan. Pemenuhan kecukupan serta kondisi/keandalan sarana dan prasarana SBNP, telekomunikasi pelayaran, kapal patroli, dan sarana/prasarana kerja lainnya akan menjadi prioritas pembangunan di bidang transportasi laut.

9. Peningkatan *compliance* terhadap standar/regulasi internasional

Dalam 5 tahun ke depan terdapat sejumlah standar/regulasi internasional di bidang pelayaran yang dikeluarkan IMO wajib diratifikasi dan dilaksanakan secara penuh, diantaranya terkait: (Marpol) Annex VI Regulasi 14 tentang pembatasan emisi Sulphur Oxides (SOx) and Particulate Matter, STCW Manila. Selain itu, pemenuhan terhadap aturan SOLAS terhadap seluruh kapal nasional, termasuk yang saat ini mengikuti NCVS juga perlu diprioritaskan untuk dipenuhi. Ratifikasi dan pelaksanaan sejumlah regulasi/standar pelayaran yang berlaku secara internasional merupakan upaya awal perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana Indonesia diharapkan menjadi salah satu negara yang terdepan dalam kemajuan ekonominya.

10. Penguatan kelembagaan KPLP dan peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut

Semenjak ditetapkannya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mandat untuk menetapkan PP tentang Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) belum terlaksana. Dalam konteks pelayaran internasional, yang diakui menjadi perwakilan Indonesia (*flag-state*) oleh IMO adalah Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sehingga dalam konteks ini, penguatan kelembagaan KPLP ke depan harus mengarah kepada integrasi seluruh kekuatan di bidang kepatrolihan nasional untuk memenuhi kebutuhan dan ketentuan internasional di bidang penegakan aturan dan regulasi di bidang pelayaran internasional.

11. Modernisasi pelayanan di bidang pelayaran

Mengelaborasi amanat Presiden 2020-2024 untuk melakukan transformasi ekonomi kearah industri dan jasa yang profesional dan berkelas dunia, termasuk di industri pelayaran, maka kebutuhan untuk memodernisasi sistem layanan di bidang pelayaran (penerapan INAPORTNET, *gate-in*, *e-ticketing*, dll) akan menjadi salah satu agenda penting.

12. Penguatan regulasi dan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan pemanduan

Pelaksanaan kegiatan pemanduan sampai dengan saat ini belum banyak mendapatkan perhatian baik dalam regulasi maupun kebijakan pelaksanaan. Tantangan terkait dengan kinerja pelayanan pelabuhan serta kebutuhan untuk pemanduan di wilayah Selat Malaka yang sudah sangat padat, mengharuskan adanya perubahan kebijakan dan pengaturan di bidang pemanduan, agar lebih efektif dan efisien pelaksanaannya.

13. Peningkatan Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

Peningkatan efektivitas kinerja UPT dan Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dengan penyesuaian struktur organisasi dan tugas serta fungsi disesuaikan perkembangan (berikut penyediaan kebutuhan SDM) serta agenda penyederhanaan birokrasi.

3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kinerja Bidang Perhubungan Laut 2020-2024

Sesuai dengan pasal 1 (15) Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan. Sasaran program (SP) yang diharapkan terwujud dari penyelenggaraan program transportasi laut yang dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Laut telah disampaikan pada **Sub Bab 2.3.3 Bagian c**, yakni terdiri dari 4 SP, yakni:

**SP.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut,
SP.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut,
SP.3 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut, dan
SP.4 Meningkatnya Kinerja Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut.**

Berikut ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan (AK) dan Strategi Implementasi (SI) untuk mencapai Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk periode Renstra 2020-2024 tersebut di atas, yakni:

AK.1 Perwujudan Angkutan Laut Yang Murah, Mudah, Sempel, dan Kompetitif

AK.2 Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut

AK.3 Penyediaan Infrastruktur Pelabuhan Laut Yang Berdaya Saing

AK.4 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Regulasi Keselamatan, Keamanan, dan Perlindungan Lingkungan Maritim

AK.5 Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum di Laut

AK.6 Peningkatan Integrasi dalam Pengelolaan Organisasi

Secara hirarki AK.1 dan AK.2 merupakan arahan kebijakan untuk mencapai SP.1 Meningkatnya konektivitas transportasi laut. Kemudian AK3 merupakan arah kebijakan untuk menjawab tantangan dari SP.2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut. Adapun AK.4 dan AK.5 merupakan arah kebijakan untuk menjawab SP.3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut serta SP.4 Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Sedangkan AK6 merupakan arah kebijakan terkait dukungan manajemen dan teknis dalam rangka membantu pencapaian seluruh Sasaran Program (SP) tersebut sebelumnya.

Selanjutnya, setiap Arah Kebijakan (AK) tersebut akan dilaksanakan melalui sejumlah Strategi Implementasi (SI) yang berisi indikasi program/kegiatan strategis (KS) yang akan dilaksanakan sebagai upaya detail dalam rangka pencapaian Sasaran Program (SP) yang telah ditetapkan.

Pada tabel 3.4 berikut disampaikan kerangka Arah Kebijakan (AK), Strategi Implementasi, berikut dengan dengan indikasi Kegiatan Strategis (KS) untuk mencapai Sasaran Program (SP) Penyelenggaraan Transportasi Laut pada periode Renstra 2020-2024.

Tabel 3.4 Strategi Implementasi Penyelenggaraan Transportasi Laut 2020-2024

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi laut	AK.1 Perwujudan Angkutan Laut Yang Murah, Mudah, Sempel, dan Kompetitif	SI.1 Program pengembangan armada kapal nasional dan pembinaan industri pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembiayaan pengembangan industri pelayaran nasional • Peningkatan jenis, ukuran, dan umur armada kapal nasional • Penguatan industri pendukung pelayaran (galangan kapal, JPT, TKBM)
		SI.2 Peningkatan sistem layanan angkutan laut dalam negeri (<i>Inaportnet, E-ticketing, Gate in</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan <i>e-ticketing and gate-in</i> • Penetapan Sistem Informasi Manajemen Kepelabuhanan
		SI.3 Peningkatan pangsa muatan angkutan luar negeri yang dilayani kapal berbendera Indonesia (<i>beyond cabotage</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penerapan asas cabotage and beyond cabotage • Pengembangan layanan <i>halal logistics</i> • Peningkatan direct call dari Pelabuhan Indonesia ke sejumlah Negara tujuan • Peningkatan frekuensi dan jumlah pelabuhan yang disinggahi oleh rute pelayaran utama internasional (core route international) • Penyusunan petunjuk teknis pelayaran internasional • Penanganan Pelayaran Lintas Batas Negara
	AK.2 Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut	SI.4 Peningkatan efektivitas program keberintisan/tol laut/kapal ternak/rede/pelra	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan blue print tol laut/perintis/kapal ternak/rede • Peningkatan koordinasi antar stakeholders terkait (K/L, Pemda, Swasta) • Pembangunan dan pengoperasian kapal-kapal spesifikasi khusus untuk aksesibilitas kawasan dan efektivitas distribusi (kapal rede/feeder tol laut papua/kapal feeder) • Pembentukan unit pengelola kapal negara
		SI.5 Penataan jaringan pelayaran dalam negeri (<i>Loop Route</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi SK Dirjen tentang jaringan trayek tetap dan teratur angkutan barang dan peti kemas (diutamakan berbentuk loop, sistem operasi aliansi jaringan pelayaran pendukung tol laut)

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengoperasian <i>Short Sea Shipping</i> • Peningkatan efektivitas sistem pelaporan pelayaran berjadwal (<i>voyage report</i>)
		SI.6 Penyediaan angkutan laut dan trayek penunjang kawasan prioritas nasional (KSPN/DPN/pariwisata, KEK, KI, IKN)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Desain Kapal Wisata untuk Destinasi Wisata • Pembangunan kapal submarine untuk pariwisata • Tersedianya Angkutan Laut dan Trayek Penunjang Pariwisata, KEK, KI, dan IKN • Pengembangan trayek pelayaran pendukung kawasan KEK, KI, dan IKN
SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	AK.3 Penyediaan Infrastruktur Pelabuhan Laut Yang Berdaya Saing	SI.7 Lanjutan pembangunan/pengembangan/rehabilitasi pelabuhan KDP	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritasi penuntasan pembangunan/pengembangan/rehabilitasi pelabuhan dalam status KDP • Penuntasan kendala teknis dan non teknis yang menghambat penyelesaian pelabuhan dalam status KDP
		SI.8 Lanjutan pembangunan/pengembangan/rehabilitasi fasilitas pelabuhan pendukung program prioritas nasional (IKN, KSPN, KEK, KI, SKPT, DTPK, dan tol laut)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pembangunan/ pengembangan fasilitas pelabuhan pada lokasi pendukung prioritas nasional (IKN, KEK, KSPN, KI, SKPT, dll) • Pembangunan pelabuhan/fasilitas khusus pelabuhan sesuai kebutuhan kawasan (pelabuhan cruise, dermaga curah/cair, lapangan penumpukan, dll) • Peningkatan penyediaan fasilitas alihmoda pada pelabuhan pendukung logistik nasional • Perbaiki jalan akses dan penyediaan layanan transportasi darat
		SI.9 Penuntasan pelaksanaan P3D Pelabuhan Lokal dan Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan serah terima aset kepelabuhanan pada pelabuhan lokal dan regional dari Ditjen Perhubungan Laut kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota • Reorganisasi UPP pengelola pelabuhan menjadi KSOP/ bentuk kelembagaan lainnya (termasuk <i>impassing</i> tenaga fungsional)
		SI.10 Pemenuhan standar teknis dan operasional pelabuhan, khususnya	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan <i>dwelling time</i> pada pelabuhan IPN

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
		pada jaringan pelabuhan utama terpadu/IPN (<i>Integrated Port Network</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyediaan fasilitas pelabuhan dan tingkat pelayanan sesuai rerata internasional • Penyeragaman penyediaan kedalaman kolam pelabuhan, panjang dermaga, dan fasilitas bongkar muat pada pelabuhan utama IPN • Pengembangan sistem operasional terintegrasi pada 7 pelabuhan utama (IPN) pendukung logistik nasional
		SI.11 Modernisasi dan efisiensi bongkar muat pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas bongkar muat peti kemas pada pelabuhan pendukung tol laut, terutama mobile crane • Otomatisasi sistem bongkar muat barang pada sejumlah pelabuhan utama dan pengumpul • Optimalisasi kinerja TKBM
		SI.12 Pengembangan pelabuhan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan konsep <i>eco-port</i> pada sejumlah pelabuhan utama dan pengumpul, termasuk penyediaan <i>reception facilities</i>, alat bongkar muat berbahan baku <i>non-fossil</i>, serta penerapan <i>green building</i> • Penyediaan fasilitas bunker bahan bakar B-20 dan <i>Low Sulfur Fuel</i> • Peningkatan sanitasi pelabuhan yang melayani kapal <i>cruise</i>
		SI.13 Pengembangan Sistem Informasi Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pengimplementasian sistem informasi kepelabuhanan • Peningkatan jumlah pelabuhan yang telah melakukan penerapan INAPORTNET • Digitalisasi pelayanan pelabuhan
<p>SP3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut</p> <p>SP4 Meningkatnya kinerja pencegahan dan</p>	AK.4 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Regulasi Keselamatan, Keamanan, dan Perlindungan Lingkungan Maritim	SI.14 Penguatan infrastruktur sistem kenavigasian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemenuhan kebutuhan dan keandalan SBNP dan telkompel • Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah, jenis, ukuran, dan penempatan, serta pemeliharaan dan operasional kapal negara kenavigasian • Peningkatan jumlah alur dan perlintasan yang telah ditetapkan (termasuk kegiatan pendukungnya)

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
penanggulangan pencemaran laut			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyediaan VTS pada lintas pelayaran yang padat dan strategis
		SI.15 Penguatan regulasi, kelembagaan, dan SDM, dalam penyelenggaraan kenavigasian	<ul style="list-style-type: none"> • Perkuatan dari sisi SDM, regulasi/ SOP, dan kelembagaan (termasuk potensi BLU) dalam penyelenggaraan kenavigasian • Pengaturan ruang perairan • <i>Risk assessment dan risk management</i> • Penguatan Kerjasama • Penguatan Legislasi
		SI.16 Peningkatan kualitas layanan kenavigasian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi kenavigasian • Optimalisasi pemanfaatan kenavigasian sebagai Big Data Pelayaran untuk mendukung efisiensi pelayanan (termasuk tracking dan tracing, aplikasi <i>booking</i> untuk kapal negara) • Navigasi bagi rute-rute kapal liner, khususnya dalam mendukung program nasional perintisan, tol laut, dan kapal PELNI
		SI.17 Penguatan regulasi, kelembagaan, dan SDM dalam peningkatan jumlah kapal yang memenuhi ketentuan SOLAS atau NCVS	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan regulasi/revisi regulasi, serta ratifikasi regulasi internasional di bidang perkapalan sesuai SOLAS • Peningkatan efektivitas kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan pelaksanaan pengendalian di bidang perkapalan sesuai SOLAS • Peningkatan SDM aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi sertifikasi di bidang perkapalan sesuai SOLAS dan NCVS • Peningkatan konsistensi pelaksanaan regulasi NCVS Nasional • Penyempurnaan regulasi NCVS

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
		SI.18 Penguatan regulasi, kelembagaan, dan SDM dalam perlindungan lingkungan Maritim (MARPOL, AFS, BWM, CLC, CLCB, Wreck Removal, Ship Recycling)	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan regulasi/revisi regulasi, serta ratifikasi regulasi internasional di bidang perlindungan lingkungan maritim sesuai ketentuan IMO • Peningkatan efektivitas kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan pelaksanaan pengendalian di bidang perlindungan lingkungan maritim sesuai ketentuan IMO • Peningkatan SDM aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi sertifikasi dan pengawasan, serta penanggulangan di bidang perlindungan lingkungan maritim sesuai ketentuan IMO
		SI.19 Penguatan regulasi, kelembagaan, dan SDM dalam Manajemen Keselamatan Kapal (ISM Code)	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan regulasi/revisi regulasi, serta ratifikasi regulasi internasional di bidang keselamatan kapal sesuai dengan ISM Code • Peningkatan efektivitas kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan pelaksanaan pengendalian di bidang keselamatan kapal sesuai dengan ISM Code • Peningkatan SDM aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi sertifikasi dan pengawasan bidang keselamatan kapal sesuai dengan ISM Code
		SI.20 Penguatan regulasi, kelembagaan dan SDM terkait pelaut yang memenuhi STCW Code dan MLC	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan regulasi/revisi regulasi, serta ratifikasi regulasi internasional di bidang kepelautan sesuai STCW Code dan MLC • Peningkatan efektivitas kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan pelaksanaan pengendalian di bidang kepelautan sesuai STCW Code dan MLC • Peningkatan SDM aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi sertifikasi dan pengawasan bidang kepelautan sesuai STCW Code dan MLC

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
	AK.5 Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum di Laut	SI.21 Penguatan regulasi, kelembagaan dan SDM yang memenuhi <i>Load lines Convention</i> dan <i>Tonnage Measurement of Ships Convention</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan regulasi/revisi regulasi, serta ratifikasi regulasi internasional di bidang garis muat dan pengukuran kapal sesuai dengan <i>Load lines Convention</i> dan <i>Tonnage Measurement of Ships Convention</i> • Peningkatan efektivitas kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan pelaksanaan pengendalian di bidang garis muat dan pengukuran kapal sesuai dengan <i>Load lines Convention</i> dan <i>Tonnage Measurement of Ships Convention</i> • Peningkatan SDM aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi sertifikasi dan pengawasan bidang garis muat dan pengukuran kapal sesuai dengan <i>Load lines Convention</i> dan <i>Tonnage Measurement of Ships Convention</i>
		SI.22 Peningkatan pemenuhan SDM di bidang PLP	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan enempatan SDM di bidang PLP khususnya marine inspector, awak kapal, serta PPNS bidang PLP • Peningkatan kompetensi SDM di bidang PLP, melalui bimbingan teknis dan diklat
		SI.23 Peningkatan jumlah kapal dan faspel yang memiliki sertifikat ISPS Code	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sosialisasi regulasi di bidang keamanan kapal dan pelabuhan • Peningkatan efektivitas sertifikasi ISPS Code pada kapal dan fasilitas pelabuhan • Peningkatan kinerja pelaksanaan pemeriksaan kapal asing
		SI.24 Penguatan kelembagaan KPLP	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan Sea and Coast Guard • Pemekaran jumlah UPT Pangkalan PLP • Penguatan sistem dan prosedur operasional patroli PLP
		SI.25 Reformasi dan pemangkasan birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi organisasi kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
	AK.6 Peningkatan Integrasi dalam Pengelolaan Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> • Reorganisasi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut • Impassing pejabat struktural menjadi fungsional
		SI.26 Penyederhanaan dan efektivitas implementasi regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan regulasi dan perizinan di bidang perhubungan laut • Perbaiki sistem dan prosedur dalam penegakan regulasi di bidang pelayaran • peningkatan efektivitas pengendalian (termasuk perizinan) di bidang pelayaran • Digitalisasi serta penyederhanaan serta percepatan perizinan dan birokrasi
		SI.27 Optimalisasi pengelolaan keuangan dan BMN	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas perencanaan anggaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut • Peningkatan kepatuhan pelabuhan pelaksanaan anggaran (e-monitoring) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut • Peningkatan efektivitas kinerja dan penyerapan anggaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut • Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut (termasuk potensi KSO/KSP)
		SI.28 Penguatan SDM transportasi laut	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut • Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut • Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian
		SI.29 Penguatan dan integrasi sistem informasi perhubungan laut	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi dan TIK administrasi dan teknis di setiap bidang pelayaran • Peningkatan efektivitas dan update content portal Ditjen Perhubungan Laut • Pengintegrasian sistem antarmuka dan pengelolaan database/big data bidang transportasi laut

3.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK 2020-2024

3.4.1 ARAH KEBIJAKAN UMUM KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan pelayanan di bidang Kepelabuhanan yang handal maka pada perioda 2020-2024, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok akan melakukan sejumlah arah kebijakan umum berikut ini:

- Meningkatkan pelayanan kegiatan angkutan barang dan penumpang melalui peningkatan kinerja operasional pelabuhan dalam rangka penurunan biaya logistik dan kinerja pelabuhan yang efektif dan efisien.
- Meningkatkan kualitas pelayanan pelabuhan melalui penerapan Smart Port.
- Meningkatkan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di Pelabuhan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan *Eco Port* di Pelabuhan Tanjung Priok melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, peningkatan *compliance* terhadap standar/regulasi internasional, serta peningkatan efektivitas pengawasan dan pemenuhan terhadap peraturan lingkungan hidup di di Pelabuhan.
- Penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan yang memadai sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok.
- Peningkatan kualitas SDM penyelenggara pelabuhan.

3.4.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK 2020-2024

Pada **Tabel 3.5** disampaikan arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

Tabel 3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SK.1 Terwujudnya SDM OP Utama yang Kompeten dan Profesional	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan jumlah dan distribusi SDM di Kantor OP Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kajian kebutuhan SDM aparatur/teknis Kantor OP Utama sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi • Peningkatan jumlah SDM aparatur/teknis Kantor OP Utama sesuai kebutuhan • Peningkatan efektivitas kebijakan distribusi SDM aparatur/teknis Kantor OP Utama sesuai kebutuhan kelembagaan
SK.2 Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di OP Utama	Meningkatkan kinerja dukungan manajemen terhadap pengelolaan administrasi di Lingkungan OP utama	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kantor OP Utama • Peningkatan kemajuan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Lingkungan Kantor OP Utama; • Peningkatan efektivitas perencanaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Kantor OP Utama
SK.3 Terkelolanya anggaran Kemenhub secara optimal di OP Utama	Meningkatkan kinerja dukungan manajemen terhadap pengelolaan keuangan dan BMN di Lingkungan OP Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyerapan anggaran di OP Utama • Peningkatan realisasi belanja dan pendapatan di Lingkungan Kantor OP Utama • Manajemen anggaran yang baik, melalui evaluasi dan monitoring penyerapan secara berkala setiap bulan • Peningkatan pengelolaan BMN • Optimalisasi penatausahaan dan potensi PNBPN
SK.4 Terwujudnya system digitalisasi informasi yang terintegrasi dengan ekosistem logistik nasional	Meningkatkan kinerja dukungan manajemen terhadap pelaksanaan pendataan di Lingkungan Kantor OP Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan validitas data di lingkungan Kantor OP Utama • Peningkatan ketersediaan sistem data di lingkungan Kantor OP Utama • Peningkatan ketersediaan system digitalisasi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok melalui koordinasi, dukungan dan dorongan kepada Badan Usaha Pelabuhan selaku penerima konsesi untuk mengembangkan system digitalisasi
SK.5 Terwujudnya dokumen perencanaan pengembangan fasilitas pelabuhan	Meningkatkan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan fasilitas pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyediaan dokumen Master Plan, DLKr dan DLKp Pelabuhan sampai dengan penetapannya • Peningkatan penyediaan dokumen rencana, program, serta desain, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengoperasian fasilitas pelabuhan
SK.6 Meningkatnya penyediaan fasilitas pelabuhan serta	Meningkatkan efektifitas penyediaan fasilitas pelabuhan serta sarana pelayanan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyediaan fasilitas daratan (terminal, gudang, bunker, perkantoran, jaringan jalan, dan prasarana pendukung lainnya) yang

Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
sarana pelayanan lainnya sesuai yang ditetapkan dalam masterplan pelabuhan, baik yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan maupun badan usaha pelabuhan	sesuai yang ditetapkan dalam masterplan pelabuhan, baik yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan maupun badan usaha pelabuhan	<p>disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penyediaan fasilitas perairan (penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, SBNP, dermaga, dan prasarana pendukung lainnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan
SK.7 Meningkatnya keselamatan kerja di pelabuhan	Meningkatkan pengawasan keselamatan kerja di pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemenuhan standarisasi peralatan (pesawat angkat dan angkut, pesawat uap dan bejana tekan) di pelabuhan
SK.8 Meningkatnya penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan	Meningkatkan efektifitas kegiatan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di Pelabuhan
	Meningkatkan pemanfaatan fasilitas <i>reception facilities</i>	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dan kualitas <i>reception facilities</i> sesuai dengan kebutuhan Peningkatan penggunaan <i>reception facilities</i> Peningkatan pelayanan <i>reception facilities</i>
SK.9 Meningkatnya kinerja operasional pelabuhan dalam rangka pemenuhan standar kinerja yang ditetapkan	Meningkatkan kinerja operasional pelabuhan dalam rangka pemenuhan standar kinerja yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas aplikasi Inaportnet di pelabuhan Peningkatan penyediaan dan efektivitas sispro pelayanan kapal, barang, dan penumpang sesuai standar yang telah ditetapkan Pelaksanaan evaluasi kinerja operasional pelabuhan secara berkala
SK.10 Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Pelabuhan	Meningkatkan kinerja pemanfaatan fasilitas pelayanan pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kinerja bongkar muat barang petikemas dan non petikemas Peningkatan Rata-rata <i>receiving</i> dan <i>delivery</i> peti kemas Peningkatan penggunaan dermaga (BOR) Peningkatan penggunaan gudang (SOR) Peningkatan penggunaan lapangan (YOR)
SK.11 Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan laut oleh kantor Otoritas Pelabuhan	Meningkatkan kualitas pelayanan penumpang angkutan lebaran, natal dan tahun baru dengan aman, nyaman dan selamat	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi laut Peningkatan pelayanan sarana transportasi guna mencapai SPM pelayanan

3.5. KERANGKA REGULASI

3.5.1 KERANGKA REGULASI UMUM DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden 2020-2024 bahwa salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional 2020-2024 adalah melakukan penyederhanaan regulasi khususnya melalui penyusunan omnibus law dan/atau melakukan deregulasi dalam peraturan pelaksanaan yang lebih rendah.

Deregulasi diwujudkan dengan merasionalisasi peraturan yaitu penghilangan peraturan yang tumpang tindih, keselarasan antar satu peraturan dengan peraturan yang lain, serta penyederhanaan peraturan terutama yang terkait dengan perizinan dalam rangka membangun iklim kemudahan berinvestasi. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai unit organisasi di Kementerian Perhubungan menjadi salah satu yang mengemban amanat untuk melakukan deregulasi khususnya di bidang transportasi laut.

Salah satu peran pemerintah meluncurkan paket deregulasi adalah untuk meningkatkan daya saing industri termasuk industri di sektor transportasi laut, mengingat bahwa industri memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan deregulasi diharapkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih mempermudah dan menyederhanakan serta memberikan kepastian bagi industri untuk pengembangan kegiatan usahanya. Di samping itu, pemerintah juga ingin meminimalisir dan menghilangkan kendala birokrasi terhadap dunia usaha.

Tujuan Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk:

1. Memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri;
2. Mempercepat penyelesaian gap daya saing industri; dan
3. Menciptakan inisiatif baru (seperti: fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, *trade financing*, *financial inclusion*, *inland FTA*, *logistics centre*), sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.

Deregulasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/*irrelevant regulations*.
2. Melakukan keselarasan antar peraturan.
3. Melakukan konsistensi peraturan.

Deregulasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meliputi simplifikasi atau penyederhanaan peraturan, penghilangan tumpang tindih peraturan, dan penyelarasan antar peraturan satu dengan peraturan yang lain. Proses deregulasi dilakukan dengan memperbaiki beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan, sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mendapatkan layanan yang lebih baik antara lain dengan

memberi kemudahan dalam perizinan, memudahkan persyaratan seminimal mungkin tetapi efektif, atau memberikan jangka waktu berlaku perizinan yang lebih panjang.

Selain itu, penguatan kerangka regulasi dalam rangka pelaksanaan dari UU 18/2007 tentang Pelayaran tetap diperlukan, khususnya untuk mencapai sejumlah sasaran berkenaan dengan keselamatan, keamanan, pelayanan, dan perlindungan lingkungan maritim. Kerangka regulasi transportasi laut Tahun 2020–2024, mengandung 3 fungsi utama, yaitu fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi fasilitasi. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6 Kerangka Regulasi Transportasi Laut

FUNGSI REGULASI	MANDAT UU PELAYARAN	KEBUTUHAN PENGUATAN REGULASI
Fungsi perubahan	Penyederhanaan proses perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Omnibus Law • Deregulasi perizinan di masing-masing Direktorat dalam rangka meningkatkan kemudahan berinvestasi di bidang pelayaran (EoDB) • Delegasi kewenangan penerbitan izin pada lini terdepan
	Peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi pendukung penyelenggaraan dan pengusahaan pelayanan di pelabuhan • Pengelolaan dan pengusahaan pelabuhan oleh Pemda • Regulasi pendukung pelaksanaan KPBU, KSP, dan KSO pelabuhan • Revisi peraturan dalam rangka memenuhi ketentuan internasional di bidang pelayaran
	Transformasi kelembagaan di bidang pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan PP tentang Penjagaan Laut dan Pantai • Penguatan kelembagaan di bidang PLP • Revisi Peraturan terkait Perubahan Kelembagaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut • Penetapan regulasi mengenai P3D pelabuhan kepada daerah • Regulasi pendukung pembentukan BLU atau Bentuk Kelembagaan Lainnya di bidang pelayaran
Fungsi stabilisasi	Standarisasi teknis sarana, prasarana, dan SDM bidang transportasi laut	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu RIPN • Standarisasi pelabuhan pada IPN • Blue Print/Masterplan penyelenggaraan tol laut/perintisan • Restrukturisasi jaringan trayek pelayaran nasional • Rencana umum pengembangan bidang kenavigasian (masteplan kenavigasian, penataan ruang wilayah perairan) • Rencana umum pengembangan bidang PLP • Penguatan pelaksanaan regulasi NCVS • Kewajiban penggunaan AIS terhadap seluruh kapal • Penerapan SOLAS secara bertahap hingga mencapai standar maksimal
	Pemenuhan (<i>compliance</i>) terhadap ketentuan internasional	Ratifikasi sejumlah konvensi IMO terkait dengan kepelabuhanan , kepelautan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim
Fungsi fasilitasi	Pemberdayaan angkutan laut nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan <i>beyond cabotage</i> • Fasilitasi permodalan bagi perusahaan pelayaran nasional • Pemberdayaan pelayaran rakyat • Penyiapan implementasi MEA

FUNGSI REGULASI	MANDAT UU PELAYARAN	KEBUTUHAN PENGUATAN REGULASI
	Fasilitasi peran stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kelembagaan penyelenggaraan pelayaran di Daerah (P3D) • Peran lembaga diklat dan sertifikasi swasta • Pengembangan kelembagaan penyelenggaraan TSDP di perhubungan darat • Regulasi pendukung UMKM (termasuk TKBM) dalam perkuatan peran dan pengusahaannya
	Fasilitasi kepada seluruh lapisan masyarakat (secara fisik, ekonomi, dan sosial)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian dasar hukum pelaksanaan pelayaran perintis, PSO angkutan barang, dan kapal ternak • Standar pelayanan penumpang difable serta ibu hamil dan menyusui pada angkutan laut penumpang

3.5.2 KERANGKA REGULASI DI BIDANG KEPELABUHANAN

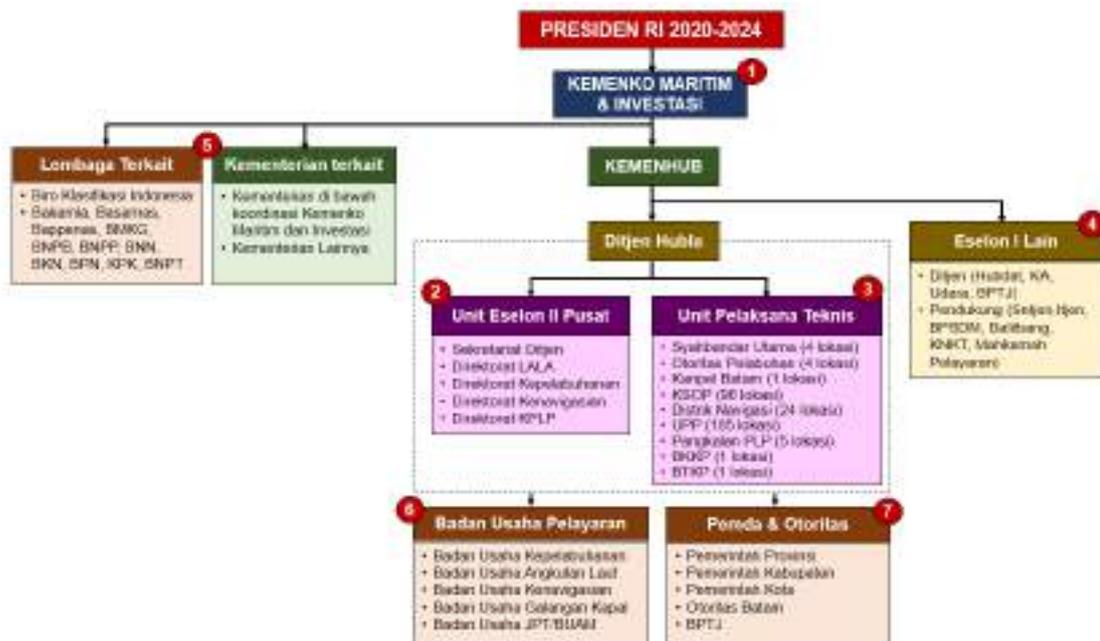
Secara lebih spesifik terdapat beberapa peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang perlu ditambahkan/disempurnakan dan ditetapkan diantaranya:

- *Standard Operation Procedure (SOP) Pengelolaan Limbah di Pelabuhan Tanjung Priok*
- *Standard Operation Procedure (SOP) Penanganan Limbah di Pelabuhan Tanjung Priok*
- *Standard Operation Procedure (SOP) Pelayanan Kapal Penumpang, Barang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan Tanjung Priok*
- Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terkait Kerjasama Badan Usaha Pelabuhan dengan Pihak Ketiga di lingkup area konsesi
- Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terkait Pengelolaan Lingkungan diwilayah Pelabuhan Tanjung Priok
- Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terkait Penyediaan Sistem Digitalisasi Terminal Operasi
- Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terkait Pemenuhan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pelabuhan
- Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terkait tata naskah dan persuratan di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
- Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terkait pengembangan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
- Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terkait peningkatan kinerja pegawai

3.6. KERANGKA KELEMBAGAAN

3.6.1 KERANGKA KELEMBAGAN DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT

Secara umum kerangka kelembagaan penyelenggaraan di bidang transportasi laut yang akan dikembangkan selama periode 2020-2024 divisualisasikan pada **Gambar 3.1** berikut ini. Secara umum, rencana penguatan kelembagaan tersebut akan mencakup: (1) penguatan organisasi internal di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, (2) penguatan koordinasi antar Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan, (2) penguatan koordinasi antar K/L yang terkait, serta (4) penguatan peran stakeholders (Pemda dan Masyarakat) dalam penyelenggaraan transportasi laut.



Gambar 3.1 Kerangka Umum Kelembagaan Penyelenggaraan Bidang Transportasi Laut 2020-2024

Terdapat beberapa rencana penguatan dan optimasi kelembagaan dalam penyelenggaraan transportasi laut yang akan dilakukan pada periode 2020-2024, diantaranya:

- Penguatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Maritim dan Investasi sesuai dengan amanat presiden dan kelembagaan pemerintahan pada periode 2020-2024.
- Penguatan peran Indonesia dalam dunia pelayaran internasional, khususnya melalui peningkatan status keanggotaan di IMO sehingga dapat meningkatkan positioning dan daya saing industri pelayaran nasional, peningkatan kontribusi Indonesia sebagai anggota IMO, penugasan junior program officer pada sekretariat IMO, pendanaan mandiri untuk mahasiswa Indonesia yang menjalani studi di WMU.
- Optimalisasi peran Otoritas Pelabuhan untuk peningkatan kinerja pelayanan kepelabuhanan pada sejumlah pelabuhan utama dan**

pengumpul untuk mendukung efisiensi pencapaian standar kinerja serta daya saing pelabuhan nasional.

- d. Optimalisasi peran Badan Usaha Penyelenggara Pelayanan Kepelabuhanan, khususnya dalam hal pengembangan fasilitas pelabuhan, peningkatan/ modernisasi pelayanan, serta efisiensi biaya logistik.**
- e. Optimalisasi pembinaan pelayaran rakyat sebagai salah satu sistem tradisional yang terbesar di dunia serta dalam rangka peningkatan keselamatan dan keamanan serta efektivitas pelayanan.
- f. Penguatan industri pelayaran nasional untuk meningkatkan daya saing dan konkretivitas nasional, khususnya terkait dengan ketersediaan dan umur kapal serta jenis dan ukuran kapal
- g. Peningkatan daya saing Badan Klasifikasi Nasional dalam menunjang penerapan regulasi di bidang perkapalan
- h. Transformasi kelembagaan UPP (Unit Penyelenggara Pelabuhan) khususnya pada lokasi yang akan dilakukan P3D pada pelabuhan lokal dan regional.
- i. Penguatan kelembagaan UPT Penjagaan Laut dan Pantai, khususnya dengan membentuk armada serta penambahan jumlah pangkalan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan patroli dan kegiatan lainnya di bidang PLP.
- j. Proses pembentukan BLU atau Kelembagaan Bentuk Lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, antara lain: pengelolaan Kenavigasian, Angkutan Laut, Balai Keselamatan Kerja Pelayaran, dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
- k. Penguatan tata kelola organisasi melalui integrasi teknologi informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- l. Perubahan struktur organisasi dalam rangka peningkatan efektivitas kerja dan penyederhanaan birokrasi.

3.6.2 KERANGKA KELEMBAGAAN DI KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK

Sesuai dengan kerangka kelembagaan yang akan diterapkan pada tingkat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana disebutkan pada **Bagian 3.6.1** di atas, maka kerangka kelembagaan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan mengikuti kebijakan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Perubahan kelembagaan akan dilaksanakan untuk periode 2020-2024 dengan memperhatikan 2 hal pokok berikut:

- (1) Optimalisasi peran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk peningkatan kinerja pelayanan kepelabuhanan untuk mendukung efisiensi pencapaian standar kinerja serta daya saing pelabuhan nasional.
- (2) Optimalisasi peran Badan Usaha Penyelenggara Pelayanan Kepelabuhanan, khususnya dalam hal pengembangan fasilitas pelabuhan, peningkatan/modernisasi pelayanan, serta efisiensi biaya logistik dengan dikoordinasikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
- (3) Penguatan koordinasi internal maupun dengan stakeholders dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
- (4) Penyederhanaan eselonisasi di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sesuai dengan arahan Presiden 2020-2024 akan mengikuti kebijakan dari Kementerian Perhubungan.

Adapun langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan dalam rangka penguatan kerangka kelembagaan di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok adalah:

- a. Mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Menteri PAN-RB
- b. Meningkatkan peran Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka pelaksanaan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagai Koordinator Penyelenggara Pelabuhan di wilayah koordinasinya;
- c. Meningkatkan peran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok selaku Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Priok dalam hal pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemerintahan, perusahaan, dan pengoperasian di Pelabuhan Tanjung Priok.

3.6.3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Perkiraan kebutuhan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk periode 2020-2024 disampaikan pada tabel 3.2 dibawah ini yang di dasarkan pada Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja tahun 2020 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok serta pertimbangan kebutuhan ideal dari masing-masing bidang/bagian serta seksi/subbag terkait. Diharapkan pemenuhan kebutuhan pegawai dapat dibantu pemenuhannya oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan baik melalui sistem rekrutmen umum maupun melalui program pembibitan yang dilakukan oleh BPSDMP.

Tabel 3.7 Kebutuhan formasi jabatan administrasi dan teknis

No.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI EKSISTING	JUMLAH IDEAL PEGAWAI	JUMLAH KEBUTUHAN 2020 s.d 2024
A	Kepala Bagian Tata Usaha				
a)	Kepala Subbagian Keuangan				
1	Bendahara Penerima	D3	1	1	1
2	Bendahara Pengeluaran	D3	1	1	1
3	Bendahara Material/PPBMN	D3	1	1	1
4	Pengelola Keuangan	D3	5	7	7
5	Petugas PNB	SMA	4	6	6
6	Penyusun BMN	D3	2	4	4
b)	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum				
1	Pengelola Administrasi Kepegawaian	SLTA	8	8	8
2	Pengelola Administrasi Perkantoran	SLTA	6	6	6
3	Pengelola Urusan Kerumahtanggaan	SLTA	6	4	4
4	Penyusun Laporan Tahunan	S1	0	1	1
5	Sekretaris	D3	0	2	2
c)	Kepala Subbagian Hukum dan Humas				
1	Penyusun Naskah Perjanjian Legal, Drafting Bantuan Hukum	S1 Hukum	1	3	3
2	Pengelola Bahan Publikasi dan Informasi	S1 Ilmu Komunikasi/ Semua Jurusan	1	3	3
3	Penyusun Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan Humas	S1 Ilmu Komunikasi/ Semua Jurusan	2	3	3
B	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan				
a)	Kepala Seksi Rencana dan Program				
1	Penyusun Rencana dan Program	S1 Teknik	3	6	6
2	Penyusun LKIP	S1	1	2	2
3	Penyiap Bahan Perencanaan	D3	0	2	2
4	Pengadministrasi Umum	D3	0	1	1
b)	Kepala Seksi Desain dan Pembangunan				
1	Pengevaluasi Perancangan Teknis	S1 Teknik Sipil / S1 Teknik	2	4	4

No.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI EKSISTING	JUMLAH IDEAL PEGAWAI	JUMLAH KEBUTUHAN 2020 s.d 2024
	Desain Konstruksi dan Fasilitas Pelabuhan				
2	Pengendali Dampak Lingkungan	S1 Teknik Lingkungan / S1 Teknik Perkapalan / D3/S1 Teknik	1	3	3
3	Pengadministrasi Umum	D3 Sederajat	0	1	1
c) Kepala Seksi Analisa, Evaluasi dan Tarif					
1	Penganalisa Tarif Jasa Kepelabuhan	D3/ S1 Teknik / Ekonomi / Manajemen Transportasi Laut / Ketatalaksanaan Pelayanan Niaga	0	2	2
2	Penyusun Bahan Evaluasi Sarana Prasarana	D3/ S1 Teknik / Ekonomi / Manajemen Transportasi Laut / Ketatalaksanaan Pelayanan Niaga	2	2	2
3	Pengevaluasi Tarif Pelabuhan	D3/ S1 Teknik / Ekonomi / Manajemen Transportasi Laut / Ketatalaksanaan Pelayanan Niaga	2	2	2
4	Pengadminsitrasi Umum	SLTA	0	1	1
C Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan					
a) Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan					
1	Pengadministrasi Data Tenaga Kerja Bongkar Muat	SMU Sederajat	5	5	5
2	Penyusun Data dan Laporan Angkutan Laut	SMU Sederajat	6	6	6
3	Pengawas Lalu Lintas dan Angkutan Laut	SMU Sederajat	0	2	2
4	Pengawas Tenaga Kerja Bongkar / Muat Barang	SMU Sederajat	0	2	2
5	Pengawas Kegiatan Penunjang Angkutan Laut	SMU Sederajat	0	2	2
6	Pengadministrasi Umum	SLTA	0	1	1
b) Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa					

No.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI EKSISTING	JUMLAH IDEAL PEGAWAI	JUMLAH KEBUTUHAN 2020 s.d 2024
1	Pengelola Pelayanan Sispro Jasa Kepelabuhanan	S-1	4	4	4
2	Pengelola Sistem Informasi	S-1 Hukum / S-1 Informatika / S-1 Ekonomi / S-1 Manajemen	1	2	2
3	Penyusun Bahan Promosi, Investasi, Konsesi Kepelabuhanan	S-1 Hukum / S-1 Ekonomi	2	2	2
4	Pengawas Kinerja Operasional Pelabuhan	S-1	0	2	2
5	Pengadministrasi Umum	SLTA	0	1	1
c) Kepala Seksi Fasilitas dan Pengawasan					
1	Pengumpul dan Pengelola Data	D III /D IV Tata Laksana Kepelabuhanan/ S I Manajemen Transportasi Laut	17	5	5
2	Petugas Pandu	DIII/DIV Tatalaksana Kepelabuhanan/ S1 Manajemen Transportasi Laut/ S1 Teknik Perkapalan	0	5	5
3	Pengawas Tertib Kepelabuhanan	DIII/DIV Tatalaksana Kepelabuhanan/ S1 Manajemen Transportasi Laut/ S1 Hukum	0	10	10
4	Pengawas Peralatan Bongkar Muat	DIII/DIV Tatalaksana Kepelabuhanan/ S1 Manajemen Transportasi Laut/ S1 Teknik Perkapalan	0	5	5
5	Pengawas Penggunaan DLKp dan DLKr	DIII/DIV Tatalaksana Kepelabuhanan/ S1 Manajemen Transportasi Laut	0	10	10
6	Pengadministrasi Umum	SMU/SMK Sederajat	0	2	2

Berdasarkan kebutuhan formasi diatas, diharapkan pemenuhan formasi pegawai sesuai kebutuhan jabatan dapat dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan. Mengingat kebutuhan SDM yang sangat mendesak dengan belum tersedianya tambahan formasi pegawai maka pemenuhannya sementara dapat dilakukan melalui perekrutan PPNPM/pegawai honorer.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK 2020-2024

Pencapaian target kinerja dari sasaran kegiatan (SK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diukur melalui pencapaian terhadap nilai/ukuran dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana telah disampaikan pada **Bagian 2** sebelumnya.

Angka/nilai target kinerja yang dicanangkan untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada setiap tahun selama periode 2020-2024 disampaikan pada **Tabel 4.1**. Target capaian IKK pada **Tabel 4.1** tersebut telah disesuaikan dengan indikator dan target terkait yang tercantum di dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) serta target kinerja yang tercantum di dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, maka target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk setiap tahun harus menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja (PK) di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dibutuhkan adanya suatu sistem pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang konsisten dan kontinyu, sedemikian sehingga dapat dievaluasi setiap saat serta diambil tindakan jika terjadi permasalahan. Capaian kinerja (dalam bentuk pengukuran terhadap capaian IKK) harus diukur dan dimasukkan ke dalam sistem *e-performance* secara rutin setiap bulan, dievaluasi dengan baik dan dilaporkan dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok pada setiap triwulanan dan akhir tahun anggaran.

Tabel 4.1 Target Kinerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SAT	BASELINE 2019	TARGET					TARGET S.D 2024
					2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1 Terwujudnya SDM OP Utama yang Kompeten dan Profesional	IKK. 1	Prosentase SDM yang memenuhi persyaratan jabatan (pangkat dan golongan, diklat umum dan teknis untuk setiap jabatan)	%	-	100	100	100	100	100	100
SK.2 Terwujudnya good governance dan clean government di OP Utama	IKK. 2	Penilaian persepsi korupsi dan pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi								
		- Indeks persepsi korupsi	nilai	-	4	4	4	4	4	4
		- Unit pengendali gratifikasi	%	-	100	100	100	100	100	100
SK.3 Terkelolanya anggaran Kemenhub secara optimal di OP Utama	IKK. 3	Prosentase penyerapan anggaran OP Utama	%	97	97	97	97	97	97	97
	IKK. 4	Persentase Pengelolaan BMN	%	100	100	100	100	100	100	100
	IKK. 5	Realisasi PNBPN	%	100	100	100	100	100	100	100
SK.4 Terwujudnya system digitalisasi informasi yang terintegrasi dengan ekosistem logistik nasional	IKK. 6	Tingkat kehandalan system informasi di pelabuhan	%	-	90	90	90	90	100	100
	IKK. 7	Persepsi publik terkait pelayanan informasi di OP Utama	Nilai	4	4	4	4	4	4	4
SK.5 Terwujudnya dokumen perencanaan pengembangan fasilitas pelabuhan	IKK. 8	Terwujudnya dokumen dan penetapan rencana induk pelabuhan dan DLKr DLkp								
		- Terwujudnya dokumen dan penetapan Rencana Induk Pelabuhan	%	-	70	70	100	100	100	100
		- Terwujudnya dokumen dan penetapan DLKr dan DLkp.	%	-	50	50	70	100	100	100
	IKK. 9	Terwujudnya dokumen rencana, program, serta desain, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengoperasian fasilitas pelabuhan	%	100	100	100	100	100	100	100
SK.6 Meningkatkan penyediaan fasilitas pelabuhan serta	IKK. 10	Persentase fasilitas daratan (terminal, gudang, bunker, perkantoran, jaringan jalan, dan	%	100	100	100	100	100	100	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SAT	BASELINE 2019	TARGET					TARGET S.D 2024	
					2020	2021	2022	2023	2024		
sarana pelayanan lainnya sesuai yang ditetapkan dalam masterplan pelabuhan, baik yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan maupun badan usaha pelabuhan		prasarana pendukung lainnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan									
	IKK. 11	Persentase fasilitas perairan (penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, SBNP, dermaga, dan prasarana pendukung lainnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	IKK. 12	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM, sarana bantu dan prasarana pemanduan									
		- SDM pemanduan	%	-	80	80	80	80	80	80	80
		- Sarana bantu pemanduan	%	80	80	80	80	80	80	80	80
		- Prasarana pemanduan	%	80	80	80	80	80	80	80	80
	IKK. 13	Tingkat kesiapan peralatan pelabuhan									
		- JICT (TPK)	%	80	80	80	80	80	80	80	80
		- KOJA (TPK)	%	80	80	80	80	80	80	80	80
		- IKT (Car Terminal)	%	85	85	85	85	85	85	85	85
		- Terminal MAL	%	80	80	80	80	80	80	80	80
		- IPC TPK Area I	%	70	70	70	70	70	70	70	70
		- IPC TPK Area II	%	75	75	75	75	75	75	75	75
		- PTP Wilayah I	%	80	80	80	80	80	80	80	80
- PTP Wilayah II		%	90	90	90	90	90	90	90	90	
	- NPCT1	%	80	80	80	80	80	80	80	80	
SK.7 Meningkatnya penjaminan	IKK. 14	Tingkat pemenuhan penjaminan keselamatan kerja di pelabuhan									
		- JICT (TPK)	%	-	80	80	80	80	80	80	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	BASELINE 2019	TARGET					TARGET S.D 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	
keselamatan kerja di pelabuhan	- KOJA (TPK)	%	-	80	80	80	80	80	80
	- IKT (Car Terminal)	%	-	80	80	80	80	80	80
	- Terminal MAL	%	-	80	80	80	80	80	80
	- Terminal MAL	%	-	80	80	80	80	80	80
	- IPC TPK	%	-	80	80	80	80	80	80
	- PTP	%	-	80	80	80	80	80	80
SK.8 Meningkatnya penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan	IKK. 15 Tercapainya kualitas lingkungan sesuai baku mutu yang ditetapkan.	- Indeks Baku mutu Udara	%	100	100	100	100	100	100
		- Indeks Baku mutu Air	%	100	100	100	100	100	100
		- Indeks Baku mutu kebisingan	%	100	100	100	100	100	100
	IKK. 16	Tingkat pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities	%	50	50	50	50	50	50
		IKK. 17	Tingkat penggunaan reception facilities di pelabuhan	%	25	25	25	25	25
	SK.9 Meningkatnya kinerja operasional pelabuhan dalam rangka pemenuhan standar kinerja yang ditetapkan	IKK. 18	Waiting Time						
- JICT (TPK)			Jam	1	1	1	1	1	1
- KOJA (TPK)			Jam	1	1	1	1	1	1
- IKT (Car Terminal)			Jam	1	1	1	1	1	1
- Terminal MAL			Jam	1	1	1	1	1	1
- IPC TPK			Jam	1	1	1	1	1	1
- PTP			Jam	1	1	1	1	1	1
- NPCT1 (Terminal Kalibaru)			Jam	1	1	1	1	1	1
IKK. 19		Approaching-Time							
		- JICT (TPK)	Jam	2	2	2	2	2	2
		- KOJA (TPK)	Jam	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
		- IKT (Car Terminal)	Jam	2	2	2	2	2	2
		- Terminal MAL	Jam	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
		- IPC TPK	Jam	2	2	2	2	2	2
		- PTP	Jam	2	2	2	2	2	2
- NPCT1 (Terminal Kalibaru)		Jam	2	2	2	2	2	2	
IKK. 20	Efektif Time : Berthing Time								
	- JICT (TPK)	%	85	85	85	85	85	85	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	BASELINE 2019	TARGET					TARGET S.D 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	
	- KOJA (TPK)	%	85	85	85	85	85	85	85
	- IKT (Car Terminal)	%	70	70	70	70	70	70	70
	- Terminal MAL	%	75	75	75	75	75	75	75
	- IPC TPK Area I TPK 009	%	55	55	55	55	55	55	55
	- IPC TPK Area I TPK Konvensional	%	65	65	65	65	65	65	65
	- IPC TPK Area II Konvensional	%	65	65	65	65	65	65	65
	- IPC TPK Area II TPK	%	70	70	70	70	70	70	70
	- PTP Wilayah I	%	67	67	67	67	67	67	67
	- PTP Wilayah II Dalam Negeri	%	67	67	67	67	67	67	67
	- PTP Wilayah II Luar Negeri	%	68	68	68	68	68	68	68
	- NPCT1	%	85	85	85	85	85	85	85
SK.10 Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Pelabuhan	IKK. 21	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose/ konvensional General Cargo							
		- PTP Wilayah I	(T/G/J)	65	65	65	65	65	65
		- PTP Wilayah II Dalam Negeri	(T/G/J)	70	70	70	70	70	70
		- PTP Wilayah II Luar Negeri	(T/G/J)	140	140	140	140	140	140
	IKK. 22	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Bag Cargo							
		- PTP Wilayah I	(T/G/J)	67	67	67	67	67	67
		- PTP Wilayah II Dalam Negeri	(T/G/J)	40	40	40	40	40	40
		- PTP Wilayah II Luar Negeri	(T/G/J)	57	57	57	57	57	57
	IKK. 23	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Un Caries							
		- IKT (Car Terminal)	(U/S/H)	125	125	125	125	125	125
		- PTP Wilayah I	(T/G/J)	35	35	35	35	35	35
		- PTP Wilayah II Dalam Negeri	(T/G/J)	35	35	35	35	35	35
	IKK. 24	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Cair							

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	BASELINE 2019	TARGET					TARGET S.D 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	
	- PTP Wilayah I	(T/G/J)	65	65	65	65	65	65	65
	- PTP Wilayah II Dalam Negeri	(T/G/J)	65	65	65	65	65	65	65
	- PTP Wilayah II Luar Negeri	(T/G/J)	135	135	135	135	135	135	135
IKK. 25	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Kering								
	- PTP Wilayah I	(T/J)	120	120	120	120	120	120	120
	- PTP Wilayah II Dalam Negeri	(T/J)	200	200	200	200	200	200	200
	- PTP Wilayah II Luar Negeri	(T/J)	125	125	125	125	125	125	125
IKK. 26	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Livestock								
	- PTP Wilayah II Luar Negeri	(H/G/J)	125	125	125	125	125	125	125
IKK. 27	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Un Carries Alat Berat								
	- PTP Wilayah I	(U/S/H)	4	4	4	4	4	4	4
	- IKT (Car Terminal)	(U/S/H)	4	4	4	4	4	4	4
IKK. 28	Kinerja bongkar muat barang Petikemas								
	- JICT (TPK)	(B/C/H)	26	26	26	26	26	26	26
	- KOJA (TPK)	(B/C/H)	24	24	24	24	24	24	24
	- Terminal MAL	(B/C/H)	23	23	23	23	23	23	23
	- IPC TPK Area I TPK 009	(B/C/H)	18	18	18	18	18	18	18
	- IPC TPK Area I TPK Konvensional	(B/C/H)	19	19	19	19	19	19	19
	- IPC TPK Area II Konvensional	(B/C/H)	18	18	18	18	18	18	18
	- IPC TPK Area II TPK	(B/C/H)	22	22	22	22	22	22	22
	- PTP Wilayah I	(B/C/H)	15	15	15	15	15	15	15
	- PTP Wilayah II	(B/C/H)	15	15	15	15	15	15	15
- NPCT 1	(B/C/H)	26	26	26	26	26	26	26	
IKK. 29	Rata-rata receiving peti kemas								
	- JICT (TPK)	Menit	87	87	87	87	87	87	87
	- KOJA (TPK)	Menit	60	60	60	60	60	60	60

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	BASELINE 2019	TARGET					TARGET S.D 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	
	- Terminal MAL	Menit	30	30	30	30	30	30	30
	- IPC TPK Area I	Menit	50	50	50	50	50	50	50
	- IPC TPK Area II	Menit	60	60	60	60	60	60	60
	- NPCT 1	Menit	60	60	60	60	60	60	60
IKK. 30	Rata – rata delivery peti kemas								
	- JICT (TPK)	Menit	120	120	120	120	120	120	120
	- KOJA (TPK)	Menit	120	120	120	120	120	120	120
	- Terminal MAL	Menit	60	60	60	60	60	60	60
	- IPC TPK Area I	Menit	50	50	50	50	50	50	50
	- IPC TPK Area II	Menit	60	60	60	60	60	60	60
	- NPCT 1	Menit	75	75	75	75	75	75	75
IKK. 31	Tingkat penggunaan dermaga (BOR)								
	- JICT (TPK)	%	70	70	70	70	70	70	70
	- KOJA (TPK)	%	70	70	70	70	70	70	70
	- IKT (Car Terminal)	%	70	70	70	70	70	70	70
	- Terminal MAL	%	70	70	70	70	70	70	70
	- IPC TPK Area I TPK 009	%	60	60	60	60	60	60	60
	- IPC TPK Area I TPK Konvensional	%	60	60	60	60	60	60	60
	- IPC TPK Area II Konvensional	%	60	60	60	60	60	60	60
	- IPC TPK Area II TPK	%	60	60	60	60	60	60	60
	- PTP Wilayah I	%	70	70	70	70	70	70	70
	- PTP Wilayah II	%	70	70	70	70	70	70	70
	- NPCT1	%	70	70	70	70	70	70	70
	IKK. 32	Tingkat penggunaan gudang (SOR)							
- PTP Wilayah I		%	70	70	70	70	70	70	70
- PTP Wilayah II		%	70	70	70	70	70	70	70
IKK. 33	Tingkat penggunaan lapangan (YOR)								
	- JICT (TPK)	%	65	65	65	65	65	65	65
	- KOJA (TPK)	%	65	65	65	65	65	65	65
	- IKT (Car Terminal)	%	65	65	65	65	65	65	65
	- Terminal MAL	%	65	65	65	65	65	65	65
	- IPC TPK Area I TPK 009	%	60	60	60	60	60	60	60
	- IPC TPK Area I TPK Konvensional	%	65	65	65	65	65	65	65

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	BASELINE 2019	TARGET					TARGET S.D 2024	
				2020	2021	2022	2023	2024		
	- IPC TPK Area II Konvensional	%	65	65	65	65	65	65	65	
	- IPC TPK Area II TPK	%	65	65	65	65	65	65	65	
	- PTP Wilayah I	%	65	65	65	65	65	65	65	
	- PTP Wilayah II	%	65	65	65	65	65	65	65	
	- NPCT1	%	65	65	65	65	65	65	65	
SK.11 Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan laut oleh kantor Otoritas Pelabuhan	IKK. 34	Persentase pelayanan kapal yang menggunakan Sistem Inaportnet	%	100	100	100	100	100	100	100
	IKK. 35	Persentase Pelayanan kegiatan B/M barang yang menggunakan sistem Inaportnet	%	100	100	100	100	100	100	100
	IKK.36	Tercapainya penyelenggaraan angkutan Laut Lebaran serta Natal dan Tahun Baru yang lancar, aman, nyaman dan selamat								
		- Tercapainya penyelenggaraan angkutan lebaran yang lancar, aman, nyaman dan selamat	%	-	100	100	100	100	100	100
		- Tercapainya penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru yang lancar, aman, nyaman dan selamat	%	-	100	100	100	100	100	100

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Pada periode Tahun 2021-2024 terdapat Restrukturisasi Program dan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok juga mengikuti menjadi program sebagai berikut:

1. Program Infrastruktur Konektivitas;
2. Program Dukungan Manajemen.

Sehingga terperinci masing-masing kegiatan tersebut dalam Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dokumen penganggaran dibagi menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO).

Kebutuhan pendanaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 untuk melaksanakan berbagai kegiatan strategis maupun rutin diperkirakan sebesar Rp. 1,263 Triliun yang bersumber dari Rupiah Murni, PNBPN, maupun sumber pendanaan lainnya seperti pembiayaan dari KPBU, Swasta dan Badan Usaha Pelabuhan. Rangkuman kebutuhan pendanaan untuk masing-masing kegiatan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagaimana **Tabel 4.2.** dan adapun detail kebutuhan pendanaan untuk setiap ítem di setiap bidang/bagian Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok disampaikan pada **Lampiran 3.**

Adapun kegiatan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok selama periode Renstra 2020-2024 diantaranya adalah:

- a. Bidang Perencanaan dan Pembangunan
 - Pengadaan Rumah Dinas Pejabat Struktural Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
 - Rehabilitasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
 - Pengalihan aset jalan raya kalijapat (jalan akses menuju rencana Terminal Ancol Timur) dari Pemprov DKI ke Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
 - Pembangunan jalan akses menuju Terminal ancol Timur;
 - Penerapan Ecoport dan Smart Port di Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Pelaksanaan Forum Ecoport secara berkala;
 - Pemeliharaan dan peningkatan alur Kalijapat;
 - Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Updating dan Penetapan DLKr-DLKp Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Penyusunan Rencana Tapak dan Teknis Terinci Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Pemantauan Pembangunan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Penyelesaian RIP dan DLKr-DLKp pelabuhan di wilayah koordinasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
 - Penyusunan kajian kerjasama pengembangan Terminal Baru di Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Evaluasi system drainase Pelabuhan Tanjung Priok;

- Pengimplementasian pembangunan dan pengembangan pelabuhan sesuai Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Peningkatan kerjasama konsesi dan kerjasama bentuk lainnya dengan Badan Usaha Pelabuhan;
 - Pemenuhan dokumen lingkungan untuk seluruh instansi di Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Penyusunan dokumen studi RIP, DLKrDLKp, studi lingkungan, maupun studi kerjasama konsesi/bentuk kerjasama lainnya pada pelabuhan yang berada di wilayah koordinasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
 - Penyusunan Port Directory Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Penyelenggaraan pelatihan/bimtek: mitigasi bencana infrastruktur transportasi laut, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, penyusunan dan evaluasi tarif jasa kepelabuhanan.
- b. Bidang Lala, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
- Penerapan single TID di Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Monitoring kinerja operasional pelabuhan;
 - Peningkatan pengawasan operasional pelabuhan;
 - Peningkatan pengawasan pemanduan pelabuhan;
 - Penyelenggaraan posko terpadu angkutan lebaran serta natal dan tahun baru;
 - Pengembangan sistem digitalisasi layanan di semua terminal di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok melalui Badan Usaha Pelabuhan.
- c. Bagian Tata Usaha
- Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK dan Itjen Kemenhub;
 - Evaluasi dan cocklit data operasional dan pembayaran PNBK konsesi di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Evaluasi dan cocklit data operasional dan pembayaran PNBK konsesi Penyelenggara Pelabuhan yang berada di wilayah koordinasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
 - Penerapan ISO 9001 (Manajemen Mutu), ISO 14001 (Manajemen Lingkungan), dan ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
 - Penataan database kepegawaian yang handal;
 - Peningkatan penggunaan e-office;
 - Penguatan implementasi SPIP;
 - Pengembangan system monitoring kinerja pegawai yang handal dan implementatif sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Penyelenggaraan OP Award bagi stakeholder di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok yang mempunyai kontribusi terbaik/inovasi terbaik.

Tabel 4.2 Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024

No.	Kegiatan/Program	Kebutuhan Pendanaan Per Tahun (dalam Milyar)						Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	Total	
1	Program Infrastruktur Konektivitas	1,3	12,5	2	31	966	1012,8	
2	Program Dukungan Manajemen	12,15	12,25	12,25	12,40	12,40	62,45	
3	Penyusunan Dokumen Norma / Standar / Prosedur / Ketentuan	9,8	13,5	11,3	13,3	9	55,9	
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,9	0,9	0,9	0,9	0,9	5,5	
5	Pengadaan Kendaraan Operasional	1,5	-	1,2	-	0,1	2,8	
6	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepelabuhanan	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	11	
7	Layanan Perkantoran	20,5	21,6	22,5	23,7	25	113,3	
	Jumlah	49,35	62,95	52,55	83,5	1015,6	1263,75	

BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandate dari dokumen perencanaan terkait dan juga penugasan sesuai tugas dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sesuai PM. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tentang Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Laut 2020–2024.

Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional di sektor transportasi laut, khususnya kegiatan di bidang Kepelabuhanan, serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk melaksanakan Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2020 s/d 2024 dan menjadi acuan bagi Bidang/Bagian di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 sampai tahun 2024.
3. Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020-2024 menjadi acuan dalam Penetapan Kinerja (PK) pada setiap Tahun 2020 s/d 2024, yang diukur pencapaiannya secara rutin melalui e-performance dan dilaporkan capaian akhirnya di setiap tahun melalui dokumen LKIP dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
4. Seluruh jajaran di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok berkewajiban menjaga konsistensi antara Renstra 2020-2024 ini dengan Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

5.2. MEKANISME EVALUASI

Dokumen Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ini dapat dilakukan tinjau ulang (reviu) setidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku (pertengahan Tahun 2022) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, menyesuaikan dengan perkembangan dan kebijakan, serta menyesuaikan daftar kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2024). Evaluasi tahunan pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LKIP (Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020–2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		SAT	TARGET					Alokasi (dalam Milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan														
	SK.1 Terwujudnya SDM OP Utama yang Kompeten dan Profesional													
	IKK. 1	Prosentase SDM yang memenuhi persyaratan jabatan (pangkat dan golongan, diklat umum dan teknis untuk setiap jabatan)	100	100	100	100	100	100	3	3	3	3,1	3,1	Bagian Tata Usaha
	SK.2 Terwujudnya good governance dan clean government di OP Utama													
	IKK. 2	Penilaian persepsi korupsi dan pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi							1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	Bagian Tata Usaha
		- Indeks persepsi korupsi	nilai	4	4	4	4	4						
		- Unit pengendali gratifikasi	%	100	100	100	100	100						
	SK.3 Terkelolanya anggaran Kemenhub secara optimal di OP Utama													
	IKK. 3	Prosentase penyerapan anggaran OP Utama	%	97	97	97	97	97	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	Bagian Tata Usaha
	IKK. 4	Persentase Pengelolaan BMN	%	100	100	100	100	100	9,4	7,2	8,6	7,8	8,3	Bagian Tata Usaha
	IKK. 5	Realisasi PNPB	%	100	100	100	100	100	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Bagian Tata Usaha
	SK.4 Terwujudnya system digitalisasi informasi yang terintegrasi dengan ekosistem logistik nasional													
	IKK. 6	Tingkat kehandalan system informasi di pelabuhan	%	90	90	90	90	100	-	-	-	-	-	Bagian Tata Usaha dan Bid. Lala
	IKK. 7	Persepsi publik terkait pelayanan informasi di OP Utama	Nilai	4	4	4	4	4	1,5	1,2	0,6	1,5	0,4	Bidang Perencanaan dan Pembangunan
	SK.5 Terwujudnya dokumen perencanaan pengembangan fasilitas pelabuhan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		SAT	TARGET					Alokasi (dalam Milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKK. 8	Terwujudnya dokumen dan penetapan rencana induk pelabuhan dan DLKr DLkp							0,3	4,3	1,5	1,5	1,5	Bidang Perencanaan dan Pembangunan
		- Terwujudnya dokumen dan penetapan Rencana Induk Pelabuhan	%	70	70	100	100	100						
		- Terwujudnya dokumen dan penetapan DLKr dan DLkp.	%	50	50	70	100	100						
	IKK. 9	Terwujudnya dokumen rencana, program, serta desain, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengoperasian fasilitas pelabuhan	%	100	100	100	100	100	5,3	6,3	3,1	4	3	Bidang Perencanaan dan Pembangunan
	SK.6 Meningkatnya penyediaan fasilitas pelabuhan serta sarana pelayanan lainnya sesuai yang ditetapkan dalam masterplan pelabuhan, baik yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan maupun badan usaha pelabuhan													
	IKK.10	Persentase fasilitas daratan (terminal, gudang, bunker, perkantoran, jaringan jalan, dan prasarana pendukung lainnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan	%	100	100	100	100	100	1,6	12,8	2,3	31,3	966,3	Bidang Perencanaan dan Pembangunan
	IKK.11	Persentase fasilitas perairan (penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, SBNP, dermaga, dan prasarana pendukung lainnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara	%	100	100	100	100	100	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	Bidang Perencanaan dan Pembangunan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		SAT	TARGET					Alokasi (dalam Milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan													
	IKK.12	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM, sarana bantu dan prasarana pemanduan							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
		- SDM pemanduan	%	-	80	80	80	80							
		- Sarana bantu pemanduan	%	80	80	80	80	80							
		- Prasarana pemanduan	%	80	80	80	80	80							
	IKK.13	Tingkat kesiapan peralatan pelabuhan							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
		- JICT (TPK)	%	80	80	80	80	80							
		- KOJA (TPK)	%	80	80	80	80	80							
		- IKT (Car Terminal)	%	85	85	85	85	85							
		- Terminal MAL	%	80	80	80	80	80							
		- IPC TPK Area I	%	70	70	70	70	70							
		- IPC TPK Area II	%	75	75	75	75	75							
		- PTP Wilayah I	%	80	80	80	80	80							
		- PTP Wilayah II	%	90	90	90	90	90							
		- NPCT1	%	80	80	80	80	80							
	SK.7	Meningkatnya penjaminan keselamatan kerja di pelabuhan													
	IKK.14	Tingkat pemenuhan penjaminan keselamatan kerja di pelabuhan								0,1	0,1	0,1	0,1		Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
		- JICT (TPK)	%	80	80	80	80	80							
		- KOJA (TPK)	%	80	80	80	80	80							
		- IKT (Car Terminal)	%	80	80	80	80	80							
		- Terminal MAL	%	80	80	80	80	80							
		- IPC TPK	%	80	80	80	80	80							
		- PTP	%	80	80	80	80	80							
		- NPCT1	%	80	80	80	80	80							
	SK.8	Meningkatnya penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan													
	IKK.15	Tercapainya kualitas lingkungan sesuai baku mutu yang ditetapkan.							2,45	5,05	3,05	3,05	3,05		Bidang Perencanaan dan Pembangunan
		- Indeks Baku mutu Udara	%	100	100	100	100	100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	SAT	TARGET					Alokasi (dalam Milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Indeks Baku mutu Air													
	- Indeks Baku mutu kebisingan	%	100	100	100	100	100							
	IKK.16 Tingkat pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities	%	50	50	50	50	50							
	IKK.17 Tingkat penggunaan reception facilities di pelabuhan	%	25	25	25	25	25							
	SK.9 Meningkatnya kinerja operasional pelabuhan dalam rangka pemenuhan standar kinerja yang ditetapkan													
	IKK.18 Waiting Time							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
	- JICT (TPK)	Jam	1	1	1	1	1							
	- KOJA (TPK)	Jam	1	1	1	1	1							
	- IKT (Car Terminal)	Jam	1	1	1	1	1							
	- Terminal MAL	Jam	1	1	1	1	1							
	- IPC TPK	Jam	1	1	1	1	1							
	- PTP	Jam	1	1	1	1	1							
	- NPCT1	Jam	1	1	1	1	1							
	IKK.19 Approaching-Time							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
	- JICT (TPK)	Jam	2	2	2	2	2							
	- KOJA (TPK)	Jam	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8							
	- IKT (Car Terminal)	Jam	2	2	2	2	2							
	- Terminal MAL	Jam	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7							
	- IPC TPK	Jam	2	2	2	2	2							
	- PTP	Jam	2	2	2	2	2							
	- NPCT1	Jam	2	2	2	2	2							
	IKK.20 Efektif Time : Berthing Time							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
	- JICT (TPK)	%	85	85	85	85	85							
	- KOJA (TPK)	%	85	85	85	85	85							
	- IKT (Car Terminal)	%	70	70	70	70	70							
	- Terminal MAL	%	75	75	75	75	75							
	- IPC TPK Area I TPK 009	%	55	55	55	55	55							
	- IPC TPK Area I TPK Konvensional	%	65	65	65	65	65							
	- IPC TPK Area II Konvensional	%	65	65	65	65	65							
	- IPC TPK Area II TPK	%	70	70	70	70	70							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		SAT	TARGET					Alokasi (dalam Milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		- PTP Wilayah I	%	67	67	67	67	67						
		- PTP Wilayah II Dalam Negeri	%	67	67	67	67	67						
		- PTP Wilayah II Luar Negeri	%	68	68	68	68	68						
		- NPCT1	%	85	85	85	85	85						
	SK.10 Pemanfaatan Pelabuhan	Meningkatnya Efektivitas Fasilitas Pelayanan												
	IKK.21	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose/ konvensional General Cargo							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
		- PTP Wilayah I	(T/G/J)	65	65	65	65	65						
		- PTP Wilayah II Dalam Negeri	(T/G/J)	70	70	70	70	70						
		- PTP Wilayah II Luar Negeri	(T/G/J)	140	140	140	140	140						
	IKK.22	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Bag Cargo							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
		- PTP Wilayah I	(T/G/J)	67	67	67	67	67						
		- PTP Wilayah II Dalam Negeri	(T/G/J)	40	40	40	40	40						
		- PTP Wilayah II Luar Negeri	(T/G/J)	57	57	57	57	57						
	IKK.23	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Un Caries							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
		- IKT (Car Terminal)	(U/S/H)	125	125	125	125	125						
		- PTP Wilayah I	(T/G/J)	35	35	35	35	35						
		- PTP Wilayah II Dalam Negeri	(T/G/J)	35	35	35	35	35						
	IKK.24	Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Cair							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
		- PTP Wilayah I	(T/G/J)	65	65	65	65	65						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	SAT	TARGET					Alokasi (dalam Milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- PTP Wilayah II Dalam Negeri	(T/G/J)	65	65	65	65	65							
	- PTP Wilayah II Luar Negeri	(T/G/J)	135	135	135	135	135							
	IKK.25 Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Kering							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
	- PTP Wilayah I	(T/J)	120	120	120	120	120							
	- PTP Wilayah II Dalam Negeri	(T/J)	200	200	200	200	200							
	- PTP Wilayah II Luar Negeri	(T/J)	125	125	125	125	125							
	IKK.26 Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Livestock							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
	- PTP Wilayah II Luar Negeri	(H/G/J)	125	125	125	125	125							
	IKK.27 Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Un Carries Alat Berat							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
	- PTP Wilayah I	(U/S/H)	4	4	4	4	4							
	- IKT (Car Terminal)	(U/S/H)	4	4	4	4	4							
	IKK.28 Kinerja bongkar muat barang Petikemas							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
	- JICT (TPK)	(B/C/H)	26	26	26	26	26							Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
	- KOJA (TPK)	(B/C/H)	24	24	24	24	24							
	- Terminal MAL	(B/C/H)	23	23	23	23	23							
	- IPC TPK Area I TPK 009	(B/C/H)	18	18	18	18	18							
	- IPC TPK Area I TPK Konvensional	(B/C/H)	19	19	19	19	19							
	- IPC TPK Area II Konvensional	(B/C/H)	18	18	18	18	18							
	- IPC TPK Area II TPK	(B/C/H)	22	22	22	22	22							
	- PTP Wilayah I	(B/C/H)	15	15	15	15	15							
	- PTP Wilayah II	(B/C/H)	15	15	15	15	15							
	- NPCT 1	(B/C/H)	26	26	26	26	26							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		SAT	TARGET					Alokasi (dalam Milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	IKK.29	Rata-rata receiving peti kemas							0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan	
		- JICT (TPK)	Menit	87	87	87	87	87							
		- KOJA (TPK)	Menit	60	60	60	60	60							
		- Terminal MAL	Menit	30	30	30	30	30							
		- IPC TPK Area I	Menit	50	50	50	50	50							
		- IPC TPK Area II	Menit	60	60	60	60	60							
	IKK.30	Rata – rata delivery peti kemas								0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
		- JICT (TPK)	Menit	120	120	120	120	120							
		- KOJA (TPK)	Menit	120	120	120	120	120							
		- Terminal MAL	Menit	60	60	60	60	60							
		- IPC TPK Area I	Menit	50	50	50	50	50							
		- IPC TPK Area II	Menit	60	60	60	60	60							
	IKK.31	Tingkat penggunaan dermaga (BOR)								0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
		- JICT (TPK)	%	70	70	70	70	70							
		- KOJA (TPK)	%	70	70	70	70	70							
		- IKT (Car Terminal)	%	70	70	70	70	70							
		- Terminal MAL	%	70	70	70	70	70							
		- IPC TPK Area I TPK Konvensional	%	60	60	60	60	60							
		- IPC TPK Area II Konvensional	%	60	60	60	60	60							
- IPC TPK Area II TPK		%	60	60	60	60	60								
- PTP Wilayah I		%	70	70	70	70	70								
- PTP Wilayah II		%	70	70	70	70	70								
- NPCT1		%	70	70	70	70	70								
IKK.32	Tingkat penggunaan gudang (SOR)								0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan	
	- PTP Wilayah I	%	70	70	70	70	70								
	- PTP Wilayah II	%	70	70	70	70	70								
IKK.33	Tingkat penggunaan lapangan (YOR)								0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan	
	- JICT (TPK)	%	65	65	65	65	65								
	- IKT (Car Terminal)	%	65	65	65	65	65								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		SAT	TARGET					Alokasi (dalam Milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		- Terminal MAL	%	65	65	65	65	65						
		- IPC TPK Area I TPK 009	%	60	60	60	60	60						
		- IPC TPK Area I TPK Konvensional	%	65	65	65	65	65						
		- IPC TPK Area II Konvensional	%	65	65	65	65	65						
		- IPC TPK Area II TPK	%	65	65	65	65	65						
		- PTP Wilayah I	%	65	65	65	65	65						
		- PTP Wilayah II	%	65	65	65	65	65						
		- NPCT1	%	65	65	65	65	65						
	SK.11 Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan laut oleh kantor Otoritas Pelabuhan													
	IKK.34	Persentase pelayanan kapal yang menggunakan Sistem Inaportnet	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
	IKK.35	Persentase Pelayanan kegiatan B/M barang yang menggunakan sistem Inaportnet	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
	IKK.36	Tercapainya penyelenggaraan angkutan Laut Lebaran serta Natal dan Tahun Baru yang lancar, aman, nyaman dan selamat							2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
		- Tercapainya penyelenggaraan angkutan lebaran yang lancar, aman, nyaman dan selamat	%	100	100	100	100	100						
		- Tercapainya penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru yang lancar, aman, nyaman dan selamat	%	100	100	100	100	100						

LAMPIRAN 2

Matriks Kerangka Regulasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2020 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Standard Operation Procedure (SOP) Pengelolaan Limbah di Pelabuhan Tanjung Priok	Diperlukannya penyempurnaan terhadap SOP Pengelolaan Limbah yang telah diterbitkan	Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Tahun 2021
2	Standard Operation Procedure (SOP) Pelayanan Kapal Penumpang, Barang di Pelabuhan Tanjung Priok	Diperlukannya penyempurnaan terhadap SOP Pelayanan Kapal, Penumpang dan Barang yang telah diterbitkan	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Tahun 2022
3	Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terkait Kerjasama Badan Usaha Pelabuhan dengan Pihak Ketiga di lingkup area konsesi	Dalam memenuhi amanat Perjanjian Konsesi dimana setiap Badan Usaha Pelabuhan selaku pihak kedua yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di area konsesi diperlukan rekomendasi dari Pihak Pertama terkait kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan	Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Tahun 2022
4	Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terkait Pengelolaan Lingkungan diwilayah Pelabuhan Tanjung Priok	Diperlukannya pengaturan terkait pengelolaan lingkungan bagi seluruh Badan Usaha dan instansi yang berada di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok	Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Tahun 2021
5	Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terkait Penyediaan Sistem Digitalisasi Terminal Operasi	Diperlukannya pengaturan terkait penyediaan sistem digitalisasi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan/Terminal Operator di bawah Badan Usaha Pelabuhan serta Badan Usaha lainnya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Tahun 2022
6	Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terkait Pemenuhan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pelabuhan	Diperlukannya pengaturan terkait pemenuhan standar keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh instansi dan Badan Usaha di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok	Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Tahun 2022
7	Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama	Menunjuk Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 tahun 2021 tentang tata naskah dinas di lingkungan	Bagian Tata Usaha	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kantor	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Tanjung Priok terkait tata naskah dan persuratan di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Kementerian Perhubungan, maka diperlukan pengaturan hal yang serupa di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagai pedoman dalam pelaksanaan administrasi dan persuratan		Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	
8	Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terkait pengembangan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok diperlukan pengaturan lebih lanjut agar sistem dan kebijakan berlangsung secara berkesinambungan	Bagian Tata Usaha	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Tahun 2021
9	Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terkait peningkatan kinerja pegawai	Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan no. 73 tahun 2017 tentang peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai sesuai dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang telah ditetapkan	Bagian Tata Usaha	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Tahun 2021

LAMPIRAN 3

Indikasi Anggaran pada masing-masing kegiatan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

No	Program/ Kegiatan Strategis	IKK Terkait	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Total indikasi Anggaran 2020-2024 (Rp. Milyar)	Target 2020 - 2024
			Indikasi Anggaran (Rp. Milyar)	Target										
1	Program Infrastruktur Konektivitas													
	Pembangunan Pagar dan Taman Kantor	IKK.7, 10	-	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	1.5	1
	Rehabilitasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	IKK.7, 10	1,3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1
	Pengadaan Rumah Dinas Pejabat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	IKK.7, 10	-	-	11	4	-	-	-	-	-	-	11	4
	Pembangunan dan pemeliharaan dermaga service boat di Kalijapat	IKK.10	-	-	-	-	1	1	15	1	1	1	17	3
	Rehabilitasi Breakwater (Penahan Gelombang)	IKK.10	-	-	-	-	-	-	-	-	50	1	50	1
	Pembongkaran dan pembangunan breakwater Ancol Timur	IKK.10	-	-	-	-	-	-	-	-	300	1	300	1
	Pemeliharaan dan peningkatan alur Kalijapat	IKK.10	-	-	-	-	-	-	15	1	15	1	30	1
	Pengalihan asset Jalan akses Kalijapat (jalan akses menuju rencana Terminal Ancol Timur) dari Pemprov DKI ke Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	IKK.10	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	1
	Pembangunan Jalan Akses menuju Terminal Ancol Timur	IKK.10	-	-	-	-	-	-	-	-	600	1	600	1
2.	Program Dukungan Manajemen													
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja													
	Jamuan Rapat	IKK. 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.4	5
	Penyusunan RKA	IKK. 3	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	1.5	5
	Penyusunan Laporan Tahunan Kantor OP	IKK. 3	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	1.5	5
	Penyusunan LAKIP	IKK. 7	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	1	5
	Penyusunan PK dan RKT	IKK. 7	0,1	1	0,1	1			0,1	1	0,1	1	0,5	5
	Penyusunan Renstra	IKK. 7			0,1	1			0,1	1	0,1	1	0,5	5
	FGD Penyusunan HPL Terminal Kalibaru	IKK. 9	0,1	1			0,1	1					0,2	2
	Forum Ecoport Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 15	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	2.5	5

No	Program/ Kegiatan Strategis	IKK Terkait	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Total indikasi Anggaran 2020-2024 (Rp. Milyar)	Target 2020 - 2024
			Indikasi Anggaran (Rp. Milyar)	Target										
	Penyelenggaraan OP AWARD	IKK. 2, 7, 15 dan 28	0.05	1	0.05	1	0.05	1	0.05	1	0.05	1	0.25	5
	Evaluasi Pelaksanaan Standar Kinerja Pelabuhan Tanjung Priok	IKK 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33	0,7	1	0,7	1	0,7	1	0,7	1	0,7	1	3.5	5
	Evaluasi Pemenuhan Standarisasi di Peralatan di Pelabuhan	IKK 14	-	-	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,5	4
	Forum Kehumasan Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 2	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.4	1	2	5
	Forum Kehumasan Wilayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Bangka Belitung	IKK. 2	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	2.5	5
	Forum Kehumasan Wilayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Pontianak Kalimantan Barat	IKK. 2	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	2.5	5
	Rapat Pembahasan Monitoring Pelaksanaan Penetapan RIP dan DLKR-DLKP di Wilker OP Utama Tanjung Priok	IKK. 8	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	1.6	5
	Rapat Pembahasan Monitoring Progress Pembangunan Faspel di Wilker OP. Utama Tg. Priok	IKK. 9	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	1.5	5
	FGD Pelaksanaan Konsesi Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan Yang Diusahakan Oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)	IKK. 5	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	2.5	5
	FGD Pelaksanaan Konsesi di Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 5	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	2.5	5
	Monitoring Angkutan Lebaran	IKK. 36	0.7	1	0.7	1	0.7	1	0.7	1	0.7	1	3.5	5
	Monitoring Angkutan Natal dan Tahun Baru	IKK. 36	0.7	1	0.7	1	0.7	1	0.7	1	0.7	1	3.5	5
	Monitoring Pemnbangunan Faspel di Wilker OP Utama Tanjung Priok	IKK 10 dan 11	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	1.5	5
	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	IKK. 36	0,9	1	0,9	1	0,9	1	0,9	1	0,9	1	4,5	5
	Penyelenggaraan Angkutan Natal	IKK. 36	0,4	1	0,4	1	0,4	1	0,4	1	0,4	1	2	5

No	Program/ Kegiatan Strategis	IKK Terkait	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Total indikasi Anggaran 2020-2024 (Rp. Milyar)	Target 2020 - 2024
			Indikasi Anggaran (Rp. Milyar)	Target										
	Sarana Peningkatan Jiwa Korsa Pegawai	IKK.1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	0.9	1	0.9	1	4.2	5
	Sistem Akuntansi Instansi (SAI) / Pengelola Keuangan													
	Pengelolaan PNPB	IKK. 5	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	7.5	5
	Komponen Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAI)	IKK. 3	0.4	1	0.4	1	0.5	1	0.45	1	0.45	1	2,2	5
3	Penyusunan Dokumen Norma / Standar / Prosedur / Ketentuan													
	Penyusunan Dokumen Studi/Kajian													
	Pemantauan Kedalaman Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 9	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	4.5	5
	Penyusunan Rencana Tapak Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 8	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
	Studi Evaluasi Dermaga Existing Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5
	Pemantauan Kualitas Lingkungan di Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 15	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	4.5	5
	Studi Kerjasama Pengelolaan Terminal Ancol Timur	IKK. 9	-	-	-	-	0,8	1	-	-	-	-	0.8	1
	Detail Engineering Design Terminal Ancol Timur	IKK. 9	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
	Kajian Optimalisasi dan Kebutuhan lahan Reception Facility di Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 16 dan 17	0.8	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	3,2	5
	Kajian Peta Potensi dan Pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 9	-	-	2.5	1	-	-	-	-	-	-	2.5	1
	Evaluasi Sistem Drainase Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 9	-	-	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	3,2	4
	Pemeliharaan ISO 9001 Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 7	0,3	1	-	-	0,3	1	0,3	1	-	-	0,9	3
	Upgrading ISO 9001 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	IKK. 7	-	-	0,8	1	-	-	-	-	0,8	1	1,6	2
	Tindak Lanjut Ecoport Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 15	-	-	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	3,2	4
	Tindak Lanjut Penerapan Konsep Smartport Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 15	-	-	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	3,2	4
	Kajian Struktur Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 7	0,9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1
	Studi Reviu AMDAL Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 15	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

No	Program/ Kegiatan Strategis	IKK Terkait	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Total indikasi Anggaran 2020-2024 (Rp. Milyar)	Target 2020 - 2024
			Indikasi Anggaran (Rp. Milyar)	Target										
	Kajian Evaluasi Breakwater Eksisting Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Kajian Penerapan Konsep Eco Port di Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 15	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	Kajian Energi Terbarukan Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 9	0,8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1
	Studi Survey Investigation Design (SID) Rencana Dermaga Service Boat di Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Pemantauan Pembangunan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok	IKK. 11 dan 12	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4
	Updating RIP dan DLKr/ DLKp	IKK. 8	-	-	1,2	4	1,2	4	1,2	4	1,2	4	4,8	16
	Studi Penyusunan DLKr & DLKp Pelabuhan Pangandaran	IKK. 8	-	-	-	-	-	-	0,6	1	-	-	0,6	1
	Studi Penyusunan AMDAL Kawasan Pelabuhan Pangandaran	IKK. 15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
	Studi Penyusunan RIP dan DLKr/DLKp Pelabuhan Indramayu	IKK. 8	-	-	-	-	-	-	1,2	1	-	-	1,2	1
	Studi Kelayakan Lokasi Rumah Dinas Pejabat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	IKK. 9	0,2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1
	Penyusunan Bahan Evaluasi Pemenuhan penyediaan fasilitas daratan dan perairan pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan	IKK. 22 dan 23	-	-	-	-	0,5	1	-	-	-	-	1	1
	Evaluasi Kebermanfaatan Fasilitas Pelabuhan yang telah terbangun berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan	IKK. 22 dan 23	-	-	-	-	0,5	1	-	-	-	-	1	1
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
	Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran													
	Meubelair	IKK 3 dan 4	1.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	3.5	5
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi													
	Alat Pengolah Data	IKK 3 dan 4	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.4	1	2	5
5	Pengadaan Kendaraan Operasional													

No	Program/ Kegiatan Strategis	IKK Terkait	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Total indikasi Anggaran 2020-2024 (Rp. Milyar)	Target 2020 - 2024
			Indikasi Anggaran (Rp. Milyar)	Target										
	Kendaraan Operasional Roda 2	IKK 3 dan 4	0.1	3	-	-	-	-	-	-	0.1	5	0.2	8
	Kendaraan Operasional Roda 4	IKK 3 dan 4	1.4	2	-	-	1,2	4	-	-	-	-	2,6	2
6	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepelabuhanan													
	Bimtek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	IKK 1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	2.5	5
	Bimtek KPBU	IKK 1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	1.5	5
	Bimtek Mitigasi Bencana Infrastruktur Pelabuhan	IKK 1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	1.5	5
	Bimtek penyusunan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	IKK 1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	1.5	5
	Bimtek Hidroceanografi	IKK 1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	1.5	5
	Bimtek Freight Forwarding	IKK 1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	2,5	5
7	Layanan Perkantoran													
	Gaji dan Tunjangan	IKK 3	14,5	1	15,3	1	16,0	1	16,8	1	17,7	1	73,2	5
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	IKK 3 dan 4	6	1	6,3	1	6,5	.1	6,9	1	7,3	1	33,2	5